



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020



Pemerintah Kota Balikpapan
Balikpapan Kubangun, Kujaga, dan Kubela



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP juga merupakan bagian dari siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sejalan dengan amanat dalam peraturan tersebut di atas, LKjIP Kota Balikpapan tahun 2020 merupakan gambaran capaian kinerja Kota Balikpapan tahun 2020 yang diukur berdasarkan capaian indikator sasaran Wali Kota Balikpapan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Wali Kota Balikpapan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2018. Perjanjian Kinerja tahun 2020 tersebut disusun berdasarkan atas penggalan RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020, Wali Kota Balikpapan menetapkan 10 sasaran dan 20 indikator kinerja (IKU) berikut targetnya. Pencapaian sasaran dan target indikator tersebut didukung oleh program prioritas dan program penunjang tahun 2020.

Berdasarkan rata-rata hasil pengukuran terhadap indikator kinerja (IKU) Kota Balikpapan tahun 2020 per sasaran strategisnya, maka capaian sasaran strategis (sasaran kinerja) Kota Balikpapan tahun 2020 dinyatakan adalah sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran Strategis "**Meningkatnya Kualitas Pendidikan**" pada tahun 2020 sebesar 95,66% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian IKU Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah.
2. Capaian Sasaran Strategis "**Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Berkelanjutan**" pada tahun 2020 sebesar 100,61% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Angka Harapan Hidup.
3. Capaian Sasaran Strategis "**Menurunnya Jumlah Pengangguran**" pada tahun 2020 sebesar 73,72% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Pengangguran Terbuka dan Angka Partisipasi Angkatan Kerja.
4. Capaian Sasaran Strategis "**Meningkatnya Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Menyeluruh dan Berkelanjutan**" pada tahun 2020 sebesar 95,85% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Gender.
5. Capaian Sasaran Strategis "**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**" pada tahun 2020 sebesar 104,75% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
6. Capaian Sasaran Strategis "**Meningkatnya Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan**" pada tahun 2020 sebesar 109,65% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) *Livable City Index*.



7. Capaian Sasaran Strategis "**Terwujudnya Infrastruktur yang Handal**" pada tahun 2020 sebesar 103,84% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar.
8. Capaian Sasaran Strategis "**Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat**" pada tahun 2020 sebesar 108,46% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Gini Ratio dan PDRB Perkapita.
9. Capaian Sasaran Strategis "**Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan**" pada tahun 2020 sebesar 105,15% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PDRB Non Migas.
10. Capaian Sasaran Strategis "**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**" pada tahun 2020 sebesar 100,74% yang diukur berdasarkan tingkat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Opini Laporan Keuangan dengan realisasi WTP (diasumsikan tercapai), Indeks Persepsi Korupsi, Survey Kepuasan Masyarakat, Nilai Evaluasi LAKIP, Penilaian Kepatuhan dan Indeks Profesionalitas ASN.

Sehubungan uraian diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2020 menunjukkan ketercapaian pada 13 indikator namun terdapat pula 7 IKU yang belum tercapai yaitu IKU HLS, TPT, TPAK, TKm, IPG, Gini Rasio, dan Nilai Evaluasi LAKIP. Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik khususnya yang berkaitan secara langsung dengan beberapa indikator diatas



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas selesainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Balikpapan tahun 2020. LKjIP Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2020 menyajikan gambaran informasi tentang pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja Walikota Balikpapan tahun 2020.

LKjIP tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2020. Pedoman penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sangat disadari bahwa laporan ini masih banyak terdapat berbagai kekurangan dalam penyajiannya. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaannya. Semoga laporan ini dapat memudahkan bagi semua pihak (*stakeholder*) yang berwenang untuk menilai capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2020.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyelesaian laporan ini diucapkan terima kasih.

Balikpapan 29 Maret 2021

WALIKOTA BALIKPAPAN



H.M. RIZAL EFFENDI



DAFTAR ISI

COVER SAMPUL DALAM.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LANDASAN HUKUM.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	3
C. DATA ORGANISASI.....	3
D. SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN	8
B. PERJANJIAN KINERJA	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	28
B. REALISASI ANGGARAN.....	99
C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN.....	113
BAB IV PENUTUP.....	124
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Balikpapan	12
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Kota Balikpapan Tahun 2020	15
Tabel 2.3. Program dan Anggaran yang Mendukung Perjanjian Kinerja Kota Balikpapan Tahun 2020	16
Tabel 3.1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2020	31
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2020.....	47
Tabel 3.3. Predikat Penilaian IKLH	59
Tabel 3.4. Realisasi Capaian IKU sampai dengan 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD	74
Tabel 3.5. Capaian Pelaksanaan Progran Yang Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja .	88
Tabel 3.6. Komposisi Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020	99
Tabel 3.7. Perkembangan Target dan Realisasi PAD Kota Balikpapan Tahun 2012-2020	101
Tabel 3.8. Komponen Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah.....	102
Tabel 3.9. Perkembangan Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Balikpapan.....	104
Tabel 3.10. Perincian Dana Perimbangan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2020.....	105
Tabel 3.11. Perincian Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2020	106
Tabel 3.12. Komposisi Belanja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2020...	109
Tabel 3.13. Perincian Belanja Tidak Langsung Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2020	110
Tabel 3.14. Perincian Belanja Langsung Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2020	111
Tabel 3.15. Komposisi Pembiayaan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2020	113
Tabel 3.15. Komposisi Pembiayaan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2020	113
Tabel 3.16. Penghargaan dan Prestasi yang Diraih Pemerintah Kota Balikpapan	
Tahun Anggaran 2019.....	114
Tabel 3.17. Penghargaan Warga Prestasi Hut Ke 124 Kota Balikpapan Tahun 2021....	119
Tabel 3.18. Penghargaan Penanganan Covid-19 Hut Ke 124 Kota Balikpapan	



Tahun 2021	121
Tabel 3.19. Penerima Panji Keberhasilan Pembangunan Daerah Tahun 2020.....	122
Tabel 4.1. Hasil pengukuran kinerja terhadap 20 indikator sasaran strategis	
Kota Balikpapan Tahun 2020	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Rapat Evaluasi Kelas Jabatan oleh Kemendagri (18 Maret 2020).....	33
Gambar 3.2.	Rapat Perubahan Uraian Tugas Penyesuaian Dengan Permendagri No. 90 tahun 2020 (28 November 2020).....	33
Gambar 3.3.	Pembinaan Dokumen SAKIP Perangkat Daerah Dalam Rangka Kesiapan Evaluasi AKIP (9 Juli 2020)	35
Gambar 3.4.	Workshop pelaksanaan RB dan penguatan AKIP Terbuka Tahun 2020 (16 Desember 2020)	36
Gambar 3.5.	Peta Proses Bisnis Kota Balikpapan.....	37
Gambar 3.6.	Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis (2 Oktober 2020).....	38
Gambar 3.7.	Foto Halaman Portal esakip.balikpapan.go.id.....	39
Gambar 3.8.	Foto Halaman Beranda Akun Perangkat Daerah pada esakip.balikpapan.go.id	39
Gambar 3.9.	Rakor penyempurnaan e-SKP	40
Gambar 3.10.	Rapat Uji Coba e-SKP di Perangkat Daerah.....	40
Gambar 3.11.	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian IKU <i>Livable City Index</i> (20 Juni 2020).....	41
Gambar 3.12.	Coaching Clinic BKPSDM penyusunan SKP berbasis IKI (12 Februari 2020).....	42
Gambar 3.13.	Dokumentasi suasana <i>desk/coaching clinic</i> OPD Dinsos, P3AKB, DKUMKMP, DPMPT, DPU, Diskominfo, DPPR, DLH, Kec. Balikpapan Utara, Setda, Dispustakar dan Disnaker.....	45
Gambar 3.14.	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Rata-rata Lama Sekolah Huruf Tahun 2020	49
Gambar 3.15.	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2020.....	50
Gambar 3.16.	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Angka Harapa Hidup Tahun 2020.....	51
Gambar 3.17.	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020	53
Gambar 3.18.	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020.....	55
Gambar 3.19.	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020	56
Gambar 3.20.	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemiskinan Tahun 2020	57
Gambar 3.21.	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Gender Tahun 2020	59
Gambar 3.22.	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020.....	61
Gambar 3.23.	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama <i>Livable City Index</i> Tahun 2020	62

Gambar 3.24. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Indek Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah Tahun 2020	64
Gambar 3.25. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Gini Ratio Tahun 2020.....	65
Gambar 3.26. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai PDRB Perkapita Tahun 2020.....	67
Gambar 3.27. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama PDRB Non Migas Tahun 2020	68
Gambar 3.28. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Opini Laporan Keuangan Tahun 2020.....	69
Gambar 3.29. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2020.....	70
Gambar 3.30. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2020.....	72
Gambar 3.31. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi LAKIP Tahun 2020	73
Gambar 3.32. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Penilaian Kepatuhan Tahun 2020.....	74
Gambar 3.33. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas ASN terhadap kebersihan dan Keindahan kota Tahun 2020.....	76



BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan adalah suatu gambaran akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Balikpapan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian Visi dan Misi tersebut, sekaligus dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi perencanaan ke depan.

LKjIP yang disusun dan dilaporkan Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2020 merupakan gambaran akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Balikpapan yang harus dipertanggung jawabkan pada akhir tahun 2020, yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.

Gambaran akuntabilitas tersebut terlihat dari pengukuran target seluruh indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja sebagaimana dijelaskan di atas.

Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan janji yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Wali Kota Balikpapan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2020, sekaligus dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun tahun 2016-2021 dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Balikpapan Tahun 2020

A. LANDASAN HUKUM

Penyusunan LKjIP Kota Balikpapan Tahun 2020 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;



12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Secara umum, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP Kota Balikpapan tahun 2020 adalah untuk memberikan gambaran pencapaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2020 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2016-2021.

Hasil pelaporan ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, terutama untuk perbaikan kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan periode 2016-2021.

Secara lebih rinci, pencapaian sasaran dalam LKjIP tersebut bermaksud untuk memberikan gambaran tentang :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2020 terhadap target sasaran RPJMD tahun 2016-2021 ;
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2020;
3. Penjelasan dan analisa yang memadai atas pencapaian kinerja tersebut; dan
4. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2020 dengan target kinerja 2016-2021 (5 tahun) yang direncanakan (RPJMD Kota Balikpapan).

Adapun tujuan dari penyusunan LKjIP tersebut adalah untuk :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. DATA ORGANISASI

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Balikpapan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan



Susunan Perangkat Daerah. Peraturan tersebut mengatur susunan perangkat daerah Kota Balikpapan dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah yang terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
 4. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan, urusan pemerintahan di bidang pertanian dan urusan pemerintahan di bidang perikanan;
 5. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A , menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 7. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan layanan perizinan terpadu satu pintu;
 8. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan sub urusan pemerintahan di bidang penataan ruang dan sub urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung;
 9. Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 10. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;



11. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13. Dinas Ketenagakerjaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja;
14. Dinas Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan;
15. Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olah raga dan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
16. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
17. Dinas Ketentraman dan Ketertiban Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut dengan Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan di bidang kearsipan; dan
19. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan di bidang statistik dan urusan pemerintahan di bidang persandian;

e. Badan Daerah terdiri atas:

1. Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
2. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

f. Kecamatan yang terdiri atas:



1. Kecamatan Balikpapan Barat dengan Tipe A;
2. Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Tipe A;
3. Kecamatan Balikpapan Kota dengan Tipe A;
4. Kecamatan Balikpapan Utara dengan Tipe A;
5. Kecamatan Balikpapan Selatan dengan Tipe A; dan
6. Kecamatan Balikpapan Timur dengan Tipe A.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan LKjIP Pemerintah Kota Balikpapan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Balikpapan tahun 2020, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerjanya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Melakukan pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020;
2. Membandingkan antara realisasi / capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2018;
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2018 sampai dengan 2020 (2 tahun) dengan target jangka menengah (5 tahun) yang terdapat dalam dokumen RPJMD periode 2016-2021;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kab/kota lain



dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur;

5. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (yang ada) dan realisasi tingkat nasional (yang ada);
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

B. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2020 sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020.

C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada sub bab ini diuraikan penghargaan dan prestasi yang diraih Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2020.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2020.
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2020.
3. Surat Keputusan Walikota Tentang Indikator Kinerja Utama Kota Balikpapan.
4. Hasil Reviu Inspektorat Kota Balikpapan Terhadap LKjIP Tahun 2020.
5. RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021
6. Prestasi dan penghargaan yang diraih Kota Balikpapan Tahun 2020.
7. Foto-foto kegiatan peningkatan kualitas dokumen SAKIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, dan program prioritas Walikota Balikpapan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam satu periode masa jabatan.

Penyusunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat serta dialog yang melibatkan *stakeholders* terkait Disamping itu penyusunan RPJMD ini mempedomani RPJP Kota Balikpapan, memperhatikan RPJMD Provinsi, RPJMN dan mengacu pada RTRW Provinsi dan Kabupaten Kota.

Tahun 2020 merupakan tahun ketiga dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan 2016-2021 dan juga merupakan tahun ketiga kepemimpinan Walikota/Wakil Walikota Balikpapan Periode 2016-2021.

Sinkronisasi, sinergitas dan kesinambungan program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan menjadi prioritas dalam program kegiatan tahun 2020.

1. VISI DAN MISI

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kota Balikpapan untuk periode RPJMD 2016-2021 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

VISI
MEWUJUDKAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA
YANG NYAMAN DIHUNI, DAN BERKELANJUTAN
MENUJU MADINATUL IMAN



Penjelasan Visi diatas bermakna sebagai berikut :

a. **KOTA TERKEMUKA** adalah suatu kondisi kota yang berkembang dengan keberadaan beragam infrastruktur moda perhubungan (darat, laut, udara); keberadaan kantor-kantor pelayanan pemerintah dan swasta skala Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; sumber daya alam yang tidak dieksploitasi, serta keberadaan fasilitas penunjang perkotaan lainnya, baik di bidang jasa kesehatan dan pendidikan maupun jasa di bidang pariwisata (perhotelan, restoran). Kota Balikpapan juga diharapkan berkembang menjadi kota yang Unggul di Bidang Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Pendidikan, & Budaya baik dalam Skala Regional, Nasional maupun Global. Pengembangan pusat perekonomian terbaru dalam kawasan *Coastal Road*, pengembangan pusat pendidikan teknologi se-Kalimantan, posisi strategis sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur yang secara langsung berdampak pada laju perekonomian Kota Balikpapan bahkan Provinsi Kalimantan Timur, pengembangan Kawasan Industri Kariangau sebagai pusat industri dan investasi daerah serta pengembangan objek wisata hutan lindung mangrove sebagai destinasi ekowisata Kalimantan Timur. Pesatnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur akan semakin memperluas jaringan lingkup pelayanan jasa Kota Balikpapan kedepan. Tingginya intensitas berbagai pertemuan, pameran dan konferensi baik skala regional, nasional maupun internasional menjadikan Kota Balikpapan dikenal sebagai Kota MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*) yang memperkuat peran dan fungsi Kota Balikpapan sebagai kota terkemuka.

b. **KOTA NYAMAN DIHUNI** (*Livable City*) adalah suatu kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll).

Prinsip-prinsip dari *Livable City* diantaranya :

1. Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik);
2. Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas kesehatan/ kesehatan/ ibadah);



3. Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi;
4. Keamanan, bebas dari rasa takut;
5. Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya;
6. Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

c. **KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA YANG BERKELANJUTAN** adalah suatu kondisi kota yang memiliki identitas berbasis karakter fisik, keunggulan ekonomi dan budaya lokal. Bertambahnya jumlah penduduk yang terus meningkat membuat layanan kota akan semakin tidak efektif, kecuali kota dapat memberikan fasilitas layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara keseluruhan yang tinggal di kota. Oleh karena itu, Kota Balikpapan harus dapat mewujudkan diri sebagai kota yang mampu melayani penduduknya dengan fasilitas yang memadai dan berkualitas. Kemampuan untuk menyediakan fasilitas layanan infrastruktur untuk mewadahi aktivitas masyarakat sehari-hari di Kota Balikpapan akan menimbulkan rasa nyaman bagi seluruh penduduk Kota Balikpapan.

d. **MADINATUL IMAN**, mengandung makna sebagai berikut :

- 1) Suatu sistem sosial yang tumbuh dan berkembang, yang berasaskan pada prinsip moral.
- 2) Menjamin kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat.
- 3) Mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan.
- 4) Tatanan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan berperadaban maju.

Untuk mewujudkan Visi jangka menengah di atas, ditetapkan Misi dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;
2. Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif;
5. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik

2. TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2016-2021, sebagai berikut :

MISI 1	
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang berkualitas Dan Berdaya Saing Tinggi	
Tujuan Ke-1	: Mewujudkan sumber daya yang cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual dan berdaya saing tinggi
Sasaran	: 1. Meningkatnya kualitas pendidikan.
Tujuan Ke-2	: Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani secara keseluruhan
Sasaran	: 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan.
Tujuan Ke-3	: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas melalui pengembangan partisipasi yang menyeluruh dan berkesinambungan.
Sasaran	: 3. Menurunnya jumlah pengangguran; 4. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

MISI 2	
Mewujudkan Kota Layak Huni Yang Berwawasan Lingkungan	
Tujuan Ke-4	: Meningkatkan kualitas kota yang berwawasan lingkungan.
Sasaran	: 5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; 6. Meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban lingkungan.

MISI 3	
Meningkatkan Infrastruktur Kota Yang Representatif	
Tujuan Ke-5	: Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur.
Sasaran	: 7. Terwujudnya infrastruktur yang handal;

MISI 4	
Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif	
Tujuan Ke-6	: Menggerakan Sendi-sendi Perekonomian Masyarakat.
Sasaran	: 8. Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.
Tujuan Ke-7	: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau.
Sasaran	: 9. Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

MISI 5

Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tujuan Ke-8	: Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Penyediaan Layanan Publik yang Prima
Sasaran	: 10. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2016-2021, maka perlu disusun sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Balikpapan tahun 2016-2021.

Sebagai dasar penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka Pemerintah Kota Balikpapan telah menetapkan IKU Kota Balikpapan melalui Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-14/2017 tentang Indiktor Kinerja Utama Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Adapun IKU Pemerintah Kota Balikpapan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Balikpapan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	1.	Rata-rata lama sekolah (tahun)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2.	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan	1.	Angka Harapan Hidup (tahun)	Dinas Kesehatan, RSUD Kota Balikpapan, RSKB Sayang Ibu
3	Menurunnya jumlah pengangguran	1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	Dinas Tenaga Kerja
		2.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	Dinas Tenaga Kerja
4	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	1.	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

		2.	Tingkat Kemiskinan (persen)	Bappeda Litbang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3.	Indeks Pembangunan Gender (indeks)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup
6	Meningkatnya kenyamanan, keamanan dan ketertiban lingkungan	1.	<i>Livable City Index</i> (indeks)	Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesbangpol, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Daerah, Bappeda
7	Terwujudnya infrastruktur yang handal	1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (skala)	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanahan dan penataan Ruang
8	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	1.	Indeks Gini Ratio (indeks)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
		2.	PDRB perkapita (persen)	Bappeda Litbang
9	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	1.	PDRB non migas (persen)	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup

10	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1.	Opini laporan keuangan (Kategori)	Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bappeda Litbang, Inspektorat, Bappeda Litbang, Badan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
		2.	Indeks Persepsi Korupsi (indeks)	Inspektorat, Bappeda Litbang, Sekretariat Daerah, Badan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
		3.	Survey Kepuasan Masyarakat (indeks SKM)	Bappeda Litbang
		4.	Nilai Evaluasi LAKIP (skor Kinerja)	Bappeda Litbang
		5.	Penilaian Kepatuhan (nilai kepatuhan berdasarkan zona warna)	Bappeda Litbang, Inspektorat, Sekretariat Daerah
		6.	Indeks Profesionalitas ASN (indeks)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi Perangkat Daerah se Kota Balikpapan

Sumber : Surat Keputusan Walikota Nomor : 188.45-14/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

B. PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka sebagai wujud tindak lanjut dari perencanaan pembangunan yang telah disusun, maka Pemerintah Kota Balikpapan wajib menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2020 antara Walikota Balikpapan dengan Menteri PAN dan RB. Perjanjian Kinerja tersebut disusun dengan tujuan :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan

- supervisi atas perkembangan/-kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja perangkat daerah.

Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020 ini memuat informasi tentang sasaran strategis, di mana setiap sasaran strategis memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Penetapan target IKU tersebut didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2020 kepada Menteri PAN dan RB disajikan pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah (tahun)	10.51
		2. Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	14.93
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan	1. Usia Harapan Hidup (tahun)	74
3	Menurunnya jumlah pengangguran	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.85
		2. Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)	64.5
4	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	1. IPM	79.53
		2. Tingkat Kemiskinan (%)	2.31
		3. Indeks Pembangunan Gender	92
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60.14
6	Meningkatnya kenyamanan, keamanan dan ketertiban lingkungan	1. <i>Livable City Index</i>	74
7	Terwujudnya infrastruktur yang handal	1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (skala)	78
8	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	1. Indeks Gini Ratio	0.31
		2. PDRB perkapita (Rp. Juta)	124.63



9	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	1. PDRB non migas (Rp. Triliun)	37.48
10	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Opini laporan keuangan (Kategori)	WTP
		2. Indeks Persepsi Korupsi	6.8
		3. Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai SKM)	80.16
		4. Nilai Evaluasi LAKIP (Predikat)	74
		5. Penilaian Kepatuhan (nilai kepatuhan berdasarkan zona warna)	75
		6. Indeks Profesionalitas ASN	86

Sumber : Perjanjian Kinerja Wali Kota Balikpapan Tahun 2020

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tersebut di atas, target capaian IKU akan didukung oleh program dan anggaran tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Salinan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan dengan Menteri PAN dan RB tahun 2020 disajikan dalam lampiran LKjIP ini.

Tabel 2.3. Program dan Anggaran yang mendukung Perjanjian Kinerja Kota Balikpapan Tahun 2020

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
I	PROGRAM PRIORITAS			
1	3.00.04.3.00.04.01.23.	Program Peningkatan Kualitas Manajemen Karir Aparatur Sipil Negara	19,935,718,250	Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	1.01.05.01.1.05.01.02.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	7,300,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	1.01.05.01.1.05.01.04	Program Sarana dan Prasarana Logistik	1,375,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	1.01.04.1.01.05.01.21.	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	900,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
5	3.00.03.1.01.02.02.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	79,860,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, RSKB Sayang Ibu
6	3.00.02.3.00.02.01.01	Program Penelitian dan Pengembangan	1,812,643,000	Bappeda Litbang
7	1.02.06.1.02.06.01.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3,695,013,500	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
8	1.01.02.1.01.02.00.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	5,940,969,000	Dinas Kesehatan
9	1.01.02.1.01.02.00.32.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	4,510,287,000	Dinas Kesehatan
10	1.01.02.1.01.02.00.33.	Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Kesehatan	17,270,629,450	Dinas Kesehatan
11	1.01.02.1.01.02.00.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	49,442,183,550	Dinas Kesehatan
12	1.02.10.10.2.10.10.18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	1,275,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	2.00.07.1.02.11.01.18.	Program Penataan Struktur Industri	10,233,500,000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
14	1.02.11.1.02.11.01.15.	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	169,448,350	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
15	1.02.11.1.02.11.01.19.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi	70,165,000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
16	1.02.11.1.02.11.01.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2,142,110,000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
17	2.00.07.1.02.11.01.15.	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	519,193,750	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
18	1.02.11.1.02.11.01.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	717,358,000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
19	1.02.05.1.02.05.01.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	70,673,093,300	Dinas Lingkungan Hidup



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
20	1.02.05.1.02.05.01.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	4,480,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
21	1.02.05.1.02.05.01.19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	825,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
22	1.02.05.1.02.05.01.17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	6,855,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
23	2.00.03.2.00.03.01.03.	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian	1,149,730,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
24	2.00.03.2.00.03.01.19	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	180,450,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
25	2.00.01.2.00.03.01.20.	Program Peningkatan Produksi Perikanan	950,200,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
26	2.00.03.2.00.03.01.18.	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	380,000,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
27	2.00.03.2.00.03.01.26.	Program Peningkatan Produksi Pertanian	1,217,855,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
28	1.01.03.1.01.03.01.15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	56,571,393,800	Dinas Pekerjaan Umum
29	1.01.03.1.01.03.01.33.	Program Pembangunan Pedestrian Kota	14,660,830,000	Dinas Pekerjaan Umum
30	1.01.03.1.01.03.01.16.	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	65,164,000,000	Dinas Pekerjaan Umum
31	1.01.03.1.01.03.01.27.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	15,728,400,000	Dinas Pekerjaan Umum
32	1.01.03.1.01.03.01.28.	Program pengendalian banjir	36,217,727,500	Dinas Pekerjaan Umum
33	1.01.03.1.01.03.01.71.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah	28,875,000,000	Dinas Pekerjaan Umum
34	1.01.03.1.01.03.01.17.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	94,352,403,000	Dinas Pekerjaan Umum
35	1.02.02.01.1.2.2.1.15.	Program Keluarga Berencana	3,963,803,620	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
36	1.02.02.1.02.02.01.15.	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	3,495,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
37	1.02.02.1.02.02.01.22.	Program pengembangan bahan informasi tentang Perlindungan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	1,820,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
38	1.02.02.1.02.02.01.20.	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling (Kesehatan Reproduksi Remaja) KRR	600,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
39	1.02.02.1.02.02.01.16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	350,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
40	1.02.13.1.01.01.01.20.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	18,150,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
41	2.00.02.2.00.02.01.18.	Program Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata	1,770,000,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
42	2.00.02.2.00.02.01.16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4,400,000,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
43	2.00.02.2.00.02.01.17.	Program Pengembangan Kemitraan	631,025,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
44	2.00.02.2.00.02.01.15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3,055,779,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
45	1.02.13.2.00.02.01.16.	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	2,795,000,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
46	1.01.03.1.01.03.01.34.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	20,663,000,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
47	1.02.16.1.01.01.01.19.	Program Pelestarian Benda Cagar Budaya	1,925,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
48	1.01.01.1.01.01.01.15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	7,430,943,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
49	1.01.01.1.01.01.01.30.	Program Pendidikan Dasar	214,120,035,450	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
50	1.01.01.1.01.01.01.18.	Program Pendidikan Non Formal	17,702,791,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
51	1.01.01.1.01.01.01.20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1,801,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
52	2.00.06.2.00.06.01.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	2,907,241,250	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
53	2.00.06.2.00.06.01.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	600,000,000	Dinas Perdagangan
54	2.00.06.2.00.06.01.20.	Program Peningkatan Kebersihan, Keamanan Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Pasar	5,285,960,600	Dinas Perdagangan
55	2.00.06.2.00.06.01.24.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	3,347,866,700	Dinas Perdagangan
56	2.00.06.2.00.06.01.15.	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	1,407,100,000	Dinas Perdagangan
57	1.02.09.1.02.09.01.21.	Program Penerangan Jalan Umum (PJU)	-	Dinas Perdagangan
58	1.02.09.1.02.09.01.19.	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	2,600,000,000	Dinas Perhubungan
59	1.02.09.1.02.09.01.20.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	3,882,500,000	Dinas Perhubungan
60	1.02.18.1.02.17.01.16.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	370,000,000	Dinas Perhubungan
61	1.02.18.1.02.17.01.15.	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	150,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
62	1.01.01.1.02.17.01.01.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	4,597,097,530	Dinas Perpustakaan dan Arsip
63	1.01.03.1.02.04.01.68.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	-	Dinas Perpustakaan dan Arsip, Kecamatan
64	1.01.03.1.02.04.01.66.	Program Perencanaan Tata Ruang	1,500,000,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
65	1.01.04.1.01.04.01.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	9,753,332,600	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
66	1.02.04.1.02.04.01.29	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman	2,180,625,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
67	1.01.04.1.01.04.01.15.	Program Pengembangan Perumahan	250,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
68	1.01.06.1.01.06.01.27	Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan	73,440,000	Dinas Perumahan dan Permukiman

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
69	1.01.06.1.01.06.01.16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2,378,873,600	Dinas Sosial
70	1.01.06.1.01.06.01.28.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1,135,410,000	Dinas Sosial
71	1.01.02.1.01.02.00.35.	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	150,000,000	Dinas Sosial
72	1.02.01.1.02.01.01.16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	190,838,000	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, dan Kecamatan
73	1.02.01.1.02.01.01.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,024,374,300	Dinas Tenaga Kerja
74	1.02.01.1.02.01.01.17.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	358,476,000	Dinas Tenaga Kerja
75	3.00.01.3.00.01.01.20.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2,192,472,000	Dinas Tenaga Kerja
76	5.00.01.1.01.05.02.17.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	2,200,000,000	Inspektorat
77	1.01.05.1.01.05.02.15.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	182,540,000	Satuan Polisi Pamong Praja
78	3.00.04.4.00.01.01.19.	Program Penataan Kelembagaan	360,999,700	Satuan Polisi Pamong Praja
79	3.00.03.4.00.01.01.30.	Program Pengendalian Inflasi	140,188,000	Sekretariat Daerah
80	1.02.12.1.02.12.01.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	200,000,000	Sekretariat Daerah
81	3.00.03.3.00.03.01.29.	Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	15,026,837,787	Sekretariat Daerah
82	1.02.12.1.02.12.01.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	300,000,000	Sekretariat Daerah
83	1.02.10.1.02.10.10.23.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	4,450,000,000	Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
84	1.02.12.1.02.12.01.19.	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan	686,000,000	Sekretariat DPRD, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika
JUMLAH I			882,093,861,587	
II	PROGRAM PENUNJANG			
85	6.00.01.6.00.01.01.44.	Program Fasilitas Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Sekolah	661,529,750	Kecamatan Se Kota Balikpapan
86	5.00.01.1.01.05.01.27	Program Pengembangan Ketahanan Politik Ekonomi Sosial dan Budaya	-	Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
87	4.00.01.4.00.01.01.37.	Program Bantuan Hukum dan HAM	898,346,000	Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
88	4.00.01.4.00.01.01.36.	Program Evaluasi dan Pelaporan Pemerintahan	159,122,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah
89	4.00.01.4.00.01.01.69.	Program Fasilitas dan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Kota	250,981,300	Badan Pengelola Keuangan Daerah
90	4.00.01.4.00.01.01.43.	Program Hari Jadi Kota	4,500,000,000	Bappeda Litbang
91	2.00.03.2.00.03.01.17.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Petani, Peternak, Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah	381,750,000	Bappeda Litbang
92	3.00.04.3.00.04.01.17.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	55,100,000	Bappeda Litbang
93	1.01.03.1.01.03.01.31.	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	500,000,000	Dinas Kesehatan
94	6.00.01.6.00.01.01.18.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
95	1.01.01.1.01.01.01.31.	Program Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan	1,960,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
96	4.00.01.4.00.01.01.02.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2,874,250,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
97	1.02.18.1.02.17.01.17.	Program Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	271,875,000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
98	1.01.03.1.01.03.01.38.	Program Pemeliharaan Saluran dan Drainase	20,994,497,500	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
99	2.00.06.2.00.06.01.21.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	1,800,000,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
100	1.02.09.1.02.09.01.32.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	800,000,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
101	4.00.01.4.00.01.01.27.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	199,650,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
102	1.02.04.1.02.04.01.16.	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	689,999,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
103	4.00.01.4.00.01.01.26.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1,082,049,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
104	2.00.03.2.00.03.01.21.	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan/Ternak	853,800,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
105	5.00.01.5.00.01.01.21.	Program pendidikan politik masyarakat	2,645,000,000	Dinas Pekerjaan Umum
106	1.02.04.1.02.04.01.21.	Program Pengadaan Lahan Pembangunan Jalan dan Jembatan	5,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum
107	1.02.04.1.02.04.01.22.	Program Pengadaan Lahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	27,800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum
108	1.02.04.1.02.04.01.20.	Program Pengadaan Lahan Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	18,042,500,000	Dinas Pekerjaan Umum
109	1.02.09.1.02.09.01.31.	Program Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan	759,990,000	Dinas Pekerjaan Umum
110	1.02.09.1.02.09.01.33.	Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	958,300,000	Dinas Pekerjaan Umum
111	1.02.12.1.02.12.02.20	Program Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum
112	1.02.10.1.02.10.10.10.	Program Pengawasan Pengendalian	169,895,000	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
		Telekomunikasi dan Teknologi Informasi		Terpadu
113	1.01.04.1.01.04.01.04.	Program pengelolaan areal pemakaman	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
114	4.00.01.4.00.01.01.34.	Program Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	2,705,049,200	Dinas Perdagangan
115	1.02.16.1.01.01.01.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	3,256,250,000	Dinas Perdagangan
116	3.00.03.3.00.03.01.32.	Program Pengelolaan Keuangan Perbendaharaan	1,455,000,000	Dinas Perhubungan
117	1.02.09.1.02.09.01.22.	Program Pengelolaan Parkir	5,150,000,000	Dinas Perhubungan
118	3.00.03.3.00.03.01.31.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	125,000,000	Dinas Perhubungan
119	1.02.05.1.01.04.01.05.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	18,530,648,450	Dinas Perhubungan
120	1.01.04.1.01.04.01.06.	Program Pengelolaan Rumah Susun	3,500,000,000	Dinas Perhubungan
121	2.00.05.4.00.01.01.20.	Program Pengembangan City Gas	-	Dinas Perhubungan
122	1.01.03.1.01.03.01.24.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	3,500,000,000	Dinas Perhubungan
123	1.02.01.1.02.01.01.19	Program Pengembangan Data dan Informasi	64,225,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
124	1.02.09.1.02.09.01.26.	Program Pengembangan Data, Informasi Perhubungan /Transportasi dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.	2,500,000,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
125	3.00.02.1.02.01.01.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	805,000,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
126	2.00.03.2.00.03.01.23.	Program Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) Masyarakat Perikanan	297,825,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
127	4.00.01.4.00.01.01.15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	479,682,700	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
128	2.00.01.2.00.03.01.24.	Program Pengembangan Pencatatan Kegiatan Usaha Perikanan	75,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
129	2.00.01.2.00.03.01.21.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	350,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
130	2.00.06.2.00.06.01.24.	Program Pengembangan Potensi dan Pendapatan	-	Dinas Perumahan dan Permukiman
131	1.02.12.1.02.12.01.18.	Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	655,538,000	Dinas Perumahan dan Permukiman, Sekretariat Daerah
132	4.00.01.4.00.01.01.07.	Program Pengembangan Sistem Pelaporan	1,153,500,000	Dinas Sosial
133	1.02.11.1.02.11.01.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	189,058,000	Dinas Sosial dan Dina Tenaga Kerja
134	5.00.01.5.00.01.01.35.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1,950,000,000	Inspektorat
135	1.01.01.1.01.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	102,400,000	Kantor Kesbangpol
136	4.00.01.4.00.01.01.22.	Program Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan ASN	1,211,659,700	Kantor Kesbangpol
137	2.00.03.2.00.03.01.01.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	-	Kantor Kesbangpol
138	1.01.03.1.01.03.01.36.	Program Peningkatan Drainase Lingkungan	12,417,542,800	Kantor Kesbangpol
139	1.01.03.1.01.03.01.35.	Program Peningkatan Jalan Lingkungan	66,322,457,200	Kantor Kesbangpol, Sekretariat Daerah
140	4.00.01.4.00.01.01.18.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan	250,000,000	Kantor Kesbangpol, Sekretariat Daerah
141	4.00.02.4.00.02.01.15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	28,993,234,870	Kecamatan Se Kota Balikpapan
142	1.01.05.1.01.05.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	151,642,500	Kecamatan Se Kota Balikpapan
143	4.00.01.4.00.01.01.41.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	1,488,240,000	Kecamatan, Sekretariat Daerah
144	3.00.04.3.00.04.01.20.	Program Peningkatan Kinerja ASN	75,292,500	Kecamatan, Sekretariat Daerah
145	3.00.04.3.00.04.01.21.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	335,347,750	RSKB Sayang Ibu
146	1.01.02.1.01.02.00.34.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada	27,713,908,300	Sekretariat Daerah

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
		Masyarakat		
147	4.00.01.4.00.01.01.39.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1,002,950,000	Sekretariat Daerah
148	1.02.07.4.00.01.01.26.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	1,356,473,800	Sekretariat Daerah
149	4.00.01.4.00.01.01.16.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah	17,000,000,000	Sekretariat Daerah
150	2.00.03.2.00.03.01.23.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	1,235,570,000	Sekretariat Daerah
151	5.00.01.5.00.01.01.20.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	65,000,000	Sekretariat Daerah
152	1.02.07.4.00.01.01.24.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	6,216,769,000	Sekretariat Daerah
153	3.00.03.3.00.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10,000,000	Sekretariat Daerah
154	1.02.07.6.00.01.01.25.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	3,447,835,250	Sekretariat Daerah
155	3.00.01.3.00.01.01.21.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1,037,840,000	Sekretariat Daerah
156	1.01.01.1.01.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,094,178,000	Sekretariat Daerah
157	1.01.03.1.01.03.01.37.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	-	Sekretariat Daerah
158	1.02.10.1.02.10.10.19.	Program Penyebarluasan Informasi Daerah	19,107,300	Sekretariat Daerah
159	1.02.10.1.02.10.10.01.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	-	Sekretariat Daerah
160	2.00.03.4.00.01.01.25.	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya dan Sarana Prasarana	-	Sekretariat Daerah
161	3.00.02.3.00.02.01.26.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan	206,750,000	Sekretariat Daerah



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
		Rakyat dan Aparatur		
162	3.00.02.3.00.02.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	15,000,000	Sekretariat Daerah
163	1.01.06.1.01.06.01.23.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	663,927,000	Sekretariat Daerah
164	1.02.09.1.02.09.01.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	3,000,000,000	Sekretariat Daerah
165	1.01.03.1.01.03.01.22.	Program Sistem Data Informasi Pekerjaan Umum	-	Sekretariat Daerah
166	1.01.02.1.01.02.02.23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	-	Sekretariat Daerah
167	5.00.01.1.01.05.01.17.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	455,000,000	Sekretariat Daerah, Bappeda Litbang, Badan Pengelola Keuangan Daerah
168	1.01.01.1.01.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,732,200,640	Sekretariat DPRD
169	1.02.09.1.02.09.01.23.	Program Pelayanan Angkutan Perairan	706,000,000	Seluruh OPD Kota Balikpapan
170	1.02.10.1.02.10.10.24.	Program Pelayanan Pengaduan Masyarakat	727,500,000	Seluruh OPD Kota Balikpapan
171	4.00.01.4.00.01.01.40.	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	489,836,500	Seluruh OPD Kota Balikpapan
JUMLAH II			321,894,074,010	
JUMLAH I + JUMLAH II			1,203,987,935,597	

Sumber : APBD Kota Balikpapan, Tahun 2020

Berdasarkan tabel 2.3 diatas, bahwa dalam mewujudkan capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Balikpapan tahun 2020 yang diperjanjikan Wali Kota Balikpapan dialokasikan 171 program dengan alokasi Rp. 1.203.987.935.597,00.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang terkait berhasil atau tidaknya pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dalam hal akuntabilitas kinerja Kota Balikpapan adalah antara Wali Kota Balikpapan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Republik Indonesia.

Perwujudan akuntabilitas kinerja tersebut melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja (PK) antara Wali Kota Balikpapan dengan Menteri PANRB tahun 2020. Dasar PK tersebut mengacu pada hasil analisis antara target dalam dokumen RPJMD 2016-2021 dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Untuk memudahkan digunakan media **formulir Pengukuran Kinerja**, atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Area* Kota Balikpapan sebagai kota yang layak dihuni menuju madinatul iman.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Laporan LKjIP Tahun 2020

Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Balikpapan pada tahun 2020 belum dapat dituangkan pada laporan ini dikarenakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum memberikan nilai hasil evaluasi AKIP kepada Pemerintah Kota Balikpapan. Terkait dengan kondisi tersebut rujukan Nilai AKIP menggunakan hasil evaluasi AKIP tahun 2018 dan tahun 2019. Adapun gambaran hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Nilai Hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan
Pada Tahun 2020

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2018	2020
a. Perencanaan Kinerja	30	21,42	21,49
b. Pengukuran Kinerja	25	15,10	15,26
c. Pelaporan Kinerja	15	10,69	10,82
d. Evaluasi Internal	10	6,53	6,64
e. Capaian Kinerja	20	14,39	14,47
Nilai Hasil Evaluasi	100	68,13	68,68
Tingkat Akutabilitas Kinerja		B	B

Sumber: Surat KemenpanRB Nomor: B/619/AA.05/2020

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemerintah kota Balikpapan memperoleh nilai 68,68 atau predikat B. Hasil nilai evaluasi AKIP pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan telah meningkatkan budaya kinerja yang lebih efektif dan telah melakukan efisiensi penggunaan anggaran guna mengoptimalkan belanja program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Walaupun dengan adanya peningkatan hasil evaluasi AKIP pada tahun 2019 tersebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan suatu masukan terkait perbaikan lebih lanjut atas capaian evaluasi kinerja tersebut. Adapun hasil penilaian kinerja AKIP tahun 2019 sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Balikpapan telah mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja dengan baik, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya terbangun budaya kinerja sampai pada level unit terkecil.
2. Penjabaran kinerja dari tingkat kabupaten sampai ke individu sudah diimplementasikan melalui perjanjian kinerja berjenjang. namun penjabaran kinerja tersebut belum seluruhnya berdasarkan kerangka keterkaitan hasil proses antar level jabatan, sehingga belum dapat menggambarkan hubungan kausalitas kinerja antar level organisasi.
3. Pemerintah Kota Balikpapan telah membangun sistem pengendalian dan evaluasi kinerja, namun pelaksanaannya perlu dioptimalkan terutama dalam mengawal target RPJMD agar memastikan bahwa perencanaan program dan kegiatan relevan dengan sasaran strategis dalam mewujudkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.



4. Capaian Kinerja individu telah dijadikan ukuran dalam pemberian tunjangan kinerja pegawai, namun masih terdapat ketidaksesuaian antara Indikator Kinerja Individu dengan ukuran kinerja yang dituangkan dalam sasaran kerja pegawai SKP, ukuran kinerja dalam belum seluruhnya menggambarkan tolak ukur keberhasilan kinerja dari masing-masing individu pegawai.
5. Laporan kinerja yang telah disusun oleh seluruh perangkat daerah perlu disempurnakan terutama pada kedalaman analisis atas capaian kinerja dan agar dijadikan sebagai dasar dalam peningkatan kinerja. Selain itu, mekanisme pengumpulan data kinerja dalam rangka pelaporannya juga perlu ditingkatkan keandalannya.
6. Evaluasi atas program yang dilakukan belum optimal dan baru sebatas mengevaluasi pelaksanaan program dan penyerapan anggaran, belum kepada hasil dari implementasi program tersebut, sehingga masih terdapat ketidakselarasan antara kegiatan, hasil program, serta sasaran strategis setiap perangkat daerah.
7. Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui Inspektorat. Hasil evaluasi secara internal ini masih memerlukan penyempurnaan terkait dengan simpulan hasil evaluasi yang belum sepenuhnya menggambarkan kondisi penerapan SAKIP di perangkat daerah.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, Pihak Kementerian PANRB telah merekomendasikan beberapa hal dan berdasarkan rekomendasi tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan telah mengambil langkah-langkah tindak lanjut sebagaimana uraian berikut ini.

1. Rekomendasi :

Menerapkan *Performance Based Organization* dengan menjadikan RPJMD sebagai acuan dalam membangun organisasi selain memperhatikan ketentuan terhadap penyusunan Organisasi Perangkat Daerah.

Langkah tindak lanjut :

Dalam rangka menerapkan Organisasi yang berbasis kinerja, telah dilakukan :

- a. Evaluasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan MENPANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;



Gambar 3.1
Rapat Evaluasi Kelas Jabatan oleh Kemendagri (18 Maret 2020)

- b. Indikator Kinerja dalam RPJMD menjadi dasar dalam penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;
- c. Melakukan evaluasi atas masing-masing uraian tugas dengan menyesuaikan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai salah satu acuannya;



Gambar 3.2
Rapat Perubahan Uraian Tugas Penyesuaian Dengan Permendagri No. 90 tahun 2020 (28 November 2020)



2. Rekomendasi :

Menyempurnakan penjabaran kinerja dari level Pemerintah Kota sampai ke individu dengan memperhatikan kerangka berpikir logis (logical framework) sehingga membentuk keselarasan dan keterkaitan kinerja antar jenjang organisasi dan juga kontribusi kinerja individu secara berjenjang sesuai levelnya dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah;

Langkah tindak lanjut :

- a. Penjabaran kinerja dari level Pemerintah Kota sampai ke tingkat individu diupayakan melalui pendampingan dan workshop kepada Perangkat Daerah terkait penyempurnaan Indikator Kinerja Individu melalui kegiatan rapat-rapat koordinasi.





Gambar 3.3
Pembinaan Dokumen SAKIP Perangkat Daerah Dalam Rangka
Kesiapan Evaluasi AKIP (9 Juli 2020)

- b. Pelaksanaan Workshop Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja dengan narasumber dari Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur dengan peserta perwakilan dari seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Balikpapan





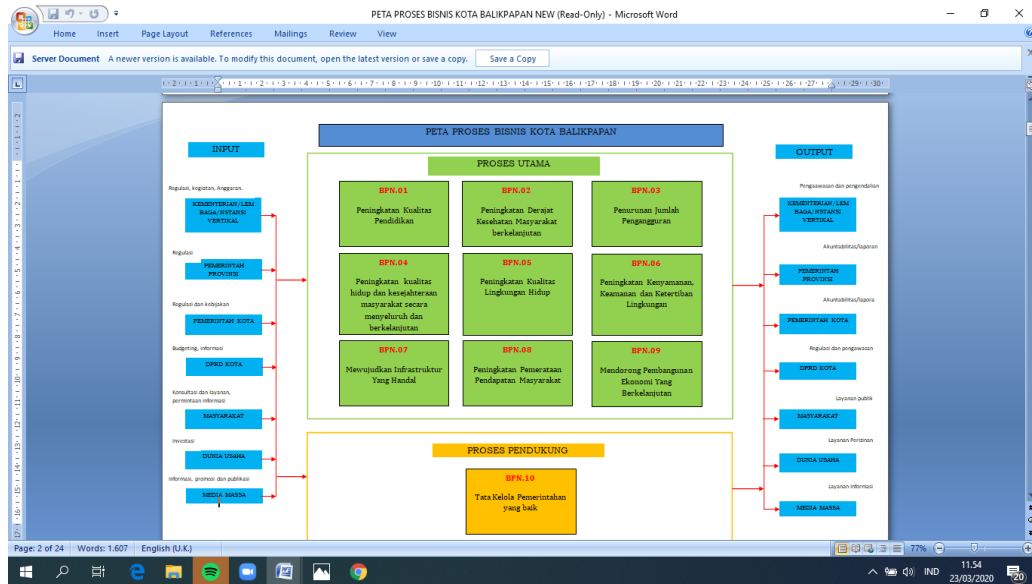
Gambar 3.4
Workshop pelaksanaan RB dan penguatan AKIP
(16 Desember 2020)

3. Rekomendasi :

Menyusun Peta Proses Bisnis yang menggambarkan proses pencapaian kinerja pada berbagai tingkatan organisasi. Peta Proses Bisnis yang menggambarkan proses pencapaian kinerja pada berbagai tingkatan organisasi. Peta Proses Bisnis ini selanjutnya akan dijadikan acuan dalam perumusan penjabaran kinerja utama pada setiap jenjang organisasi hingga individu. Hasil penjabaran kinerja tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyusunan IKU.

Langkah tindak lanjut :

- a. Melaksanakan penyusunan Peta Proses Bisnis Kota Balikpapan gambar di bawah ini.



Gambar 3.5
Peta Proses Bisnis Kota Balikpapan

- b. Melaksanakan Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis kepada seluruh Kasubbag Program/Perencanaan Perangkat Daerah dengan mengundang nara sumber Sammy Primadi Bakrie, Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Tata Laksana Kementerian PAN RB.





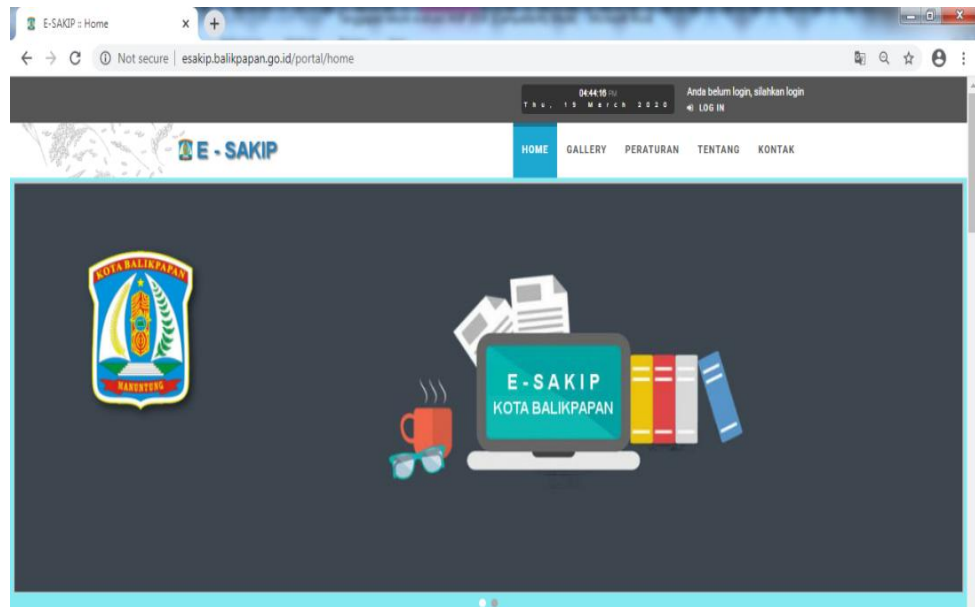
Gambar 3.6
Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis (2 Oktober 2020)

4. Rekomendasi :

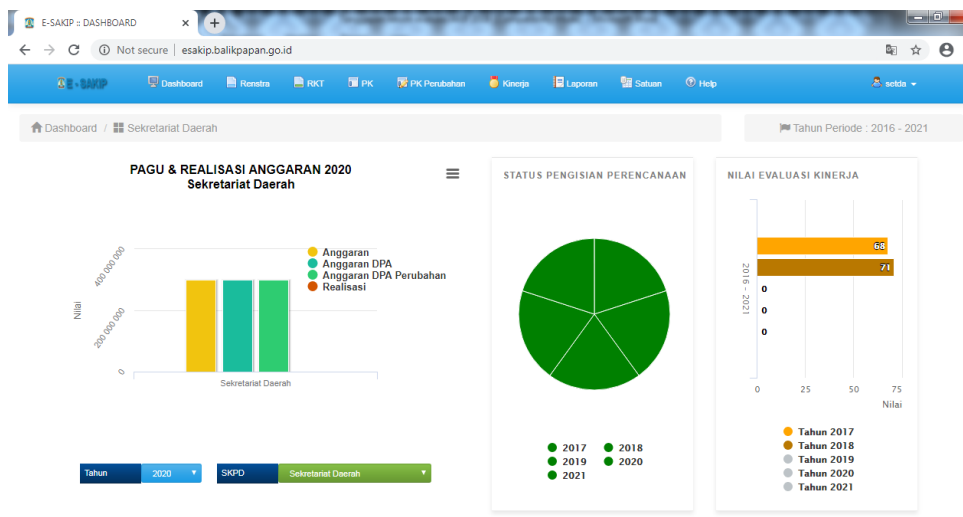
Menyempurnakan aplikasi manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pimpinan dan sebagai dasar *reward and punishment*. Aplikasi ini juga diharapkan dapat mewujudkan mekanisme pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang semakin andal serta meningkatkan kualitas laporan kinerja. Selain itu, aplikasi tersebut diharapkan dapat mengintegrasikan informasi keuangan maupun tingkat capaian kinerja.

Langkah tindak lanjut :

Melakukan replika terhadap aplikasi Silakip Pemkot Bandung. Aplikasi ini beralamat di esakip.balikpapan.go.id yang merupakan aplikasi pemantauan dokumen SAKIP di Pemerintah Kota Balikpapan. Pimpinan dan seluruh masyarakat dapat dengan mudah memantau terkait Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja bahkan hingga seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.



Gambar 3.7
Foto Halaman Portal esakip.balikipapan.go.id



Gambar 3.8
Foto Halaman Beranda Akun Perangkat Daerah pada esakip.balikipapan.go.id

5. Rekomendasi :

Mendorong penerapan budaya kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dengan menyusun indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi dan menggambarkan tolok ukur keberhasilan kinerja individu serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP.

Langkah tindak lanjut :



- a. Membangun aplikasi SKP online, penggunaan SKP online yang beralamat di skp.balikpapan.go.id dipergunakan untuk memudahkan dalam memperoleh hasil pengukuran kinerja dari pegawai, untuk selanjutnya akan diintegrasikan dengan aplikasi e-Kinerja dan sebagai penghitung dalam pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai yang berdampak pada kesadaran berbudaya kinerja bagi pegawai.



Gambar 3.9
Rakor penyempurnaan e-SKP



Gambar 3.10
Rapat Uji Coba e-SKP di Perangkat Daerah

- b. Melakukan pembinaan Bimtek Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Sosialisasi SKP Online kepada pegawai terkait penyusunan SKP yang berbasis IKU, sehingga SKP yang disusun benar-benar mencerminkan kinerja dari pegawai.



Nara sumber acara tersebut dari Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur dan Bagian Organisasi Setdakot Balikpapan



Gambar 3.11
Bimtek penguatan akuntabilitas kinerja dan sosialisasi SKP online
(20 Juni 2020)

- c. melalui BKPSDM Kota Balikpapan, melakukan Coaching Clinic penyusunan SKP dengan nara sumber Direktur Kinerja ASN Badan Kepegawaian Negara (Ibu Neny Rochyany). Penyusunan SKP tidak hanya berdasarkan uraian tugas



semata namun berbasis pada Indikator Kinerja Individu, memiliki target yang dapat diukur dan mencerminkan kinerja dari setiap pegawai.



Gambar 3.12
Coaching Clinic BKPSDM penyusunan SKP berbasis IKI
(12 Februari 2020)

6. Rekomendasi :

Memperbaiki penyajian laporan kinerja terutama mengenai kedalaman analisis capaian kinerja dan analisis efektifitas penggunaan anggaran serta tingkat akurasi data sehingga laporan kinerja dapat menjadi bahan masukan (*feedback*) bagi perbaikan pencapaian kinerja ke depan.

Langkah tindak lanjut :

Bagian Organisasi bersama Bappeda Litbang Kota Balikpapan selalu melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah terkait evaluasi terhadap capaian kinerja per triwulan, sehingga dapat dilakukan fokus dan percepatan pencapaian target yang telah ditetapkan (baik target IKU maupun IKI). Percepatan terhadap program dan kegiatan yang *men-support* langsung terhadap pencapaian kinerja harus menjadi fokus. Evaluasi kinerja tersebut juga telah difasilitasi oleh aplikasi eSAKIP Kota Balikpapan.

7. Rekomendasi :

Melakukan *reviu* dan *refocusing* terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU. Hasil *reviu* ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan.

Langkah tindak lanjut :



Reviu dan *refocusing* tersebut dilakukan dengan melakukan pembentukan Klinik SMART sebagai wadah khusus untuk melakukan analisis, penajaman dan perbaikan indikator kinerja secara berjenjang dalam RENSTRA Perangkat Daerah (PD) berdasarkan kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable/Actuating, Reliable* dan *Timebound*). Kegiatan Klinik SMART adalah melakukan reviu dan *refocusing* melalui *desk/coaching* terhadap setiap PD dengan menghadirkan para pejabatnya untuk membahas secara berjenjang melalui 8 langkah (*step*), yaitu :

- 1) Reviu dan analisis terhadap penetapan tujuan organisasi dengan tupoksi dan peraturan lainnya;
- 2) Reviu dan analisis antara tujuan dengan indikator tujuan;
- 3) Reviu dan analisis antara indikator tujuan dengan sasaran/sasaran strategis;
- 4) Reviu dan analisis antara sasaran strategis dengan indikator sasaran (IKU);
- 5) Reviu dan analisis antara IKU dengan program;
- 6) Reviu dan analisis antara program dengan indikator program;
- 7) Reviu dan analisis antara indikator program dengan kegiatan; dan
- 8) Reviu dan analisis antara kegiatan dengan indikator kegiatan.

Tata cara dalam melakukan *desk/coaching* telah dibuat acuan dalam bentuk Petunjuk Teknis Klinik SMART.

Setelah melakukan *desk/coaching*, melalui Klinik SMART tersebut dapat teridentifikasi beberapa hal di samping tujuan utama tersebut di atas, antara lain :

- 1) Program dan kegiatan yang tidak mendukung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan alias program dan kegiatan yang mubazir;
- 2) Tumpang tindih kewenangan urusan dan indikator sasaran, program dan kegiatan antar Perangkat Daerah;
- 3) Tumpang tindih indikator program dan kegiatan antar jabatan dalam internal Perangkat Daerah sendiri;

Klinik SMART di-*launching* secara resmi oleh Wali Kota Balikpapan pada tanggal 11 Juni 2020 di hadapan para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Di samping itu Klinik SMART telah mendapat dukungan dari Kementerian PANRB (melalui Ibu Nadimah), Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Timur dan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

Tahap awal Klinik SMART dilaksanakan pada 12 Perangkat Daerah sesuai jadwal yang telah disepakati. *Desk/coaching* pertama kali (perdana) pada



tanggal 12 Juni 2020 pada Dinas Sosial, selanjutnya diikuti oleh Perangkat Daerah lainnya. Tahap berikutnya dilakukan kepada 24 Perangkat Daerah lainnya dan sampai saat ini sudah terlaksana untuk 22 Perangkat Daerah, dan akan terus berlanjut sampai sekarang.





Gambar 3.13

Dokumentasi suasana desk/coaching clinic OPD Dinsos, P3AKB, DKUMKMP, DPMPT, DPU, Diskominfo, DPPR, DLH, Kec.Balikpapan Utara, Setda, Dispustakar dan Disnaker

8. Rekomendasi :

Meningkatkan kapasitas Inspektorat Kota Balikpapan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk memastikan terwujudnya efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Inspektorat harus mampu memastikan terdapat



keselarasan antara kinerja organisasi dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam penganggaran.

Langkah tindak lanjut :

Secara keseluruhan, peningkatan kapasitas Inspektorat Kota Balikpapan selalu mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Balikpapan dengan mengalokasikan anggaran sekitar 0,15% (sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2020). Berbagai pelatihan dan bimtek telah diikuti, termasuk pelatihan/ bimtek yang terkait evaluasi kinerja.

2. Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan

2.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014, Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan pada 2020 didasarkan atas minimal 4 pengukuran yaitu :

- a. Pengukuran capaian Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 berdasarkan perbandingan target dan realisasi Sasaran Strategis dan IKU Tahun 2020;
- b. Pengukuran capaian Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 berdasarkan perbandingan antara realisasi capaian tahun 2017 dan realisasi capaian tahun 2020; dan
- c. Pengukuran Capaian Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 terhadap Capaian Target Akhir Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Balikpapan Kota Balikpapan.
- d. Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 Kota Balikpapan dengan capaian kinerja Pemerintah Kab/Kota lain, Pemerintah Provinsi Kaltim dan Nasional (jika ada).

Pengukuran capaian Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan didasarkan atas target yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Wali Kota Balikpapan dengan Menteri PANRB, dan telah disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 2020.

Target yang diperjanjikan pada tahun 2020 terdiri atas 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana tergambar pada Bab II Laporan ini. Sejalan hal tersebut, pengukuran capaian kinerja atas 10 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama dipengaruhi oleh hasil realisasi dari setiap sasaran strategis yang terintegrasi atas tiap-tiap Indikator Kinerja Utama (IKU). Realisasi capaian dari indikator tersebut merupakan hasil final yang terukur atas pengolahan data dan perhitungan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan instansi vertikal yang berkewenangan dalam mempublikasikan data realisasi capaian kinerja pada akhir tahun 2020.

Berdasarkan uraian tersebut, adapun hasil capaian Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2020 untuk 10 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama disajikan pada tabel 3.2. dibawah ini.

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN IKU
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	1	Rata-rata lama sekolah (tahun)	10.51	10.68	101.62%
		2	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	14.93	14.14	94.71%
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan	1	Angka Harapan Hidup (tahun)	74	74.49	100.66%
3	Menurunnya jumlah pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.85	9.00	53.89%
		2	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)	64.5	62.90	97.52%
4	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	1	Indeks Pembangunan Manusia (angka indeks)	79.53	80.01	100.60%
		2	Tingkat Kemiskinan (%)	2.31	2.57	89.88%
		3	Indeks Pembangunan Gender (angka indeks)	92	89.65	97.45%



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN IKU
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (angka indeks)	60.14	63.52	105.62%
6	Meningkatnya kenyamanan, keamanan dan ketertiban lingkungan	1 <i>Livable City Index</i> (angka indeks)	74	81.69	110.39%
7	Terwujudnya infrastruktur yang handal	1 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (angka indeks)	78	82.03	105.17%
8	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	1 Indeks Gini Ratio (angka indeks)	0.31	0.33	106.45%
		2 PDRB perkapita (Rp. Juta)	124.63	155.977	125.15%
9	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	1 PDRB non migas (Rp.Triliun)	37.48	N/A	-
10	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1 Opini laporan keuangan (Kategori)	WTP	WTP	100.00%
		2 Indeks Persepsi Korupsi (angka indeks)	6.8	6.92	101.76%
		3 Survey Kepuasan Masyarakat (angka skala)	80.16	80.37	100.26%
		4 Nilai Evaluasi LAKIP (Predikat)	74	N/A	-
		5 Penilaian Kepatuhan (angka skala)	75	83.19	110.92%
		6 Indeks Profesionalitas ASN (angka indeks)	86	93.30	108.49%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Bappeda Litbang tahun 2020

Berdasarkan tabel 3.2. dari 20 Indikator Kinerja Utama yang diukur capaian kinerjanya terdapat 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan tercapai/melebihi dari target, 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang capaiannya kurang dari target dan 2 Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan tidak terdapat capaian dari target PK Wali Kota Balikpapan tahun 2020.



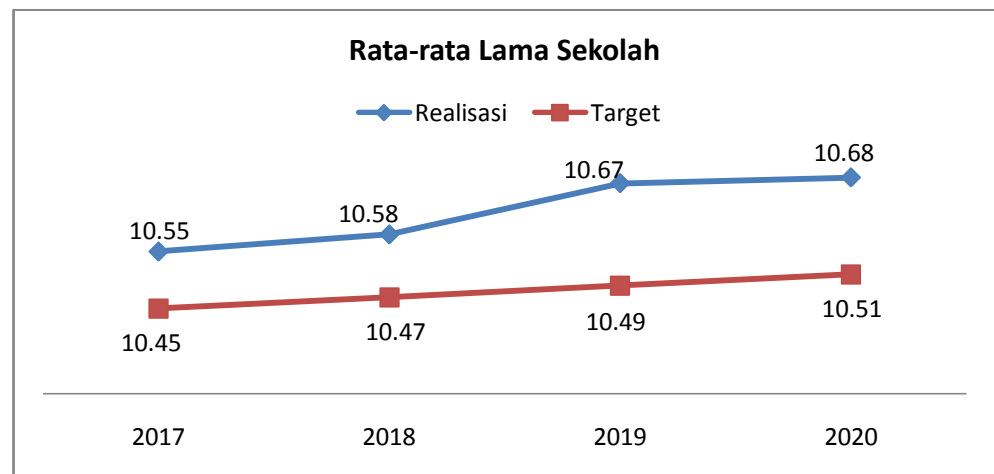
2.2. ANALISIS CAPAIAN AKUNTABILITAS TERHADAP KINERJA

2.2.1. Perbandingan Realisasi Terhadap Target IKU Tahun 2020

Berdasarkan Capaian Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2020, selanjutnya dilakukan analisis capaian realisasi terhadap target IKU tahun 2020, Adapun analisis terdeskripsi sebagai berikut.

a. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Target indikator kinerja utama Rata-rata Lama Sekolah sebesar 10,51 sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai realisasi sebesar 10,68 dengan capaian kinerja 101,62% artinya Kinerja Wali Kota pada tahun 2020 “TERCAPAI”. Berikut perkembangan capaian IKU RLS tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.



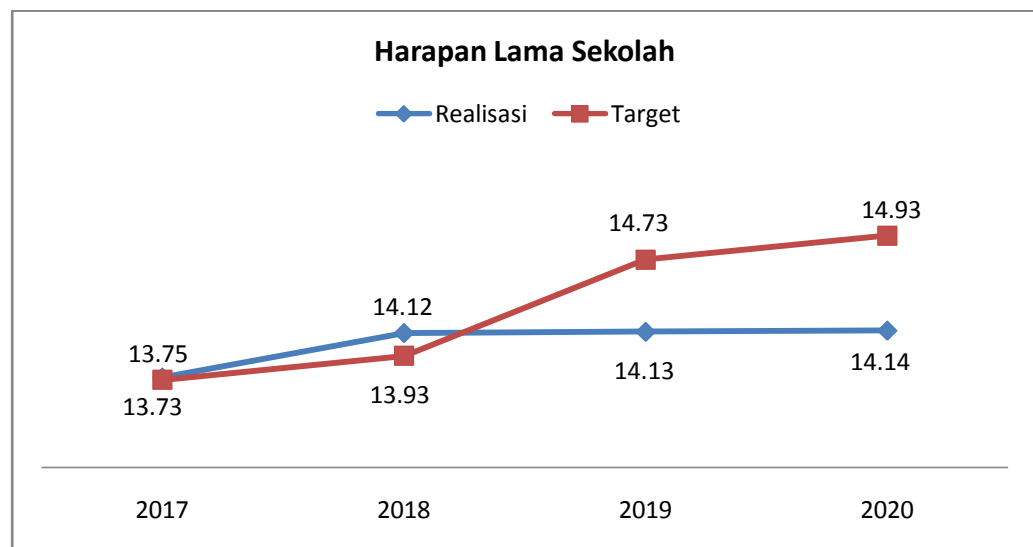
Gambar 4.1

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2020

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa secara rata-rata penduduk kota Balikpapan yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,68 tahun atau hampir menamatkan kelas XI. Capaian hasil akuntabilitas kinerja RLS pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,01 tahun dari capaian realisasi tahun 2019 sebesar 10,67 tahun.

b. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Target indikator kinerja utama angka Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 14,93 tahun sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai realisasi sebesar 14,14 dengan capaian kinerja 94,71% artinya Kinerja Wali Kota pada tahun 2020 “HAMPIR TERCAPAI”. Berikut perkembangan capaian IKU HLS tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.



Gambar 4.2

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Harapan Lama Sekolah Tahun 2019

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukan bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,14 tahun atau setara dengan Diploma III. Capaian hasil akuntabilitas kinerja HLS pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,01 tahun dari capaian realisasi tahun 2019 sebesar 14,12 tahun.

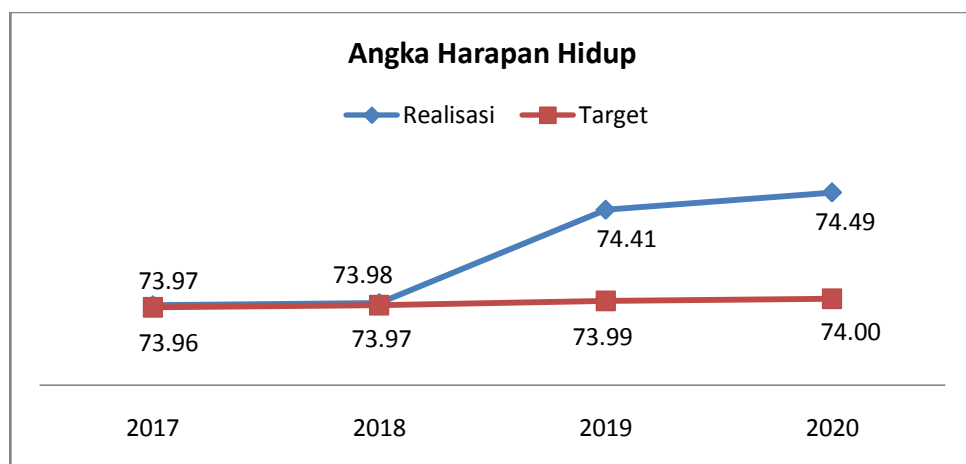
Berdasarkan peningkatan capaian HLS tersebut, masih terdapat permasalahan dalam pencapaian target HLS pada tahun 2020. Hal tidak tercapainya target HLS dipengaruhi oleh faktor ketersediaan jumlah tenaga pengajar tidak berbanding terhadap jumlah siswa di Kota Balikpapan, sehingga hal tersebut menurunkan pemerataan kuantitas dan kualitas layanan pendidikan pada jenjang tertentu yaitu pendidikan tingkat dasar, dan lanjutan



menengah pertama. Terkait menurunnya Harapan Lama Sekolah tersebut Pemerintah Kota bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta instansi perlu melakukan pengangkatan tenaga pengajar berdasarkan kebutuhan dalam rangka memenuhi rasio jumlah tenaga pengajar dan jumlah siswa serta memberdayakan tenaga bantu pengajar dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Kota Balikpapan.

c. Usia Harapan Hidup (UHH)

Target indikator kinerja utama Angka usia Harapan Hidup (UHH) sebesar 74,00 tahun sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai realisasi sebesar 74,49 tahun dengan capaian kinerja 100,66% artinya Kinerja Wali Kota pada tahun 2020 “TERCAPAI”. Berikut perkembangan capaian IKU UHH tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.



Gambar 4.3
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama
Usia Harapan hidup Tahun 2020

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukan bahwa bayi-bayi yang dilahirkan di Kota Balikpapan menjelang tahun 2020 (periode 2015-2017) akan dapat hidup sampai 74,49 atau 75 tahun. Tetapi bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahn 2028 mempunyai usia harapan hidup lebih panjang yakni 78 tahun, meningkat lagi menjadi 85 tahun untuk bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2048, dan bayi yang dilahirkan tahun 2060 usia harapan hidupnya mencapai 90 tahun. Capaian hasil akuntabilitas kinerja AHH pada tahun 2020 mengalami

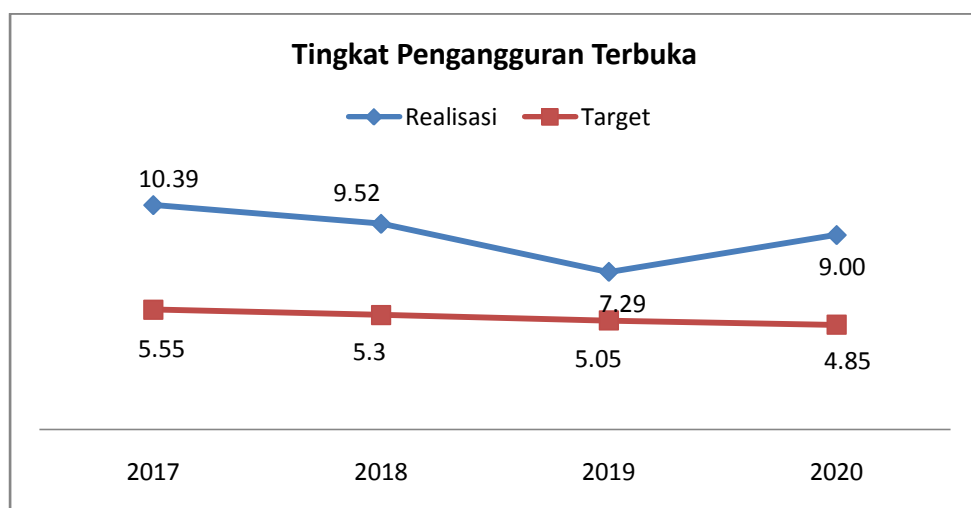
peningkatan sebesar 0,08 tahun dari capaian realisasi tahun 2020 sebesar 74,41 tahun.

Capaian IKU Angka Harapan Hidup menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota Balikpapan secara berkelanjutan pada tahun 2019, keberhasilan tersebut ditinjau dari lamanya usia penduduk kota Balikpapan terhitung sejak lahir. Terkait dengan tingkat capaian indikator sasaran tersebut maka asumsi perilaku hidup sehat masyarakat telah dilaksanakan secara baik.

Upaya dan tindaklanjut pemerintah kota bersama perangkat daerah terkait perlu meningkatkan kinerjanya untuk terus mengembangkan dan berinovasi dengan fokus pentingnya hidup sehat dalam diri, berkeluarga, dan masyarakat. Selain hal tersebut perlu meningkatkan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Target indikator kinerja utama Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,85% sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai realisasi sebesar 9% dengan capaian kinerja 53,89% artinya Kinerja Wali Kota pada tahun 2020 “KURANG TERCAPAI”. Berikut perkembangan capaian IKU TPT tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.



Gambar 4.4
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020



Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukan bahwa TPT di kota Balikpapan masih tinggi, hal ini menggambarkan kondisi banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Capaian hasil akuntabilitas kinerja TPT pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,71% dari capaian realisasi tahun 2019 sebesar 7,29%. Berdasarkan capaian TPT tersebut menunjukan penurunan tingkat pengangguran di Kota Balikpapan yang cukup signifikan.

Meningkatnya TPT di Kota Balikpapan, disebabkan oleh sejumlah faktor permasalahan ketenagakerjaan di kota Balikpapan sebagai berikut:

- a. Pandemi covid 19 yang berpengaruh signifikan pada penurunan produksi baik barang/jasa diseluruh sektor lapangan usaha di Kota Balikpapan, hal ini berdampak pada pengurangan pekerja dan PHK yang tidak dapat dihindari oleh sejumlah perusahaan guna melakukan efisiensi pengeluaran di masa pandemi covid 19.
- b. Pendapatan UMKM yang menurun di masa pandemi covid 19 mengakibatkan tidak sedikit usaha rumah tangga yang tutup.
- c. Jumlah pengangguran berbanding terbalik terhadap jumlah angkatan kerja. Artinya bahwa jumlah pencari kerja lebih besar dari angkatan kerja pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan penyerapan tenaga kerja masih rendah pada tahun sebelumnya, sehingga menambah jumlah pencari kerja pada tahun 2020.
- d. Jumlah ketersediaan lapangan kerja yang tidak memadai atau dapat diasumsikan adanya penyempitan ruang penyerapan tenaga kerja dan hal ini berdampak permintaan tenaga kerja menjadi lebih sedikit.
- e. Jumlah pemutusan hubungan kerja meningkat sangat signifikan dalam 4 tahun terakhir dan masih terjadi sampai dengan akhir tahun 2020.
- f. Angkatan kerja yang tersedia kurang dapat memenuhi permintaan bursa tenaga kerja baik lokal maupun non lokal. Sedangkan disisi lain jumlah angkatan kerja yang berasal dari luar kota Balikpapan lebih mendominasi dalam pemenuhan permintaan lapangan kerja yang berada di kota Balikpapan.



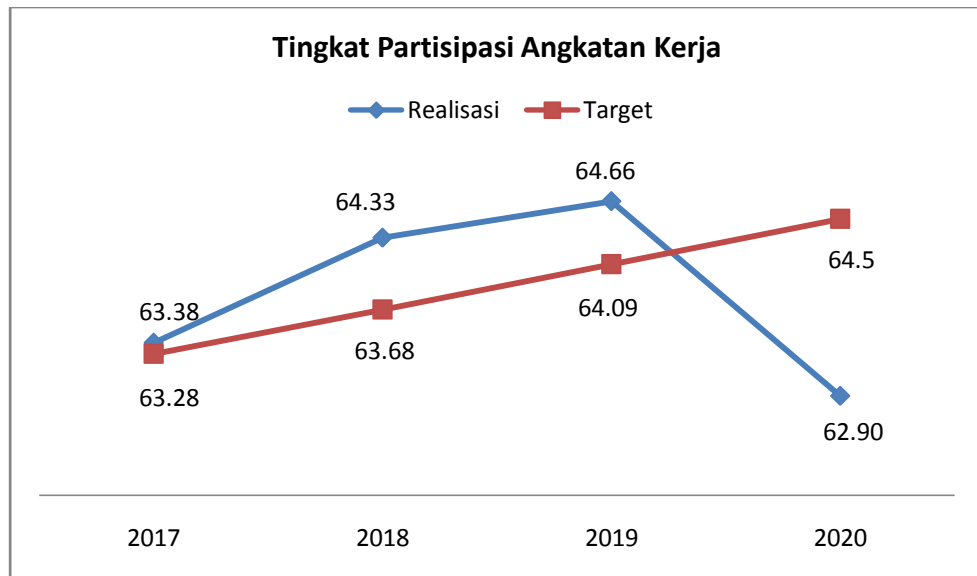
- g. Permasalahan belum adanya arah kebijakan, metode dan ukuran yang memadai untuk menyelesaikan pengangguran terbuka.

Berdasarkan uraian penyebab terjadinya penurunan kinerja pada Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka, maka pemerintah kota berupaya :

- a. Memberikan bantuan dana kepada UMKM dan usaha rumah tangga.
- b. Meningkatkan protokol kesehatan pada seluruh kegiatan usaha di Kota Balikpapan.
- c. Menyediakan potensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor lapangan kerja yang berada di kota Balikpapan serta memberdayakan kewirausahaan di daerah seperti UMKM.
- d. Mempercepat pembangunan dan pengembangan kawasan potensi investasi serta membangun minat investor untuk menanamkan modalnya.
- e. Membangun arah pendidikan dan penyediaan balai latihan kerja yang memadai serta dapat memenuhi spesifikasi yang searah terhadap kebutuhan lapangan kerja.
- f. Menurunkan tingkat dominasi daya saing tenaga kerja dari luar daerah.
- g. Melaksanakan review dan pemuktahiran data ketenagakerjaan, pengendalian dan evaluasi terhadap arah kebijakan, metode dan ukuran target indikator untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Target indikator kinerja utama Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 64,50% sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai realisasi sebesar 62,90% dengan capaian kinerja 97,52% artinya Kinerja Wali Kota pada tahun 2020 “HAMPIR TERCAPAI”. Berikut perkembangan capaian IKU TPAK tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.



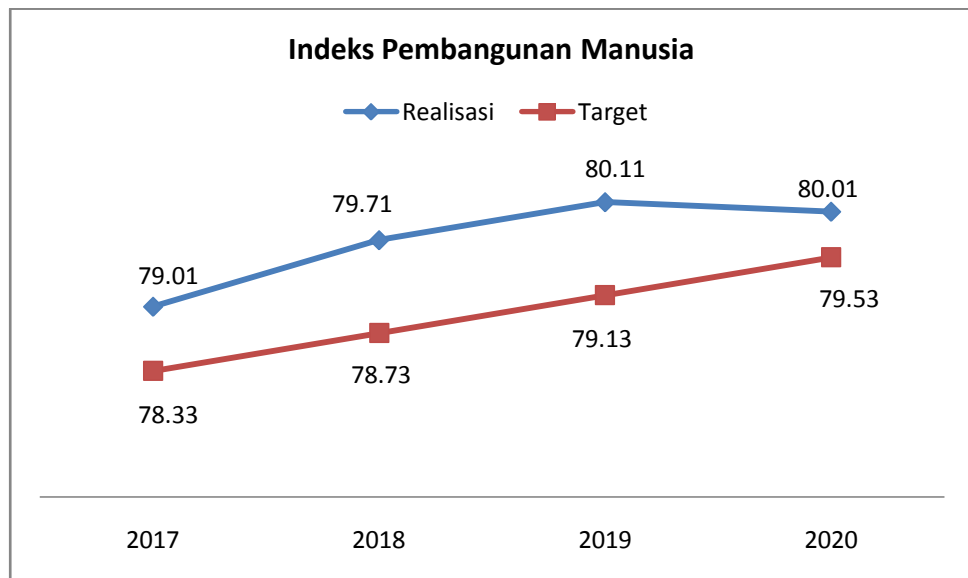
Gambar 4.5
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa semakin tinggi TPAK maka semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia di kota Balikpapan untuk memproduksi barang dan jasa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah. Capaian hasil akuntabilitas kinerja TPAK pada tahun 2020 mengalami pnurunan sebesar 1,76% dari capaian realisasi tahun 2019 sebesar 64,66%, hal ini disebabkan oleh pandemi covid 19 yang memberikan pengaruh langsung terhadap daya tahan kesehatan, kebutuhan akan pendidikan dan kelayakan hidup masyarakat di Kota Balikpapan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pemerintah kota perlu menindaklanjuti dan mengupayakan perkuatan yang berfokus pada : a) Percepatan penanganan pandemic covid 19 guna meningkatkan partisipasi tenaga kerja, b) Investasi SDM (Sumber Daya Manusia) Berkualitas, c) Meningkatkan Pendidikan, d) Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja, e) Menyediakan Lapangan Kerja yang Memadai, f) Memperkuat Investasi di bidang Kesehatan, g) Meningkatkan Produksi Pangan dan h) Melaksanakan Program Keluarga Berencana (KB) sebagai gerakan nasional.

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Target indikator kinerja utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 79,53 sampai dengan akhir tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai realisasi sebesar 80,01% dengan capaian kinerja 100,60% artinya Kinerja Wali Kota pada tahun 2020 “TERCAPAI”. Berikut perkembangan capaian IKU IPM tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.



Gambar 4.6.

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa semakin tinggi IPM maka kualitas hidup manusia dan pembangunan di kota Balikpapan semakin baik. Pencapaian IPM dihasilkan atas nilai dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi pengeluaran. Capaian hasil akuntabilitas kinerja IPM pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,1% dari capaian realisasi tahun 2019 sebesar 80,01%.

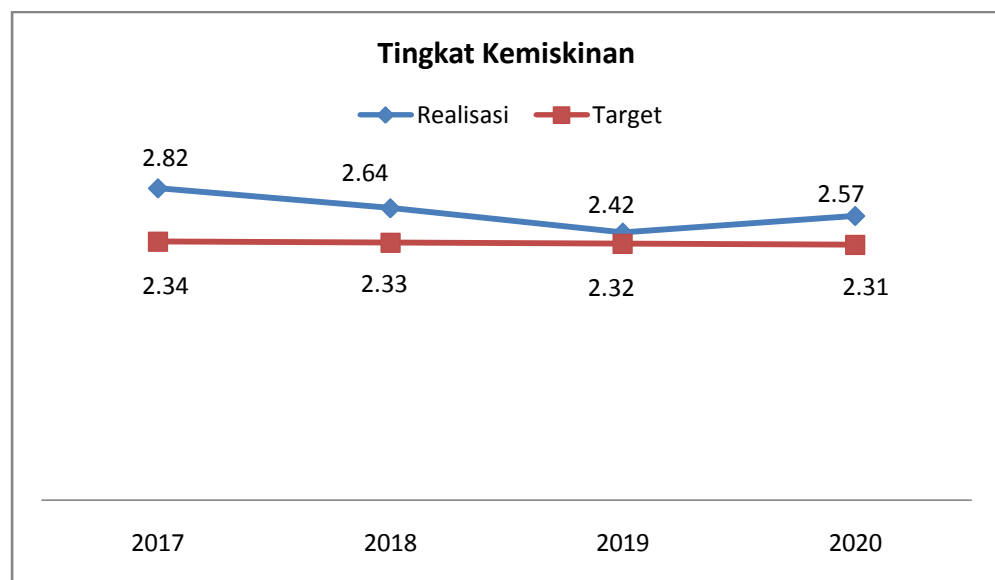
Upaya tindak lanjut Pemerintah Kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU IPM pada tahun 2019 adalah :

- a. Penerapan protokol covid 19, sosialisasi hidup sehat dimasa pandemi dan menekan jumlah kematian pasien yang terpapar covid 19.

- b. Memperbaiki perekonomian masyarakat yang menurun pendapatannya di masa pandemic covid 19.
- c. Percepatan pemberian vaksin bagi seluruh masyarakat di Kota Balikpapan.
- d. Mengoptimalkan dimensi pendapatan, kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat kota Balikpapan.
- e. Meningkatkan akses layanan yang siap, murah, dan cepat untuk pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.
- f. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap berbagai sumber hambatan dalam meningkatkan layanan perangkat daerah pada masyarakat kota Balikpapan.

g. Tingkat Kemiskinan (TKm)

Target indikator kinerja utama Tingkat Kemiskinan (TKm) sebesar 2,31% sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai realisasi sebesar 2,57% dengan capaian kinerja 89,88% artinya Kinerja Wali Kota pada tahun 2020 “HAMPIR TERCAPAI”. Berikut perkembangan capaian IKU TKm tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.



Gambar 4.7
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama
Tingkat Kemiskinan Tahun 2020



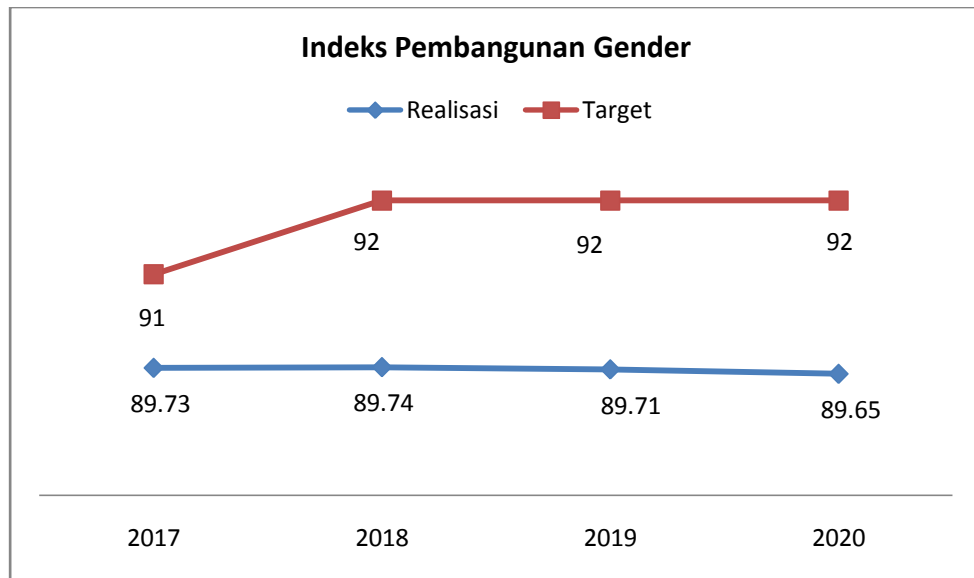
Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukan bahwa masih terdapatnya sejumlah penduduk di kota Balikpapan yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Capaian hasil akuntabilitas kinerja TKm pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,15% dari capaian realisasi tahun 2020 sebesar 2,42%.

Garis kemiskinan ini didasarkan atas sejumlah penduduk di kota Balikpapan tidak dapat memenuhi nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari, dan sejumlah penduduk di kota Balikpapan tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan Kota Balikpapan kembali meningkat dengan jumlah penduduk miskin menjadi sebanyak 17.020 jiwa atau sebesar 2,57 persen dibanding tahun sebelumnya dengan besaran jumlah penduduk miskin sebanyak 15.780 jiwa atau 2,42 persen dengan Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 0,38, Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,12 dan Garis Kemiskinan Perkapita Perbulan sebesar Rp. 613.622,-. Berdasarkan data tersebut, faktor penyumbang kemiskinan di Kota Balikpapan didasarkan atas rata-rata pengeluaran per kapita per bulan sejumlah penduduk kota Balikpapan masih terdapat di bawah Garis Kemiskinan (GK).

h. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Target IKU Indeks Pembangunan Gender sebesar 92 sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai realisasi sebesar 89,65 dengan capaian kinerja 97,45% artinya Kinerja Wali Kota Balikpapan pada tahun 2020 “HAMPIR TERCAPAI”. Berikut perkembangan capaian IKU IPG tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.



Gambar 4.8
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2020

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukan bahwa nilai indeks pembangunan gender di Kota Balikpapan pada tahun 2020 sebesar 89,65 arti mendekati angka 100, hal ini mengindikasikan semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Capaian hasil akuntabilitas kinerja IPG pada tahun 2020 mengalami penurunan indeks sebesar 0,06 dari capaian realisasi tahun 2019 sebesar 89,71%.

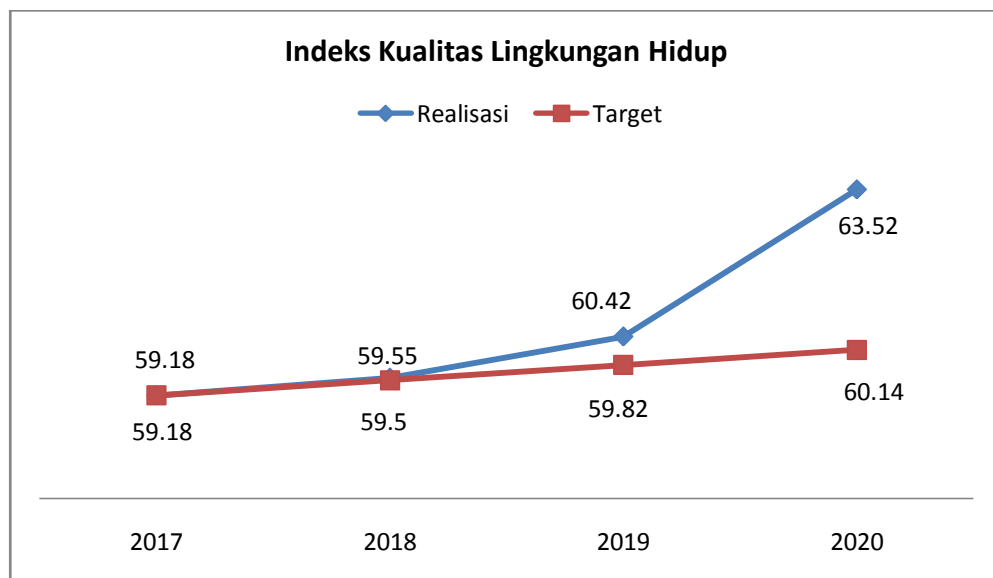
Berdasarkan interpretasi atas hasil akuntabilitas kinerja diatas menunjukan bahwa upaya pemerintah kota Balikpapan telah berhasil dalam menurunkan ketimpangan gender di kota Balikpapan berdasarkan capaian 4 tahun terakhir. Sejalan dengan capaian realisasi kinerja Indeks Pembangunan Gender tahun menunjukan kesenjangan antar gender berpredikat sangat rendah dalam pembangunan atau adanya kesetaraan gender dalam pembangunan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang.

Upaya yang telah pemerintah kota Balikpapan lakukan adalah meningkatkan pemberian pelatihan bagi perempuan, kesempatan berusaha dan bekerja yang seluas-luasnya bagi perempuan, menurunkan tingkat diskriminasi gender, menurunkan tingkat kekerasan dalam rumah tangga, sosialisasi dan kampanye pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan melalui

organisasi-organisasi wanita serta tersedianya porsi perempuan sebagai kepala OPD dan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk perempuan.

i. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Target IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 60,14 sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai realisasi sebesar 63,52 dengan capaian kinerja 105,62% artinya Kinerja Wali Kota Balikpapan pada tahun 2020 “TERCAPAI”. Berikut perkembangan capaian IKU IKLH tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.



Gambar 4.9.
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa capaian IKLH di Kota Balikpapan dengan predikat cukup baik hal ini didasarkan atas nilai indeks kualitas lingkungan hidup berada pada rentang nilai antara $60 < \text{IKLH} \leq 70$ artinya IKLH Kota Balikpapan berpredikat **Cukup Baik**. Capaian hasil akuntabilitas kinerja IKLH pada tahun 2020 mengalami peningkatan indeks sebesar 3,10 dari capaian realisasi tahun 2019 sebesar 60,42. Berikut disajikan tabel Predikat Penilaian IKLH.



No	Predikat	Kisaran Nilai IKLH
1	Sangat Baik	IKLH > 80
2	Baik	$70 < \text{IKLH} \leq 80$
3	Cukup Baik	$60 < \text{IKLH} \leq 70$
4	Kurang Baik	$50 \leq \text{IKLH} \leq 60$
5	Sangat Kurang Baik	$40 \leq \text{IKLH} < 50$
6	Waspada	$30 \leq \text{IKLH} < 40$

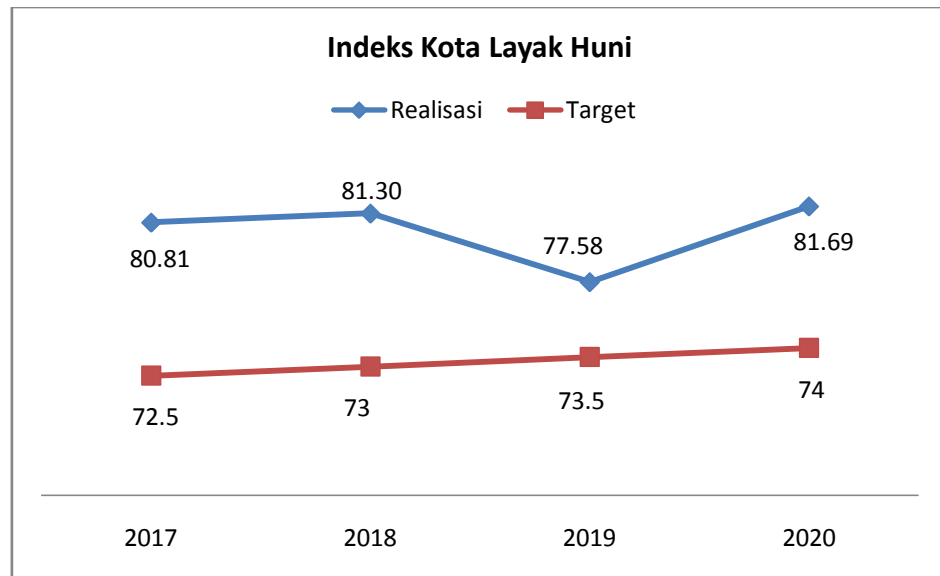
Sumber: IKLH 2018, Kemeterian Lingkungan Hidup

Peningkatan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tersebut menandakan kualitas lingkungan hidup tahun 2019 mengarah pada kondisi lingkungan hidup yang cukup baik.

Upaya dan tindaklanjut pemerintah kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2020 adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui perlindungan, pengawasan dan pengendalian lingkungan, mencegah pengupasan lahan, melakukan rehabilitasi lingkungan, sosialisasi peran serta masyarakat dan *stakeholder* dalam pembangunan lingkungan, pengembangan kawasan hijau dan kegiatan-kegiatan pendukung yang berorientasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

j. *Livable City Index (LCI)*

Target IKU *Livable City Index (LCI)* atau disebut Indeks Kota Layak Huni sebesar 74,00 sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai realisasi sebesar 81,69 dengan capaian kinerja 110,39% artinya Kinerja Wali Kota Balikpapan pada tahun 2020 “TERCAPAI”. Berikut perkembangan capaian IKU LCI tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.



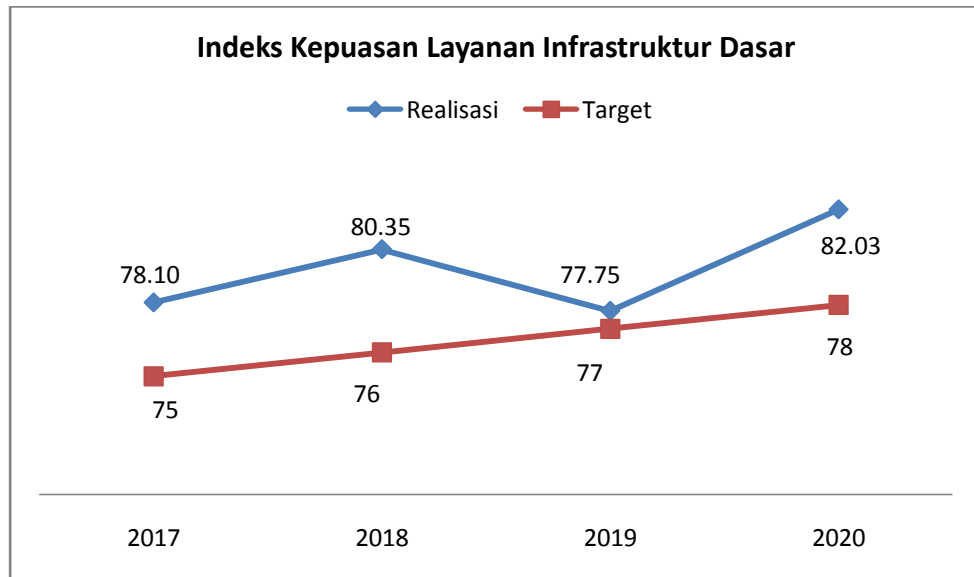
Gambar 4.10.
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama
Livable City Index Tahun 2020

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa berdasarkan hasil survey LCI pada tahun 2020 yang diukur dari pendapat warga kota tentang kota tempat mereka tinggal dari berbagai aspek seperti air bersih, pendidikan, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, penataan PKL, transportasi, dan pangan. Berdasarkan analisa dan pembahasan dari hasil survey diperoleh nilai indeks LCI sebesar 81,69. Berdasarkan capaian LCI tersebut menunjukkan adanya kepuasan dari responden yang disurvey berkaitan atas layanan atas air bersih, pendidikan, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, penataan PKL, transportasi, dan ketersediaan pangan. Berkenaan atas kepuasan respoden tersebut memberikan kesimpulan bahwa kota Balikpapan merupakan “Kota Layak Huni”. Capaian hasil akuntabilitas kinerja LCI pada tahun 2020 mengalami peningkatan indeks sebesar 3,72 dari capaian realisasi tahun 2019 sebesar 4,11.

Upaya dan tindaklanjut pemerintah kota Balikpapan terhadap penurunan capaian realisasi IKU *Livable City Index* pada tahun 2019 adalah melakukan peningkatan layanan peningkatan ekonomi masyarakat, layanan fasilitas kesehatan, layanan kebersihan kota, layanan ketersediaan akses jalan dan alat transportasi kota, dan layanan tata kelola kota.

k. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (IKLID)

Target IKU Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLID) sebesar 78,00 sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai realisasi sebesar 82,03 dengan capaian kinerja 105,17% artinya Kinerja Wali Kota Balikpapan pada tahun 2020 “TERCAPAI”. Berikut perkembangan capaian IKU IKLI tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.



Gambar 4.11.

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar Tahun 2020

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa berdasarkan hasil survey IKLI pada tahun 2020 yang diukur dari pendapat warga kota tentang Kepuasan Layanan Infrastruktur dari berbagai aspek seperti infrastruktur jalan, jembatan, moda transportasi, jaringan air bersih, irigasi dan perumahan. Berdasarkan analisa dan pembahasan dari hasil survey diperoleh nilai IKLI sebesar 82,03. Berdasarkan capaian IKLI tersebut menunjukkan adanya kepuasan dari sejumlah responden yang disurvei berkaitan layanan infrastruktur yang disiapkan pemerintah untuk masyarakat kota Balikpapan. Terkait dengan kepuasan responden terhadap layanan infrastruktur, dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan infrastuktur dinilai cukup baik. Capaian hasil akuntabilitas kinerja IKLI pada tahun 2020 mengalami



peningkatan indeks sebesar 4,28 dari capaian realisasi tahun 2019 sebesar 77,75.

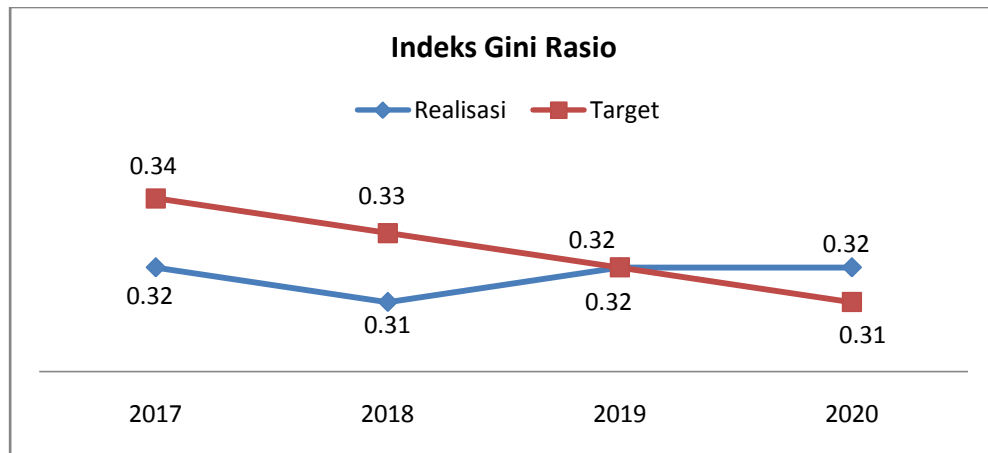
Capaian IKU Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil dalam memenuhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur di kota Balikpapan pada sektor infrastruktur yang meliputi :

1. Penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas;
2. Penyediaan transportasi (Darat dan ASDP, Laut, dan Udara);
3. Penyediaan infrastruktur air bersih;
4. Penyediaan infrastruktur Irigasi (pertanian dan air baku);
5. Penyediaan infrastruktur perumahan.

Upaya dan tindaklanjut pemerintah kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU IKLI pada tahun 2020 adalah meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan sektor infrastruktur melalui pembangunan jalan dan jembatan, pengelolaan dan penyediaan transportasi darat yang murah, layanan keamanan dan kenyamanan pengguna transportasi ASDP, Laut dan Udara, memperluas pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat, peningkatan prasarana irigasi untuk pertanian dan air baku serta menurunkan backlog perumahan.

I. Gini Ratio (GR)

Target IKU Gini Ratio (GR) sebesar 0,31 sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai realisasi sebesar 0,33 dengan capaian kinerja 96,88% artinya Kinerja Wali Kota Balikpapan pada tahun 2020 “HAMPIR TERCAPAI”. Berikut perkembangan capaian IKU Gini Ratio (GR) tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.



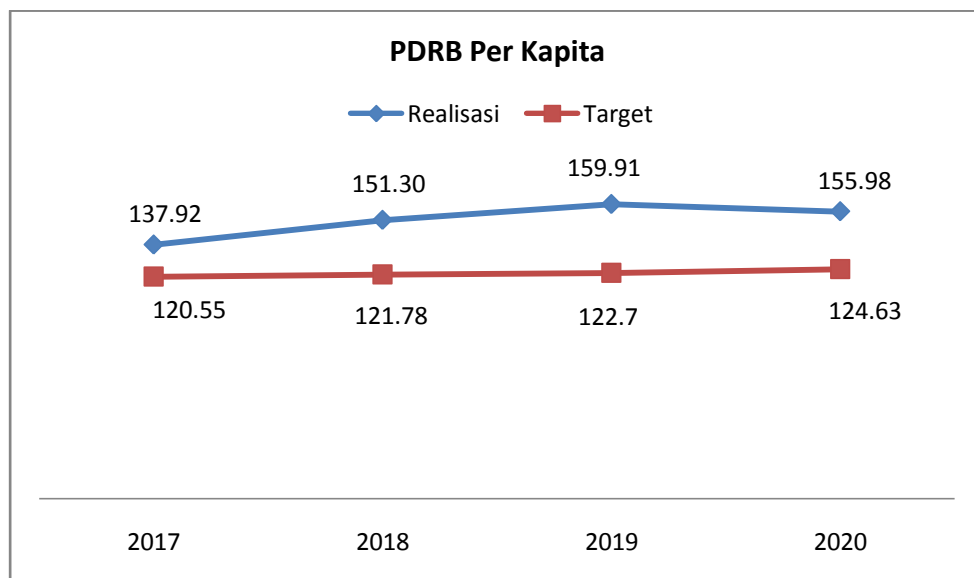
Gambar 4.12.
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama
Indeks Gini Ratio Tahun 2020

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa Indeks Gini pada Kota Balikpapan bertaraf rendah, artinya pertumbuhan ekonomi telah diikuti dengan pemerataan pendapatan. Hal ini didasarkan atas capaian hasil akuntabilitas indikator terhadap kinerja dimana Nilai *Gini Ratio* berkisar antara $0 < 0,32 \leq 1$, Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Terkait dengan nilai capaian 0,32 tersebut menunjukkan ketimpangan pada taraf rendah. Capaian hasil akuntabilitas kinerja GR pada tahun 2020 sama dengan capaian realisasi tahun 2019 sebesar 0,32. Upaya dan tindaklanjut pemerintah kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU *Gini Ratio* pada tahun 2019 adalah a) Meningkatkan pengendalian dan mengevaluasi tingkat kemiskinan; b) Efektifitas pendistribusian bantuan sosial; c) Menurunkan ketimpangan kekayaan. Selama ini, pendapatan pajak penghasilan masih didominasi oleh kalangan pekerja; d) Menciptakan lapangan kerja baru; dan e) Menciptakan wirausaha secara massal.

m. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

Target IKU Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita sebesar Rp.124,63 Juta sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai realisasi sebesar Rp. 155,98 Juta dengan capaian kinerja 125,15% artinya Kinerja Wali Kota Balikpapan pada tahun 2020 “TERCAPAI”. Berikut perkembangan capaian

IKU Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.



Gambar 4.13.

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Tahun 2020

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk Kota Balikpapan selama satu tahun sebesar Rp. 155,98 Juta, artinya tingkat kemakmuran di kota Balikpapan semakin meningkat. Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto Perkapita pada tahun 2020 melampaui dari target IKU, dipengaruhi adanya sejumlah kegiatan yang berskala nasional seperti pembangunan perluasan kilang minyak dan akses IKN, dan kegiatan-kegiatan, dan event berskala nasional dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Capaian hasil akuntabilitas kinerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita pada tahun 2019 mengalami penurunan sejumlah Rp. 3,93 juta dari capaian realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 159,91 juta.

Upaya dan tindaklanjut Pemerintah Kota Balikpapan yang berperan sebagai penyangga Ibu Kota Negara terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto Perkapita pada tahun 2020 adalah:

- a. Meningkatkan pengelolaan sektor perdagangan dan jasa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

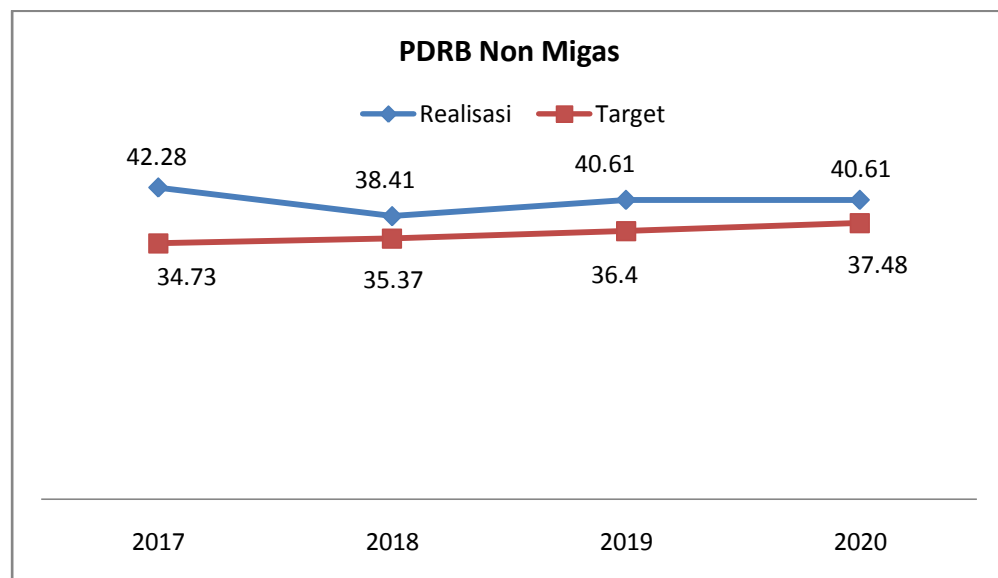


- b. Menumbuhkan usaha sentra industri mikro, kecil dan menengah.
- c. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan pendidikan sumber daya manusia baik formal maupun informal.
- d. Meningkatkan daya serap dan menumbuhkan lapangan pekerjaan untuk pencari kerja lokal.

n. Produk Domestik Regional Bruto Non Migas

Target IKU Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Non Migas sebesar Rp.37,48 Triliun sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai realisasi sebesar Rp. 40,61 Triliun (data 2019 sebagai pembandingan dikarenakan BPS secara nasional tidak menghitung lagi untuk PDRB Non Migas). Realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Non Migas antara target dan realisasi sebesar 108,35%.

Berdasarkan realisasi tersebut, bahwa Perjanjian Kinerja Wali Kota untuk IKU PDRB Non Migas pada tahun 2020 “TERCAPAI”. Adapun perkembangan realisasi capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Non Migas tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 4.14.
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama
Produk Domestik Regional Bruto Non Migas Tahun 2020



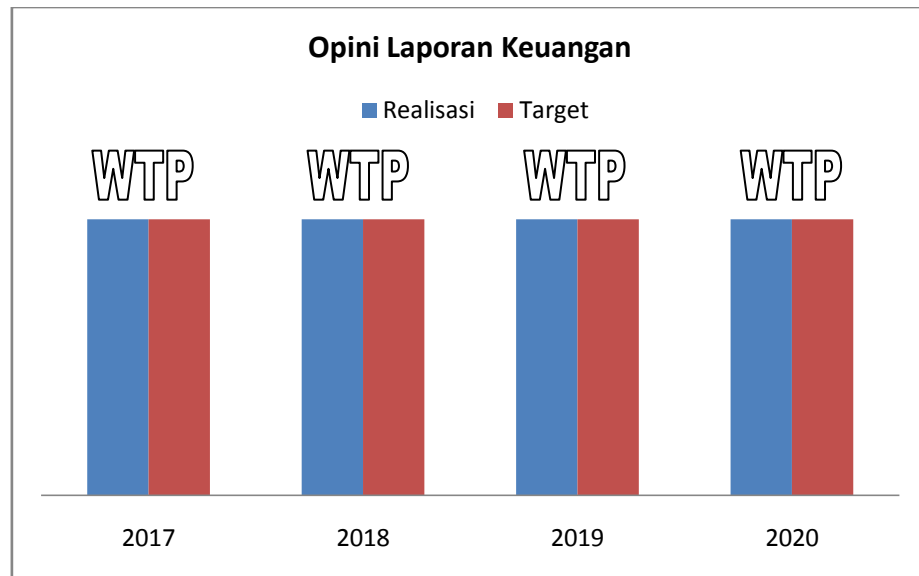
Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa terdapat penurunan PDRB non Migas yang dipengaruhi oleh sejumlah sektor lapangan usaha perdagangan dan jasa dikarenakan adanya dampak wabah Corona Wuhan di sejumlah negara yang memiliki orientasi hubungan perdagangan barang dan jasa dengan Indonesia. Efek dari wabah corona tersebut berpengaruh besar pada perekonomian nasional terutama pelemahaan ekspor barang dan jasa, pelemahan aktivitas produksi di tiongkok mempengaruhi impor barang dalam negeri sehingga berdampak terhadap konsumsi dalam negeri, dan terbatasnya aktivitas bisnis. Capaian hasil akuntabilitas kinerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita pada tahun 2019 mengalami penurunan sejumlah Rp. 2,2 triliun dari capaian realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 38,41 triliun.

Upaya dan tindak lanjut Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto Non Migas antara lain :

- a. Meningkatkan kinerja pada sektor pertanian dan kelautan untuk memberikan hasil produksi yang dapat dipasarkan baik pada pasar lokal maupun pasar diluar daerah kota Balikpapan.
- b. Meningkat kinerja pada sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor ekonomi lainnya guna memberikan sumber pendapatan.
- c. Mempercepat pengembangan kawasan industri kariatangau dan melakukan promosi untuk menarik investor menanamkan modalnya di kota Balikpapan.
- d. Pemberdayaan bagi UMKM untuk memberikan dukungannya dalam pembangunan industri kecil dan menengah.

o. Opini Laporan Keuangan (OLK)

Target IKU Opini Laporan Keuangan adalah dengan kategori “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai dengan kategori “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dengan capaian kinerja sebesar 100% artinya Kinerja Wali Kota Balikpapan pada tahun 2020 “TERCAPI”. Berikut perkembangan capaian IKU OLK tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.



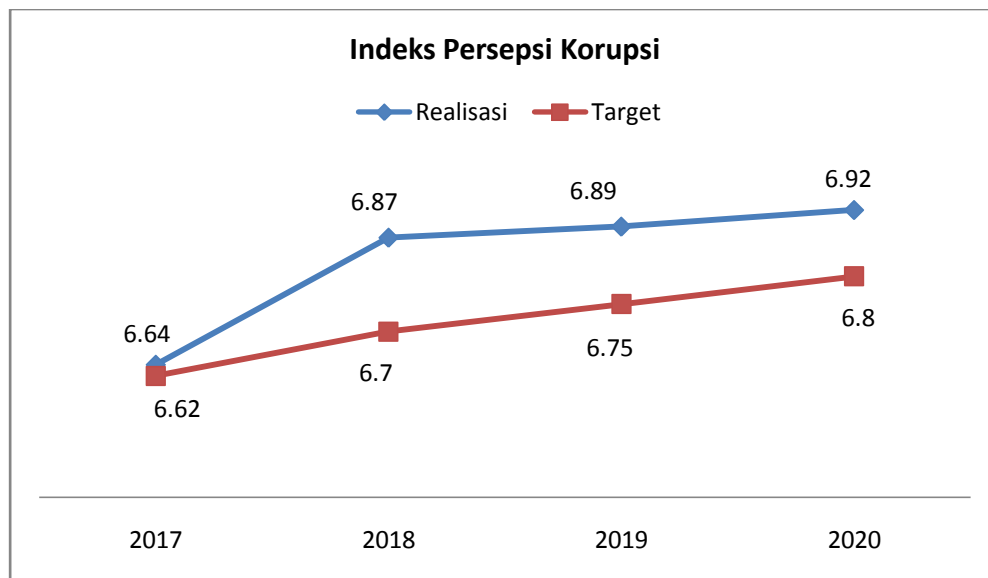
Gambar 4.15.
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama
Opini Laporan Keuangan Tahun 2020

Interpretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa tata kelola akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Balikpapan dinilai oleh BPK telah akuntabel, wajar, dan transparan hal ini menjadi dasar BPK memberikan opini dengan kategori WTP. Capaian hasil akuntabilitas Opini Laporan Keuangan pada tahun 2020 sama dengan capaian 2019 yaitu WTP.

Upaya dan tidak lanjut mempertahankan opini tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen dalam membangun reformasi birokrasi secara baik dan melaksanakan budaya kerja dengan berorientasi pada akuntabilitas hasil terhadap kinerja dengan berpedoman pada RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan .

p. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Target IKU Indeks Persepsi Korupsi (IPK) adalah 6,80 sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai 6,92 dengan capaian kinerja 100,29% artinya Kinerja Wali Kota Balikpapan pada tahun 2020 “TERCAPAI”. Berikut perkembangan capaian IKU IPK tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.

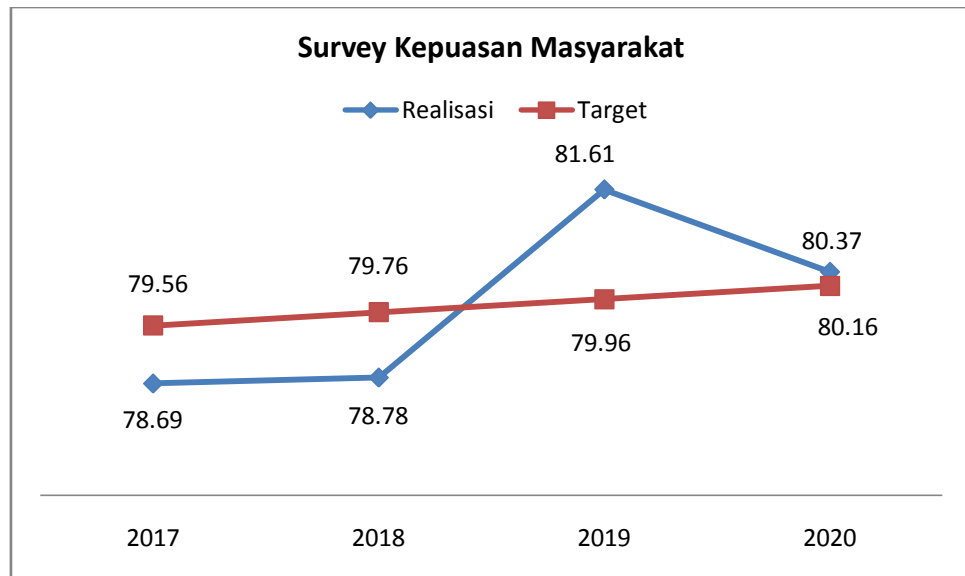


Gambar 4.16.
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama
Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2019

Capaian hasil akuntabilitas Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2020 mengalami peningkatan indeks sebesar 0,03 dari capaian 2019 yaitu 6,89. Upaya pemerintah kota Balikpapan telah berhasil untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

q. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Target IKU Survei Kepuasan Masyarakat adalah 80,16% sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai hasil IKM sebesar 80,37% dengan capaian kinerja 101,76% artinya Kinerja Wali Kota Balikpapan pada tahun 2020 “TERCAPAI”. Berikut perkembangan capaian IKU SKM tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.



Gambar 4.17
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama
Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2020

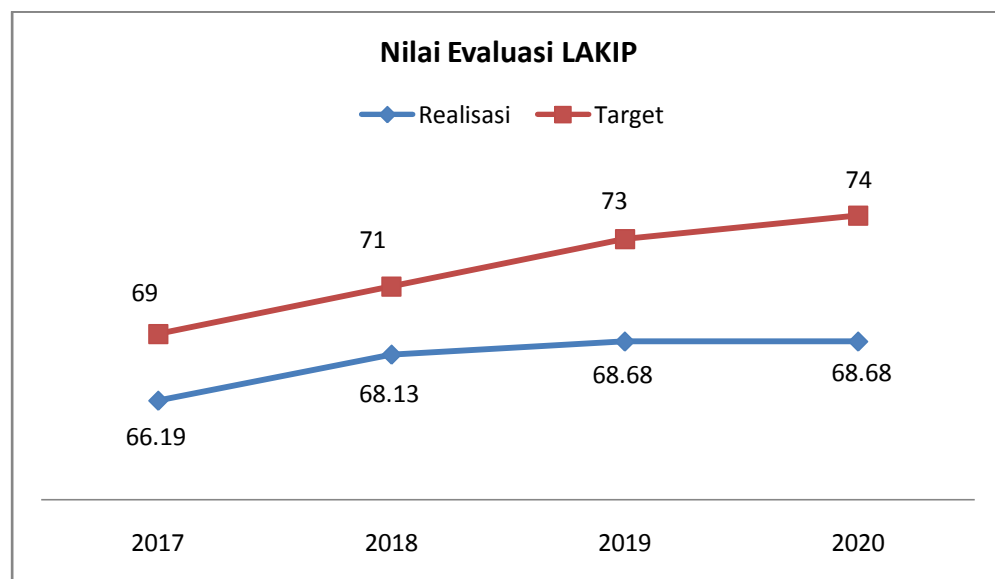
Interpretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukkan bahwa berdasarkan hasil survey terhadap layanan pada masyarakat Kota Balikpapan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan mencapai 80,37. Capaian ini merupakan gambaran dari hasil konkrit Pemerintah Kota Balikpapan bersama jajaran perangkat daerah dalam memberikan layanan fasilitas umum yang prima bagi masyarakat sebagai implementasi PERMENPANRB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Capaian hasil akuntabilitas SKM pada tahun 2020 mengalami penurunan indeks sebesar 1,24 dari capaian 2019 yaitu 81,61. Penurunan SKM disebabkan adanya pandemi covid 19 yang melanda kota Balikpapan sehingga secara langsung memberikan pengaruh terhadap layanan publik.

Upaya dan tindak lanjut Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan fasilitas umum di tekankan pengendalian dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima yang kurang tepat menempatkan dagangannya pada setiap kawasan pasar di Kota Balikpapan. Selain itu melakukan rehabilitas fasilitas lapak dagang dan

meningkatkan tipe pasar tradisional serta pengelolaan lahan parkir pada pasar.

r. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)

Target IKU Evaluasi AKIP adalah 74,00 dengan BB sampai dengan akhir tahun 2019 tercapai 68,68 dengan predikat B (data 2019 sebagai pembandingan dikarenakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum memberikan nilai hasil evaluasi AKIP kepada Pemerintah Kota Balikpapan) dengan capaian kinerja 92,81% artinya Kinerja Wali Kota Balikpapan pada tahun 2020 “HAMPIR TERCAPAI”. Berikut perkembangan capaian IKU AKIP tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.

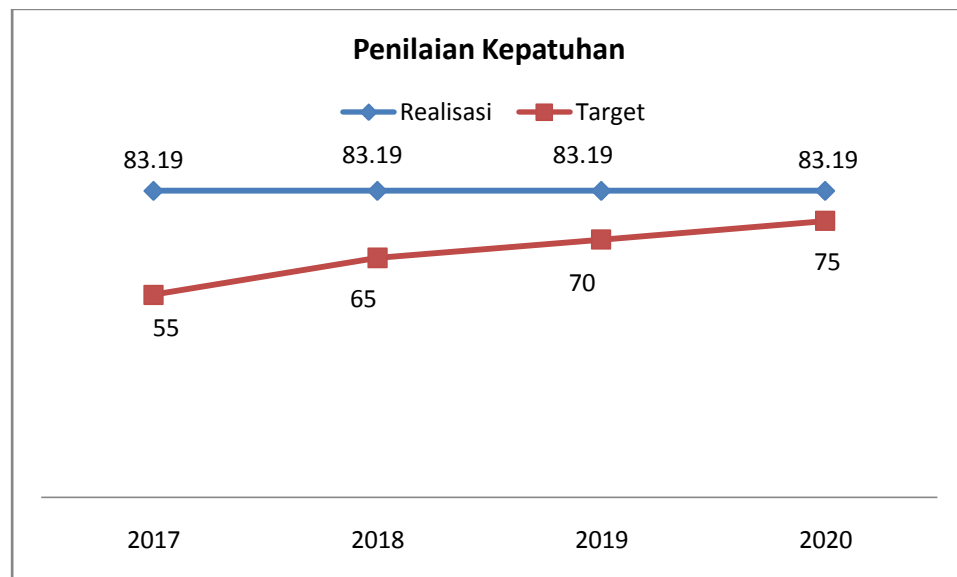


Gambar 4.18
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama
Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2020

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukan bahwa tidak tercapainya target AKIP menunjukan bahwa upaya Pemerintah Kota Balikpapan belum berhasil untuk mengimplementasikan rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

s. Penilaian Kepatuhan

Target IKU Penilaian Kepatuhan adalah 75 sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai 83,19 (zona hijau) dengan capaian kinerja 110,92% artinya Kinerja Wali Kota Balikpapan pada tahun 2020 “TERCAPAI”. Berikut perkembangan capaian IKU Penilaian Kepatuhan tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.



Gambar 4.19
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama
Penilaian Kepatuhan Tahun 2020

Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukan bahwa Penilaian Kepatuhan didasarkan oleh hasil evaluasi pelayanan publik, untuk kriteria nilai kepatuhan dibagi dalam 3 (tiga) zonasi pewarnaan yaitu warna hijau (Kepatuhan Tinggi), warna kuning (Kepatuhan Sedang) dan warna merah (Kepatuhan Rendah). Terkait dengan nilai capaian IKU Penilaian Kepatuhan sebesar 83,19 diartikan bahwa dari hasil evaluasi pelayan publik oleh ombudsmen RI untuk 10 (sepuluh) perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dinyatakan masuk dalam kriteria zonasi warna hijau didasarkan atas nilai capaian rata-rata hitung terhadap layanan yang diberikan oleh perangkat daerah. Capaian hasil akuntabilitas



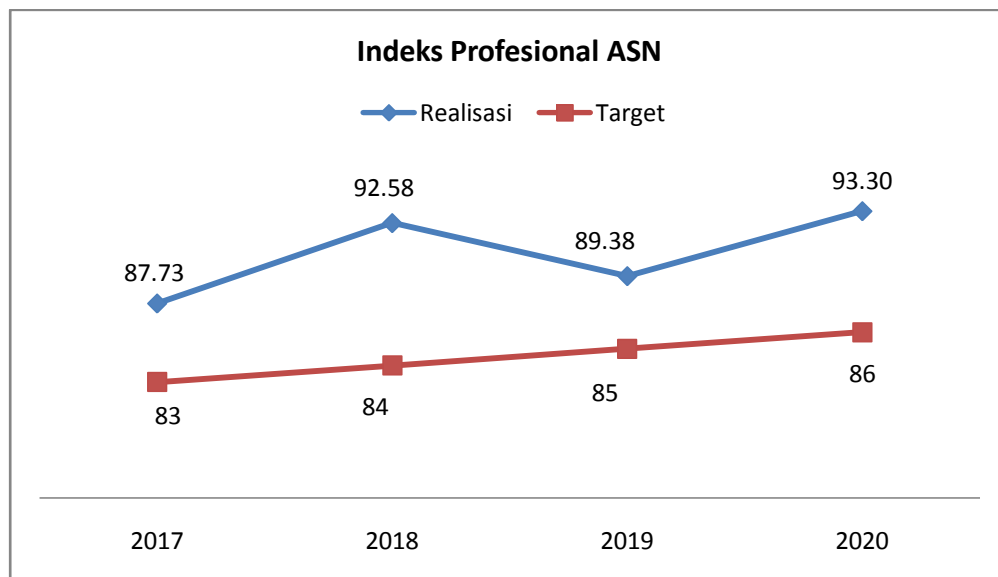
Penilaian Kepatuhan pada tahun 2020 sama dengan capaian 2019 yaitu 83,19.

Upaya dan tindak lanjut terhadap capaian kinerja dari Penilaian Kepatuhan tersebut adalah:

- Meningkatkan layanan publik yang prima sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan pada perangkat daerah.
- Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap sejumlah layanan publik di tiap-tiap perangkat daerah yang dinilai oleh masyarakat masih kurang dalam pelayanan serta adanya unsur gratifikasi dari layanan yang diberikan.
- Mengembangkan rencana aksi yang memberikan dukungan dan nilai tambah terhadap layanan publik.

t. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN)

Target IKU Indeks Profesionalitas ASN adalah 86 sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai 93,30 dengan capaian kinerja 108,49% artinya Kinerja Wali Kota Balikpapan pada tahun 2020 “TERCAPAI”. Berikut perkembangan capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN tahun 2017-2020 selama periode pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.



Gambar 4.20
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama
IKU Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020



Intepretasi Hasil Akuntabilitas terhadap Kinerja menunjukan bahwa hal ini menggambarkan bahwa ASN telah terdistribusi berdasarkan jumlah/proporsi ASN dengan tingkat pendidikan tertentu pada organisasi perangkat daerah serta terjaminnya keselarasan *job description* dengan latar belakang pendidikan ASN per Perangkat Daerah. Pada tahun 2020 Indeks Profesionalitas ASN Kota Balikpapan meningkat sebesar 3,92 dari capaian kinerja tahun 2019 sebesar 89,39.

Upaya dan tindak lanjut terhadap capaian kinerja dari tingkat profesionalitas ASN adalah:

- a. Mengoptimalkan kinerja dan disiplin pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan secara berkelanjutan.
- b. Memberikan reward atas pencapaian kinerja profesionalitas ASN.
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara komprehensif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi ASN disetiap perangkat daerah guna menjamin terbentuknya ASN yang lebih professional dalam menjalank tugas dan pelayanan bagi masyarakat.

2.2.2. Analisis Capaian Perbandingan Realisasi IKU Kota Balikpapan Sampai Dengan Tahun 2020 Terhadap Target Capaian Akhir IKU RPJMD 2016-2021 Kota Balikpapan.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pencapaian target IKU sampai dengan tahun 2020 yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Wali Kota Balikpapan berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan analisis serta review sebagai evaluasi terhadap capaian realisasi dari 20 IKU tersebut. Adapun capaian realisasi IKU Kota Balikpapan sampai dengan tahun 2020 terdeskripsi pada tabel sebagai berikut.



Tabel 3.4

Realisasi Capaian IKU sampai dengan 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Akhir IKU RPJMD 2016-2021	Realisasi IKU Tahun 2020	Selisih Target Akhir IKU terhadap Realisasi IKU Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)	Hasil Pelaksanaan IKU Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD
1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10.53	10.68	0.15	101.42	Tercapai
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15.73	14.14	-1.59	89.89	Cukup Tercapai
3	Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74.04	74.49	0.45	100.61	Tercapai
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4.55	9.00	4.45	50.56	Tidak Tercapai
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	64.92	62.90	-2.02	96.89	Hampir Tercapai
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka Indeks	79.53	80.01	0.48	100.60	Tercapai
7	Tingkat Kemiskinan (TKm)	Persen	2.3	2.57	0.27	89.49	Cukup Tercapai
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka Indeks	92	89.65	-2.35	97.45	Hampir Tercapai
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka Indeks	60.64	63.52	2.88	104.75	Tercapai
10	<i>Livable City Index (LCI)</i>	Angka Indeks	74.5	81.69	7.19	109.65	Tercapai
11	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (IKLI)	Angka Indeks	79	82.03	3.03	103.84	Tercapai
12	Indeks Gini Ratio (GR)	Angka Indeks	0.30	0.32	0.02	93.75	Hampir Tercapai
13	PDRB perkapita	Rp. (Juta)	126.64	155.98	29.34	123.17	Tercapai
14	PDRB non migas	Rp. (Triliun)	38.62	40.61	1.99	105.15	Tercapai



No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Akhir IKU RPJMD 2016-2021	Realisasi IKU Tahun 2020	Selisih Target Akhir IKU terhadap Realisasi IKU Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)	Hasil Pelaksanaan IKU Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD
15	Opini laporan keuangan (OLK)	Kategori	WTP	WTP	0.00	100.00	Tercapai
16	Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	Nilai Kriteria	6.9	6.92	0.02	100.29	Tercapai
17	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Skor	80.36	80.37	0.01	100.01	Tercapai
18	Nilai Evaluasi LAKIP	Predikat	75	68.68	-6.32	91.57	Hampir Tercapai
19	Penilaian Kepatuhan	Angka Indeks	79	83.19	4.19	105.30	Tercapai
20	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Angka Indeks	87	93.30	6.30	107.24	Tercapai

Sumber : Hasil pengolahan data LKJIP, Bappeda Litbang 2020

Berdasarkan tabel realisasi IKU Kota Balikpapan tersebut, analisis perbandingan capaian realisasi IKU sampai dengan tahun 2020 terhadap target capaian akhir IKU RPJMD 2016-2021 Kota Balikpapan terdeskripsi untuk masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Capaian IKU Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terhadap target akhir RPJMD

Target akhir IKU RLS pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah 10,53 tahun. Berdasarkan realisasi IKU RLS sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 10,68. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD telah tercapai atau pencapaian IKU RLS melampaui sebesar 0,15 tahun.

Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 101,42%, capaian tersebut sampai tahun 2020 dapat diartikan **TUNTAS “Nilai Akuntabilitas IKU RLS melampaui Target Kinerja RPJMD”**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :



Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil memenuhi target akhir RPJMD untuk IKU RLS sebesar 10,53 tahun. Sedangkan ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU RLS sebesar 10,43 tahun mengalami peningkatan kinerja sebesar 0,25 tahun sampai dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan waktu tempuh pendidikan masyarakat Kota Balikpapan dari kelas X menjadi kelas XI. Langkah selanjutnya Pemerintah Kota Balikpapan adalah mempertahankan capaian tersebut dalam sisa waktu RPJMD pada tahun 2020 dan 2021.

2. Capaian indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) terhadap target akhir RPJMD

Target akhir IKU Harapan Lama Sekolah (HLS) pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah 15,73. Berdasarkan realisasi IKU HLS sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 14,14. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD hampir tercapai atau pencapaian IKU HLS kurang sebesar 1,59 tahun.

Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 89,89, capaian tersebut sampai tahun 2020 dapat diartikan **BELUM TUNTAS “Nilai Akuntabilitas IKU HLS Kurang dari Target Kinerja RPJMD”**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan perlu meningkatkan tingkat capaian kinerja sebesar 10,17% untuk mencapai 100% target akhir RPJMD pada IKU HLS sebesar 14,14 tahun. Sedangkan ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU HLS sebesar 13,73 tahun mengalami peningkatan kinerja sebesar 0,41 tahun sampai dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan peluang sekolah bagi masyarakat Kota Balikpapan dari tingkat Diploma II menjadi Diploma III. Langkah selanjutnya Pemerintah Kota Balikpapan harus mampu meningkatkan capaian tersebut dalam sisa waktu RPJMD pada tahun 2020 dan 2021.



3. Capaian indikator Angka Harapan Hidup (AHH) terhadap target akhir RPJMD

Target akhir IKU Angka Harapan Hidup (AHH) pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah 74,04. Berdasarkan realisasi IKU AHH sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 74,49. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD telah tercapai atau pencapaian IKU AHH lebih melampaui sebesar 0,45 tahun.

Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 100,61%, capaian tersebut sampai tahun 2020 dapat diartikan **TUNTAS “Nilai Akuntabilitas IKU AHH melampaui Target Kinerja RPJMD”**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil memenuhi dan melampaui sebesar 0,50% terhadap target akhir RPJMD. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU AHH sebesar 73,95 tahun mengalami peningkatan kinerja sebesar 0,54 tahun sampai dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan harapan hidup bagi bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2020 (periode 2015-2017) di Kota Balikpapan dari 74 tahun menjadi 75 tahun.

4. Capaian indikator Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap target akhir RPJMD

Target akhir IKU Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah 4,55%. Berdasarkan realisasi IKU TPT sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 9,00%. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD belum tercapai atau pencapaian IKU TPT kurang sebesar 4,45 %.

Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 50,56%, capaian tersebut sampai tahun 2020 dapat diartikan **BELUM TUNTAS “Nilai Akuntabilitas IKU TPT Kurang dari Target Kinerja RPJMD”**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :



Pemerintah Kota Balikpapan perlu meningkatkan tingkat capaian kinerja sebesar 49,44% untuk mencapai 100% target akhir RPJMD. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU TPT sebesar 5,95% mengalami penurunan kinerja sebesar 3,05% sampai dengan tahun 2020.

5. Capaian indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap target akhir RPJMD

Target akhir IKU Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah 64,92%. Berdasarkan realisasi IKU TPAK sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 62,90%. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD hampir tercapai atau pencapaian IKU TPAK kurang sebesar 2,02%.

Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 96,89%, capaian tersebut sampai tahun 2020 dapat diartikan **BELUM TUNTAS “Nilai Akuntabilitas IKU TPAK Kurang dari Target Kinerja RPJMD”**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan perlu meningkatkan tingkat capaian kinerja sebesar 3,11% untuk mencapai 100% target akhir RPJMD. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU TPAK sebesar 62,50% mengalami peningkatan kinerja sebesar 0,40% sampai dengan tahun 2020.

6. Capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap target akhir RPJMD

Target akhir IKU Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah 79,53. Berdasarkan realisasi IKU IPM sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 80,01. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD telah tercapai atau pencapaian IKU IPM dengan nilai indeks melebihi/melampaui sebesar 0,48. Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 100,60%, capaian tersebut dapat diartikan **TUNTAS “Nilai Akuntabilitas IKU IPM melampaui Target Kinerja RPJMD”**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :



Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil memenuhi dan melampaui sebesar 0,60% terhadap target akhir RPJMD. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU IPM sebesar 78,18 mengalami peningkatan kinerja sebesar 1,83 sampai dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja indikator IPM yang meliputi Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah (indikator pengungkit dimensi pendidikan), Angka Harapan Hidup (indikator pengungkit dimensi kesehatan) dan Pengeluaran per Kapita (indikator pengungkit dimensi pendapatan).

7. Capaian indikator Tingkat Kemiskinan (TKm) terhadap target akhir RPJMD

Target akhir IKU Tingkat Kemiskinan (TKm) pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah 2,30%. Berdasarkan realisasi TKm sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 2,57%. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD kurang tercapai sebesar 0,27%.

Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 89,49%, capaian tersebut sampai tahun 2020 dapat diartikan **BELUM TUNTAS “Nilai Akuntabilitas IKU TKm Kurang dari Target Kinerja RPJMD”**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan perlu meningkatkan tingkat capaian kinerja sebesar 10,51% untuk mencapai 100% target akhir RPJMD. Sedangkan ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU TKm sebesar 2,35% mengalami penurunan kinerja sebesar 0,22% sampai dengan tahun 2020.

8. Capaian indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) terhadap target akhir RPJMD

Target akhir IKU Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah 92,00. Berdasarkan realisasi IKU IPG sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 89,65. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD kurang tercapai sebesar 2,35%.

Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 97,45%,



capaian tersebut sampai tahun 2020 dapat diartikan **BELUM TUNTAS “Nilai Akuntabilitas IKU IPG Kurang dari Target Kinerja RPJMD”**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan perlu meningkatkan tingkat capaian kinerja sebesar 2,55% untuk mencapai 100% target akhir RPJMD. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU IPG sebesar 89,97 mengalami penurunan kinerja sebesar 0,32 sampai dengan tahun 2020.

9. Capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terhadap target akhir RPJMD

Target akhir IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah 60,64. Berdasarkan realisasi IKU IKLH sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 63,52. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD melampaui sebesar 2,06.

Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 104,75%, capaian tersebut sampai tahun 2020 dapat diartikan **TUNTAS “Nilai Akuntabilitas IKU IKLH Melampaui dari Target Kinerja RPJMD”**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil memenuhi dan melampaui sebesar 4,75% terhadap target akhir RPJMD. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU IKLH sebesar 58,58 mengalami peningkatan kinerja sebesar 4,94 sampai dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Balikpapan.

10. Capaian indikator Livable City Index terhadap target akhir RPJMD

Target akhir IKU Livable City Index (LCI) pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah 74,50. Berdasarkan realisasi IKU LCI sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 81,69. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD melampaui sebesar 7,19.

Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 109,65%, capaian tersebut sampai tahun 2020 dapat diartikan **TUNTAS “Nilai**



Akuntabilitas IKU LCI melampaui Target Kinerja RPJMD". Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil memenuhi dan melampaui sebesar 9,65% terhadap target akhir RPJMD. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU LCI sebesar 71,12 mengalami peningkatan kinerja sebesar 10,57 sampai dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik dan aspek non-fisik baik untuk masyarakat Kota Balikpapan.

11. Capaian indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (IKLID) terhadap target akhir RPJMD

Target akhir IKU Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (IKLID) pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah 79,00. Berdasarkan realisasi IKU IKLID sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 82,03. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD melampaui sebesar 3,03.

Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 103,84%, capaian tersebut sampai tahun 2020 dapat diartikan **TUNTAS "Nilai Akuntabilitas IKU IKLID melampaui dari Target Kinerja RPJMD"**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil memenuhi dan melampaui sebesar 3,84% terhadap target akhir RPJMD. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU IKLID sebesar 73,40 mengalami peningkatan kinerja sebesar 8,63 sampai dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap layanan infrastruktur dasar di Kota Balikpapan.

12. Capaian indikator Gini Ratio (GR) terhadap target akhir RPJMD



Target akhir Gini Ratio (GR) pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah 0,30. Berdasarkan realisasi IKU GR sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 0,32. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD kurang sebesar 0,02.

Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 93,75%, capaian tersebut sampai tahun 2020 dapat diartikan **BELUM TUNTAS “Nilai Akuntabilitas IKU GR Kurang dari Target Kinerja RPJMD”**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan perlu meningkatkan tingkat capaian kinerja sebesar 6,25% untuk mencapai 100% target akhir RPJMD pada IKU GR sebesar 0,30. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU Gini Ratio (GR) sebesar 0,34 mengalami peningkatan kinerja sebesar 0,02 sampai dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat di Kota Balikpapan.

13. Capaian indikator PDRB Perkapita terhadap target akhir RPJMD

Target akhir IKU PDRB Perkapita pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah Rp. 126,64 Juta. Berdasarkan realisasi IKU PDRB Perkapita sampai dengan tahun 2020 telah mencapai Rp. 155,98 Juta. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD melebihi sejumlah Rp. 29,34 Juta.

Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 123,17%, capaian tersebut sampai tahun 2020 dapat diartikan **TUNTAS “Nilai Akuntabilitas IKU PDRB Perkapita melampaui Target Kinerja RPJMD”**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil memenuhi dan melampaui sebesar 23,17% terhadap target akhir RPJMD. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU PDRB Perkapita sejumlah Rp. 120,32 Juta mengalami peningkatan kinerja sejumlah Rp. 35,66 Juta sampai dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama



perangkat daerah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Kota Balikpapan.

14. Capaian indikator PDRB Non Migas terhadap target akhir RPJMD

Target akhir IKU PDRB Non Migas pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah Rp. 38,62 Triliun. Berdasarkan realisasi IKU PDRB Non Migas sampai dengan tahun 2020 telah mencapai Rp. 40,61 Triliun. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD melebihi sejumlah Rp.1,99 Triliun.

Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2019 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 105,15%, capaian tersebut sampai tahun 2019 dapat diartikan **TUNTAS “Nilai Akuntabilitas IKU PDRB Non Migas melampaui Target Kinerja RPJMD”**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil memenuhi dan melampaui sebesar 5,15% terhadap target akhir. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU PDRB Non Migas sejumlah Rp. 33,39 Triliun mengalami peningkatan kinerja sejumlah Rp. 7,22 Triliun sampai dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Kota Balikpapan yang bersumber dari non migas.

15. Capaian indikator Opini Laporan Keuangan terhadap target akhir RPJMD

Target akhir IKU Opini Laporan Keuangan (OLK) pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan dengan predikat adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan realisasi IKU OLK sampai dengan tahun 2020 dengan predikat adalah WTP. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD adalah 100%. Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 105,15%, capaian tersebut sampai tahun 2020 dapat diartikan **TUNTAS “Nilai Akuntabilitas IKU OLK Tercapai atas Target Kinerja RPJMD”**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil memenuhi target akhir RPJMD untuk IKU OLK dengan predikat WTP. Ditinjau dari baseline pada



tahun 2015 capaian IKU OLK sama dengan capaian sampai dengan tahun 2020 untuk IKU OLK adalah WTP. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah mampu mempertahankan predikat tata kelola keuangan dalam rangka mewujudkan good governance (Kepemerintahan yang Baik) di Kota Balikpapan.

16. Capaian indikator Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terhadap target akhir RPJMD

Target akhir IKU Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah 6,90. Berdasarkan realisasi IKU IPK sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 6,92. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD kurang sebesar 0,02.

Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 100,29%, capaian tersebut sampai tahun 2020 dapat diartikan **TUNTAS “Nilai Akuntabilitas IKU IPK Melampaui dari Target Kinerja RPJMD”**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil memenuhi dan melampaui sebesar 0,29% terhadap target akhir. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 6,62 mengalami peningkatan kinerja sebesar 0,30 sampai dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan didasarkan atas survei persepsi masyarakat di Kota Balikpapan.

17. Capaian indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap target akhir RPJMD

Target akhir IKU Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah 80,36. Berdasarkan realisasi IKU SKM sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 80,37. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD melampaui sebesar 0,01.

Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 101,01%, capaian tersebut sampai tahun 2020 dapat diartikan **TUNTAS “Nilai**



Akuntabilitas IKU SKM melampaui Target Kinerja RPJMD". Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil memenuhi dan melampaui sebesar 0,01% terhadap target akhir RPJMD. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU SKM sebesar 79,36 mengalami peningkatan kinerja sejumlah 1,01 sampai dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap layanan public yang diberikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan yang terdiri atas layanan kelurahan, layanan puskesmas, layanan pasar, layanan perijinan, dan layanan kependudukan.

18. Capaian indikator Nilai Evaluasi AKIP terhadap target akhir RPJMD

Target akhir IKU Nilai Evaluasi AKIP pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah 75 dengan predikat BB. Berdasarkan realisasi IKU Nilai Evaluasi AKIP sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 68,68. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD kurang sebesar 6,32.

Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 91,57%, capaian tersebut sampai tahun 2020 dapat diartikan **BELUM TUNTAS "Nilai Akuntabilitas IKU Nilai Evaluasi LAKIP Kurang dari Target Kinerja RPJMD"**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan perlu meningkatkan tingkat capaian kinerja sebesar 8,43% untuk mencapai 100% target akhir RPJMD pada IKU Nilai Evaluasi LAKIP sebesar 75,00. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU Nilai Evaluasi LAKIP sebesar 6,62 mengalami peningkatan kinerja sebesar 0,27 sampai dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan didasarkan atas survei persepsi masyarakat di Kota Balikpapan.

19. Capaian indikator Penilaian Kepatuhan terhadap target akhir RPJMD

Target akhir IKU Penilaian Kepatuhan (Ombudsman RI) pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah 79,00. Berdasarkan realisasi



IKU Penilaian Kepatuhan sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 83,19. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD melampaui sebesar 4,19.

Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 105,30%, capaian tersebut sampai tahun 2020 dapat diartikan **TUNTAS “Nilai Akuntabilitas IKU Penilaian Kepatuhan melampaui Target Kinerja RPJMD”**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil memenuhi dan melampaui sebesar 5,30% terhadap target akhir RPJMD. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU Penilaian Kepatuhan sebesar 50 mengalami peningkatan kinerja sebesar 33,19 sampai dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan didasarkan atas survei persepsi masyarakat di Kota Balikpapan.

20. Capaian indikator Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IPASN) terhadap target akhir RPJMD

Target akhir IKU Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IPASN) pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan adalah 87. Berdasarkan realisasi IKU IPASN sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 89,39. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD melampaui sebesar 4,19.

Berdasarkan pengukuran perbandingan antara realisasi IKU tahun 2020 terhadap target akhir IKU RPJMD dihasilkan tingkat capaian IKU sebesar 105,30%, capaian tersebut sampai tahun 2020 dapat diartikan **TUNTAS “Nilai Akuntabilitas IKU IPASN melampaui Target Kinerja RPJMD”**. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa :

Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil memenuhi dan melampaui sebesar 6,30% terhadap target akhir RPJMD. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU IPASN sebesar 82 mengalami peningkatan kinerja sebesar 11,30 sampai dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan

transparansi tata kelola pemerintahan didasarkan atas survei persepsi masyarakat di Kota Balikpapan.

2.2.3. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Berdasarkan hasil pelaksanaa program yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja diperoleh capaian kinerja pada 171 program yang tertaung pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.5.

Capaian Pelaksanaan Program Yang Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
PROGRAM PRIORITAS					
1	Program Peningkatan Kualitas Manajemen Karir Aparatur Sipil Negara	18.18	14.83	81.57%	Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	93.15	74.59	80.08%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Program Sarana dan Prasarana Logistik	87.5	45.40	51.89%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	75	0.00	0.00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100	100	100.00%	Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, RSKB Sayang Ibu
6	Program Penelitian dan Pengembangan	100	100	100.00%	Bappeda Litbang
7	Program Penataan Administrasi Kependudukan	4	3.52	88.00%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			68.27%	Dinas Kesehatan
	Prevelensi HIV dan AIDS (%)	1	0.43	43.00%	Dinas Kesehatan
	Menurunnya Angka Kejadian DBD (Per 100.000)	250	112.46	44.98%	Dinas Kesehatan



NO	PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
	Menurunnya Prevelensi TBC (Per 100.000)	135	123.9	91.78%	Dinas Kesehatan
9	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	100	93.3	93.30%	Dinas Kesehatan
10	Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Kesehatan	5	5	100.00%	Dinas Kesehatan
11	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	0.01	0.01	100.00%	Dinas Kesehatan
12	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	95	49.21	51.80%	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Program Penataan Struktur Industri	2	0	0.00%	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
14	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	0.10	0.10	100.00%	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
15	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi	0.66	0.66	100.00%	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	0.10	0.10	100.00%	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
17	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	2.00	2.00	100.00%	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	60.00	60.00	100.00%	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
19	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	0.50	0.50	100.00%	Dinas Lingkungan Hidup
20	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	0.50	0.50	100.00%	Dinas Lingkungan Hidup
21	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	20.00	20.00	100.00%	Dinas Lingkungan Hidup
22	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	0.50	0.50	100.00%	Dinas Lingkungan Hidup



NO	PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
23	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian	2.00	2.00	100.00%	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
24	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	2,637.35	4,621.00	175.21%	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
25	Program Peningkatan Produksi Perikanan	425.50	-1,700.87	-399.73%	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
26	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	329.75	-688.76	-208.87%	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
27	Program Peningkatan Produksi Pertanian	1,300.00	170.21	13.09%	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
28	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			49.42%	Dinas Pekerjaan Umum
	Jembatan penyeberangan Orang (JPO) yang tersedia (unit)	0.00	0.0	0.00%	
	Indeks Aksesibilitas (satuan indeks)	1,478	1,461	98.85%	
29	Program Pembangunan Pedestrian Kota	28.61	14.52	50.75%	Dinas Pekerjaan Umum
30	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	46.92	50.09	106.76%	Dinas Pekerjaan Umum
31	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah			6633.33%	Dinas Pekerjaan Umum
	Cakupan Layanan Air Minum/Air Bersih (Persentase)	0.60	79.60	13266.67%	
	Cakupan Layanan Air Limbah (Persentase)	1.00	0.00	0.00%	
32	Program pengendalian banjir	40.00	26.00	65.00%	Dinas Pekerjaan Umum
33	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah	3.73	0.00	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum
34	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	80.64	91.67	113.68%	Dinas Pekerjaan Umum
35	Program Keluarga Berencana	26.76	26.29	98.24%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



NO	PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
36	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	60.02	72.86	121.39%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
37	Program pengembangan bahan informasi tentang Perlindungan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	85.65	82.75	96.61%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
38	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling (Kesehatan Reproduksi Remaja) KRR	0.66	0.46	69.70%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
39	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	84.00	89.71	106.80%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
40	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	36.00	0.00	0.00%	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
41	Program Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata	1.00	1.00	100.00%	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
42	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2.00	2.00	100.00%	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
43	Program Pengembangan Kemitraan	1.00	1.00	100.00%	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
44	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2,439,740.00	1,500,233.00	61.49%	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
45	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	48.00	25.00	52.08%	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
46	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	0.01	0.12	1200.00%	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
47	Program Pelestarian Benda Cagar Budaya	3.00	19.80	660.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
48	Program Pendidikan Anak Usia Dini			124.08%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	APK PAUD/TK/Sederajat (Persen)	4.35	3.71	85.29%	



NO	PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah PAUD/TK (%)	0.42	0.68	162.86%	
49	Program Pendidikan Dasar			166.62%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	SD/MI/Sederajat)IPTEK (Persen)	0.20	1.134	561.39%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	SD/MI/Sederajat (IMTAQ) (Persen)	8.48	8.476	100.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	APS SD/MI (Persen)	1.00	0.82	82.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	APM SD/MI (Persen)	0.86	0.699	81.28%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	APK SD/MI (Persen)	0.05	0.047	94.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Putus Sekolah (Persen)	0.00	0.006	150.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (Persen)	20.00	21.19	105.95%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mts (Persen)	1.19	1.161	97.56%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rasio Ketersediaan sekolah /Penduduk usia sekolah SD/MI (Persen)	5.36	6.036	112.57%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan baik (Persen)	0.22	1.146	516.22%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	SMP/MTs/Sederajat IPTEK (Persen)	0.83	3.527	422.90%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	SMP/MTs/Sederajat IMTAQ (Persen)	12.00	12	100.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	APK SMP/MTs (Persen)	0.05	0.056	112.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	APM SMP/MTs (Persen)	0.91	0.734	80.66%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	APS SMP/MTs (Persen)	1.00	1.057	105.70%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (Persen)	-0.01	-0.007	70.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (Persen)	20.00	20	100.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (Persen)	0.92	0.917	99.67%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rasio Ketersediaan sekolah /Penduduk usia sekolah SMP/MTs Sederajat (Persen)	4.11	5.693	138.52%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan baik (Persen)	0.20	0.404	202.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



NO	PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
50	Program Pendidikan Non Formal	0.01	0.01	100.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
51	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			131.93%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Guru SD/MI/Sederajat yang memenuhi kualifikasi (Persen)	1.00	1.02	102.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi (Persen)	1.00	2.81	281.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rasio guru/murid PAUD/TK/ sederajat per kelas rata-rata (Persen)	5.20	5.20	100.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rasio guru/murid SD/MI/ sederajat per kelas rata-rata (Persen)	1.20	1.04	86.67%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rasio guru/murid SMP/MTs/ sederajat per kelas rata-rata (Persen)	1.20	1.08	90.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
52	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	2,646.50	2,937.12	110.98%	Dinas Perdagangan
53	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	130.00	237.00	182.31%	Dinas Perdagangan
54	Program Peningkatan Kebersihan, Keamanan Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Pasar	0.50	0.00	0.00%	Dinas Perdagangan
55	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	1.00	1.00	100.00%	Dinas Perdagangan
56	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	37.00	64.25	173.65%	Dinas Perdagangan
57	Program Penerangan Jalan Umum (PJU)			142.81%	Dinas Perhubungan
	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) (unit)	300.00	652.00	217.33%	
	Persentase fungsi penerangan jalan dan kenyamanan Kota Balikpapan (%)	1.00	1.00	100.00%	
	Persentase Peningkatan Kualitas Penerangan Jalan Umum (PJU) (%)	18.00	20.00	111.11%	
58	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	1.00	1.00	100.00%	Dinas Perhubungan
59	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	5.00	4.00	80.00%	Dinas Perhubungan



NO	PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
60	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	5.00	1.39	27.80%	Dinas Perhubungan
61	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	15.00	0.00	0.00%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
62	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.00	0.10	10.00%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
63	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	0.10	0.09	90.00%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
64	Program Perencanaan Tata Ruang	1.00	2.00	200.00%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
65	Program Lingkungan Sehat Perumahan	-5.00	0.00	0.00%	Dinas Perumahan dan Permukiman
66	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman	25.00	169.00	14.79%	Dinas Perumahan dan Permukiman
67	Program Pengembangan Perumahan	-11,260.00	24,998.00	-45.04%	Dinas Perumahan dan Permukiman
68	Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan	87.00	93.00	106.90%	Dinas Sosial
69	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	0.10	5.76	5760.00%	Dinas Sosial
70	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	4.75	36.15	761.05%	Dinas Sosial
71	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	5.00	64.39	1287.80%	Dinas Sosial
72	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	0.05	0.04	80.00%	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, dan Kecamatan
73	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.00	2.00	100.00%	Dinas Tenaga Kerja
74	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	2.40	2.30	95.83%	Dinas Tenaga Kerja
75	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			119.70%	Inspektorat
	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Internal (%)	2.00	0.00	0.00%	Inspektorat



NO	PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
	Jumlah Perangkat Daerah yang nilai Evaluasi SAKIP minimal "Baik" (OPD)	12.00	32.00	266.67%	Inspektorat
	Presentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan/pengawasan internal (%)	88.00	81.33	92.42%	Inspektorat
76	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	5.00	5.00	100.00%	Satuan Polisi Pamong Praja
77	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	64.01	64.01	100.00%	Satuan Polisi Pamong Praja
78	Program Penataan Kelembagaan	20.00	20.00	100.00%	Sekretariat Daerah
79	Program Pengendalian Inflasi	5.00	0.65	187.00%	Sekretariat Daerah
80	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	30.00	0.02	0.05%	Sekretariat Daerah
81	Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	97.06	100.00	103.03%	Sekretariat Daerah
82	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	5.00	0.00	0.00%	DPMPT
83	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	5.00	5.00	100.00%	DPMPT
84	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan	0.10	0.30	300.00%	DPMPT
	PROGRAM PENUNJANG				
85	Program Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Sekolah	100	100	100.00%	Kecamatan Se Kota Balikpapan
86	Program Pengembangan Ketahanan Politik Ekonomi Sosial dan Budaya	100	100	100.00%	Kesbang
87	Program Bantuan Hukum dan HAM	20.00	15.00	75.00%	Sekdakot
88	Program Evaluasi dan Pelaporan Pemerintahan	20.00	20.00	100.00%	Sekdakot
89	Program Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Kota	20.00	20.00	100.00%	Sekdakot
90	Program Hari Jadi Kota	20.00	20.00	100.00%	Sekdakot



NO	PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
91	Program Pemberdayaan Kelembagaan Petani, Peternak, Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah	70.00	33.00	47.14%	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
92	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	15.00	82.43	549.53%	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
93	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	90.00	78.00	86.67%	DPU
94	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	20.00	20.00	100.00%	Sekdakot
95	Program Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan	0.03	0.03	100.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
96	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	18.00	15.43	85.72%	Satpol PP
97	Program Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	100	100	100.00%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
98	Program Pemeliharaan Saluran dan Drainase	90.00	90.00	100.00%	DPU
99	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	1.00	1.00	100.00%	Dinas Perdagangan
100	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1.00	0.696	69.57%	Dinas Perhubungan
101	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	20.00	0.00	0.00%	Sekdakot
102	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1.00	1.63	163.00%	DPPR
103	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	20.00	15.00	75.00%	Sekdakot
104	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan/Ternak	85.00	143.00	168.24%	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
105	Program pendidikan politik masyarakat	0.00	0.00	0.00%	Kesbang
106	Program Pengadaan Lahan Pembangunan Jalan dan Jembatan	0.20	0.00	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum
107	Program Pengadaan Lahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	4.73	0.00	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum
108	Program Pengadaan Lahan Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	3.65	0.00	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum



NO	PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
109	Program Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan	1.00	0.00	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum
110	Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	1.00	1.00	100.00%	Dinas Pekerjaan Umum
111	Program Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan	140.00	1,241.00	886.43%	Dinas Pekerjaan Umum
112	Program Pengawasan Pengendalian Telekomunikasi dan Teknologi Informasi	95.00	109.42	115.18%	Diskominfo
113	Program pengelolaan areal pemakaman	100	100	100.00%	DLH
114	Program Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	20.00	15.22	76.10%	Sekdakot
115	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	14.00	5.00	35.71%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
116	Program Pengelolaan Keuangan Perbendaharaan	91.67	0.01	0.01%	BPKD
117	Program Pengelolaan Parkir	2.00	2.00	100.00%	Dinas Perhubungan
118	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (triliun)	1,891	2,341	123.76%	BPKD
119	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	20.00	20.00	100.00%	Dinas Perumahan dan Permukiman
120	Program Pengelolaan Rumah Susun	20.00	20.00	100.00%	Dinas Perumahan dan Permukiman
121	Program Pengembangan City Gas	20.00	0.00	0.00%	Sekdakot
122	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	5.00	0.00	0.00%	DPU
123	Program Pengembangan Data dan Informasi	5.00	5.00	100.00%	Bappeda Litbang
124	Program Pengembangan Data, Informasi Perhubungan /Transportasi dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.	2.00	2.00	100.00%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
125	Program Pengembangan Data/Informasi	5.00	5.00	100.00%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
126	Program Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) Masyarakat Perikanan	4.00	0.00	0.00%	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
127	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	26.00	14.00	53.85%	Diskominfo



NO	PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
128	Program Pengembangan Pencatatan Kegiatan Usaha Perikanan	210.00	207.00	98.57%	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
129	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	199.00	-1,708.45	-858.52%	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
130	Program Pengembangan Potensi dan Pendapatan	23.00	23.00	100.00%	BPPDRD
131	Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	5.00	5.00	100.00%	DPMPT
132	Program Pengembangan Sistem Pelaporan	20.00	20.00	100.00%	DKUMKMP
133	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	20.00	21.00	105.00%	Dinas Sosial dan Dina Tenaga Kerja
134	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	20.00	16.67	83.35%	Inspektorat
135	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100.00	85.72	85.72%	Kantor Kesbangpol
136	Program Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan ASN	25.00	21.43	85.72%	BKPSDM
137	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	87.00	93.00	106.90%	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
138	Program Peningkatan Drainase Lingkungan	5.00	60.00	1200.00%	DPU
139	Program Peningkatan Jalan Lingkungan	5.00	60.00	1200.00%	DPU
140	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan	20.00	5.00	25.00%	Kantor Kesbangpol, Sekretariat Daerah
141	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	20.00	10.00	50.00%	Kecamatan Se Kota Balikpapan
142	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	20.00	20.00	100.00%	Kecamatan Se Kota Balikpapan
143	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	20.00	20.00	100.00%	Kecamatan, Sekretariat Daerah
144	Program Peningkatan Kinerja ASN	0.50	0.50	100.00%	Kecamatan, Sekretariat Daerah
145	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	18.18	14.83	81.57%	RSKB Sayang Ibu



NO	PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
146	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	70.00	70.00	100.00%	Sekretariat Daerah
147	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	20.00	18.82	94.10%	Sekretariat Daerah
148	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	7.00	-19.96	-285.14%	Sekretariat Daerah
149	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah	20.00	20.00	100.00%	Sekretariat Daerah
150	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	85.00	59.00	69.41%	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
151	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	30.00	0.00	0.00%	Satpol PP
152	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	20.00	20.00	100.00%	Sekretariat Daerah
153	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100.00	100.00	100.00%	Sekretariat Daerah
154	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	100.00	100.00	100.00%	Sekretariat Daerah
155	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	4.00	1.82	45.50%	Sekretariat Daerah
156	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00	100.00	100.00%	Sekretariat Daerah
157	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	1.00	77.00	7700.00%	Sekretariat Daerah
158	Program Penyebarluasan Informasi Daerah	20.00	16.19	80.95%	Sekretariat Daerah
159	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	75.00	0.00	0.00%	Sekretariat Daerah
160	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya dan Sarana Prasarana	20.00	0.00	0.00%	Sekretariat Daerah
161	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	100	100	100.00%	Bappeda Litbang
162	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100.00%	Bappeda Litbang



NO	PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
163	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.00	1.0168	101.68%	Sekretariat Daerah
164	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	4.00	4.00	100.00%	Dinas Perhubungan
165	Program Sistem Data Informasi Pekerjaan Umum	1.00	1.00	100.00%	DPU
166	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	20.00	0.00	0.00%	Sekretariat Daerah
167	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	20.00	8.67	43.35%	Sekretariat Daerah, Bappeda Litbang, Badan Pengelola Keuangan Daerah
168	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00	100.00	100.00%	Sekretariat DPRD
169	Program Pelayanan Angkutan Perairan	1.00	1.00	100.00%	Seluruh OPD Kota Balikpapan
170	Program Pelayanan Pengaduan Masyarakat	360.00	360.00	100.00%	Seluruh OPD Kota Balikpapan
171	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	20.00	16.00	80.00%	Seluruh OPD Kota Balikpapan

Sumber : OPD kota Balikpapan, data diolah tahun 2020

B. REALISASI ANGGARAN

1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana yang tertuang dalam APBD ditargetkan sebesar Rp. **2.084.616.352.502,00** dan dapat direalisasikan sebesar Rp. **2.547.634.919.659,71** atau mencapai sebesar **122.21%**. Adapun rincian target rencana dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Komposisi Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No	Komposisi Pendapatan	Pendapatan Tahun 2020 (Rp.)		
		Target	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Daerah	471.519.353.613,00	710.478.779.604,71	150,68
2	Dana Perimbangan	1.132.507.129.889,00	1.418.154.115.889,00	125,22



3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	480.589.869.000,00	419.002.024.166,00	87,18
Jumlah		2.084.616.352.502,00	2.547.634.919.659,71	122,21

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, data diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 3.5 menggambarkan kondisi pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2019 dengan penjelasan sebagai berikut :

mengambarkan kondisi pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2020 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Target rencana Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 setelah perubahan sejumlah Rp. 471.519.353.613,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi jajaran perangkat daerah dapat merealisasikan Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 710.478.779.604,71. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukkan peningkatan dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 150,68% atau meningkat dari target sejumlah Rp.238.959.425.991,71 atau lebih 50,68%.
- Target rencana Dana Perimbangan tahun 2020 setelah perubahan sejumlah Rp. 1.132.507.129.889,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.418.154.115.889,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukkan peningkatan dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 125,22% atau meningkat dari target sejumlah Rp.285.646.986.000 atau lebih 25,22%.
- Target Rencana Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2020 setelah perubahan sejumlah Rp. 480.589.869.000,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Rencana Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 419.002.024.166,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukkan penurunan dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 87,18% atau dengan kurang dari target sejumlah Rp. 61.587.844.834,00 atau kurang 12,82%.

Berdasarkan penjelasan komposisi pendapatan pada Tahun Anggaran 2020, digambarkan pula sumber pendapatan dari masing-masing komposisi pendapatan sebagai berikut.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) besar atau kecil dapat menjadi suatu argumentasi untuk menilai peran dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (*self-supporting*). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Hasil Pajak Daerah; (2) Hasil Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; serta (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Adapun perincian PAD Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6

Perkembangan Target dan Realisasi PAD Kota Balikpapan Tahun 2012-2019

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Pendapatan
2012	290.007.283.203,00	352.034.256.557,17	1.647.132.469.666,19
2013	354.840.272.692,00	470.465.949.932,97	2.214.991.437.841,00
2014	638.630.681.123,00	729.037.647.063,32	2.474.995.562.245,32
2015	539.892.356.090,00	582.744.865.141,84	2.529.001.945.784,00
2016	555.970.991.413,00	560.364.263.457,29	1.993.392.160.506,29
2017	568.575.283.786,00	612.300.113.260,09	1.808.970.163.703,09
2018	678.500.000.000,00	566.281.230.974,33	2.086.964.532.422,00
2019	688.424.448.700,00	764.087.178.241,05	2.469.528.438.671,23
2020	471.519.353.613,00	710.478.779.604,71	2.547.634.919.659,71

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, data diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel Perkembangan Target dan Realisasi PAD, bahwa realisasi PAD Kota Balikpapan pada tahun 2020 mengalami peningkatan pendapatan dari tahun 2019 sejumlah Rp. 78.106.480.988,48 atau 3,16%. Laju pertumbuhan PAD. Hal ini menunjukkan kinerja dari PAD mengalami peningkatan yang sangat signifikan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Merujuk pada sumber-sumber PAD Tahun Anggaran 2020 dapat dirincikan sebagai berikut .



Tabel 3.7
Komponen Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2019 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No	Komponen Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 (Rp.)		
		Target	Realisasi	%
1.	Hasil Pajak Daerah	331.500.000.000,00	425.103.456.916,60	128,24
2.	Hasil Retribusi Daerah	43.114.129.900,00	49.228.723.680,82	114,18
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	16.167.354.650,00	16.174.599.738,41	100,04
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	80.737.869.063,00	219.971.999.268,88	272,45
Jumlah		471.519.353.613,00	710.478.779.604,71	150,68

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, data diolah 2020

Berdasarkan tabel 3.7. menggambarkan kondisi pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2020 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Target rencana Hasil Pajak Daerah (HPD) tahun 2020 setelah perubahan sejumlah Rp. 331.500.000.000,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Hasil Pajak Daerah sejumlah Rp. 425.103.456.916,60. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukkan peningkatan dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 128,24% atau dengan peningkatan pendapatan dari target sejumlah Rp. 93.603.456.916,60 atau meningkat 28,24%.
2. Target rencana Hasil Retribusi Daerah (HRD) tahun 2020 setelah perubahan sejumlah Rp. 43.114.129.900,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 49.228.723.680,82. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukkan penurunan dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 114,18% atau dengan penurunan pendapatan dari target sejumlah Rp. 6.114.539.780,82 atau menurun 14,18%.
3. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2020 setelah perubahan sejumlah Rp. 16.167.354.650,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat



merealisasikan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 16.174.599.738,41. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target dengan capaian kinerja sebesar 100,04% atau dengan peningkatan pendapatan dari target sejumlah Rp. 7.245.088,41 atau meningkat 0,04%.

4. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dipisahkan tahun 2020 setelah perubahan sejumlah Rp. 80.737.869.063,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 219.971.999.268,88. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target dengan capaian kinerja sebesar 272,45% atau dengan peningkatan pendapatan dari Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 139.234.130.205,88 atau Meningkat 172,45%.

Sebagaimana penjelasan atas komponen tergambar pencapaian 4 (empat) komponen sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020. Dari 4 (empat) Komponen tersebut, Hasil Retribusi Daerah menunjukkan kontribusi melampaui dari target yang direncanakan. Tindak lanjut untuk peningkatan PAD sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan penentuan sumber-sumber target pendapatan yang didasarkan pada historis.
- b. Pemuktahiran database wajib pajak retribusi daerah.
- c. Meningkatkan efektivitas dalam pemungutan retribusi daerah.
- d. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap capaian retribusi daerah.
- e. Pengembangan SDM pemungut retribusi pajak.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana perimbangan ini terdiri atas: (1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; (2) Dan Alokasi Umum; dan (3) Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dan



Pemerintahan Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Realisasi perkembangan penerimaan Dana Perimbangan Kota Balikpapan selama periode tahun 2012-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8
Perkembangan Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Balikpapan
Tahun 2012-2019

Tahun	Dana Perimbangan	Pendapatan Daerah	Kontribusi Dana Perimbangan
2012	1,074,521,018,050.00	1,647,132,469,666.19	65.24%
2013	1,173,881,648,321.00	2,214,991,437,841.00	53.00%
2014	2,635,068,224,864.00	2,474,995,562,245.32	106.47%
2015	1,430,910,142,069.00	2,529,001,945,784.00	56.58%
2016	1,066,561,649,134.00	1,993,392,160,506.29	53.50%
2017	922,960,601,526.00	1,808,970,163,703.09	51.02%
2018	1,096,230,492,809.00	2,086,964,532,422.00	52.53%
2019	1,136,041,501,529.00	2,469,528,438,671.23	46.00%
2020	1.418.154.115.889,00	2.547.634.919.659,71	55.67%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, data diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel Perkembangan Target dan Realisasi PAD, bahwa realisasi PAD Kota Balikpapan pada tahun 2019 mengalami peningkatan pendapatan dari tahun 2018 sejumlah Rp. 282.112.614.360,00 atau 24,83%. Ditinjau dari Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah diperoleh nilai kontribusi sebesar 55,67% dari total pendapatan daerah sejumlah 2.547.634.919.659,71. Hal ini menunjukkan kinerja dari PAD mengalami peningkatan yang sangat signifikan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Target rencana penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.132.507.129.889,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.418.154.115.889,00 atau target tercapai sebesar 125,22% sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI.

Adapun perincian penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.9
Perincian Dana Perimbangan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2020
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No	Komponen Dana Perimbangan	Penerimaan Tahun 2020 Setelah Perubahan (Rp.)		
		Target	Realisasi	%
1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	545.508.774.889,00	825.893.543.747,00	151,40
2	Dana Alokasi Umum	437.726.788.000,00	429.199.860.000,00	98,05
3	Dana Alokasi Khusus	149.271.567.000,00	163.060.712.142,00	109,24
Jumlah		1.132.507.129.889,00	1.418.154.115.889,00	125,22

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, data diolah 2020

Berdasarkan tabel 3.7 menggambarkan kondisi pendapatan dana perimbangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2020 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Target Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak tahun 2020 setelah perubahan sejumlah Rp. 545.508.774.889,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Hasil Pajak Daerah sejumlah Rp. 825.893.543.747,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukkan peningkatan dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 151,40% atau dengan peningkatan pendapatan dari target sejumlah Rp. 280.384.768858,00.
2. Target Dana Alokasi Umum tahun 2020 setelah perubahan sejumlah Rp.437.726.788.000,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 429.199.860.000,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukkan penurunan dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 98,05% atau dengan penurunan pendapatan dari target sejumlah Rp. 8.526.928.000,00.
3. Target Dana Alokasi Khusus tahun 2020 setelah perubahan sejumlah Rp.149.271.567.000,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 163.060.712.142,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target dengan capaian kinerja sebesar 109,24% atau dengan penurunan pendapatan dari target sejumlah Rp. 13.789.145.142,00.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Pemerintah Kota Balikpapan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan (3) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 480.589.869.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 419.002.024.166,00 atau 87,18%, sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI.

Adapun perincian Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10
Perincian Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2020
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No	Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Penerimaan Tahun 2020 (Rp.)		
		Target	Realisasi	%
1	Pendapatan Hibah	78.971.300.000,00	6.960.000.000,00	8,81
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah	231.193.027.000,00	230.943.325.166,00	99,89
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	60.630.542.000,00	71.303.699.000,00	117,60
4	Bantuan Keuangan	109.795.000.000,00	109.795.000.000,00	100,00
Jumlah		480.589.869.000,00	419.002.024.166,00	87,18%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, data diolah 2020

Berdasarkan tabel 3.10 menggambarkan kondisi pendapatan dana perimbangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2019 dengan penjelasan sebagai berikut :
menggambarkan kondisi pendapatan dana perimbangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2020 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Target Pendapatan Hibah tahun 2020 setelah perubahan sejumlah Rp. 78.971.300.000,00 dengan realisasi pendapatan Hasil Pajak Daerah sejumlah Rp. 6.960.000.000,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukkan penurunan dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja



sebesar 8,81% atau dengan penurunan pendapatan terhadap target sejumlah Rp. 72.011.300.000.

2. Target Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2020 setelah perubahan sejumlah Rp. 231.193.027.000,00 dengan realisasi Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 230.943.325.166,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukkan penurunan dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 99,89% atau dengan penurunan pendapatan terhadap target sejumlah Rp. 249.701.834,00.
3. Target Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus tahun 2020 setelah perubahan sejumlah Rp. 60.630.542.000,00 dengan realisasi pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlah Rp. 71.303.699.000,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukkan capaian target kinerja tercapai sebesar 117,60% atau dengan peningkatan pendapatan terhadap target sejumlah Rp. 10.673.157.000.
4. Target Bantuan Keuangan tahun 2020 setelah perubahan sejumlah Rp. 109.795.000.000,00 dengan realisasi pendapatan Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 109.795.000.000,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukkan capaian target kinerja tercapai sebesar 100,00%.

1. Permasalahan Dan Solusi terhadap Pendapatan Daerah

Pencapaian target pendapatan pada tahun 2019 tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan. Adapun permasalahan utama berdasarkan kelompok sumber pendapatan, secara deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Tingkat akurasi data retribusi berpengaruh terhadap data wajib retribusi, perlu diupayakan ketersediaannya guna mendukung peningkatan PAD yang bersumber retribusi.
2. Efektivitas penerapan prosedur dan mekanisme administrasi pengelolaan PAD perlu lebih dioptimalkan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD.
3. Perlu ditingkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-sumber PAD dengan mengoptimalkan kualitas petugas pengelola administrasi PAD.



4. Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya perlu lebih ditingkatkan.
5. Review peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi seiring dengan telah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi.

b. Dana Perimbangan

Perhitungan Dana Perimbangan, baik dalam Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, belum sesuai dengan harapan daerah. Oleh karena itu perlu ditingkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-sumber pendapatan, khususnya dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 serta Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan pendapatan dari sisi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dalam pendistribusian, memerlukan alokasi waktu yang lebih banyak untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2019, secara makro dilandasi atas pemahaman efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran Belanja Daerah yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019.

Kebijakan Belanja Daerah secara deskriptif dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut: (1) **BELANJA TIDAK LANGSUNG**, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, (2) **BELANJA LANGSUNG**, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Daerah Pemerintah Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar **Rp. 2.393.715.488.939,91** dan dapat direalisasikan **Rp. 2.031.154.773.412,00** atau mencapai **84,85%** sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.11
Komposisi Belanja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2020
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No	Uraian	Belanja Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.101.107.946.545,53	975.742.539.825,99	88,61
2	Belanja Langsung	1.292.607.542.394,38	1.055.412.233.586,01	81,65
Total Belanja		2.393.715.488.939,91	2.031.154.773.412,00	84,85

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, data diolah 2020

Jika dilihat dari komposisi Belanja Daerah pada tabel 3.11, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Besaran Belanja Tidak Langsung memberikan kontribusi pada struktur APBD Tahun 2020 sejumlah Rp. 975.742.539.825,99 atau 48,04% (hasil perbandingan realisasi belanja tidak langsung terhadap total realisasi belanja) dengan capaian kinerja sebesar 88,61%.
2. Besaran Belanja langsung memberikan kontribusi pada struktur APBD Tahun 2020 sejumlah Rp. atau 51,96% (hasil perbandingan realisasi belanja langsung terhadap total realisasi belanja langsung) dengan capaian kinerja sebesar 81,65%.

Adapun anggaran dan realisasi masing-masing Belanja untuk Tahun Anggaran 2019, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.1.101.107.946.545,53 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.975.742.539.825,99 atau 88,61%, sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI dengan rincian pada tabel berikut.



Tabel 3.12
Perincian Belanja Tidak Langsung Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2020
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No	Uraian	Belanja Tidak Langsung Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	774.858.421.545,53	695.120.722.057,31	89,71
2	Belanja Subsidi	-	-	-
3	Belanja Hibah	134.263.900.00,00	119.685.972.699,00	89,14
4	Belanja Bantuan Sosial	45.685.625.000,00	39.228.690.000,00	85,87
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kab /Kota	1.300.000.000,00	1.271.220.600,00	97,79
6	Belanja Tidak Terduga	145.000.000.000,00	120.435.934.469,68	83,06
JUMLAH		1.101.107.946.545,53	975.742.539.825,99	88,61

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, data diolah 2020

1. Belanja Pegawai

Belanja ini pada tahun 2020 dianggarkan sejumlah Rp. 774.858.421.545,53 dan telah direalisasikan sejumlah Rp. 695.120.722.057,31 atau 89,71%. Belanja ini digunakan untuk pembayaran gaji pegawai dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

2. Belanja Subsidi

Belanja ini tidak dialokasikan pada tahun 2020.

3. Belanja Hibah

Belanja Hibah pada tahun 2020 dianggarkan sejumlah Rp. 134.263.900.00,00 dan telah direalisasikan sejumlah Rp. 119.685.972.699,00 atau 89,14%. Belanja ini diberikan kepada lembaga, kelompok, atau organisasi kemasyarakatan.

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2020 dianggarkan sejumlah Rp. 45.685.625.000,00 dan telah direalisasikan sejumlah Rp. 39.228.690.000,00 atau 85,87%. Belanja ini digunakan untuk Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik pada Tahun 2020 dianggarkan Rp. 1.300.000.000,00 dan telah direalisasikan sejumlah Rp. 1.271.220.600,00 atau 97,97%.

6. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2020 dianggarkan sejumlah Rp. 145.000.000.000,00 dan direalisasikan sejumlah Rp. 120.435.934.469,68 atau 83,06%.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja Langsung pada tahun 2020 dianggarkan sejumlah Rp. 1.292.607.542.394,38 dan dapat direalisasikan sejumlah Rp. 1.055.412.233.586,01 atau 81,65% sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI. Belanja ini merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan program dan kegiatan berdasarkan sumber dari APBD Kota Balikpapan.

Adapun perincian Belanja Langsung pada tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13
Perincian Belanja Langsung Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2020
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2020 Setelah Perubahan (Rp.)		
		Target	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	259.899.211.936,00	212.432.959.068,66	81,74
2	Belanja Barang & Jasa	593.960.496.525,00	427.981.766.502,40	72,06
3	Belanja Modal	438.747.833.933,38	414.997.508.014,95	94,59
JUMLAH		1.292.607.542.394,38	1.055.412.233.586,01	81,65

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, data diolah 2020

1. Belanja Pegawai

Belanja ini pada tahun 2020 dianggarkan sejumlah Rp. 259.899.211.936,00 dan telah direalisasikan sejumlah Rp. 212.432.959.068,66 atau 81,74%.



Belanja ini digunakan untuk pembayaran gaji pegawai dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja ini pada tahun 2020 dianggarkan sejumlah Rp. 593.960.496.525,00 dan telah direalisasikan sejumlah Rp. 427.981.766.502,40 atau 72,06%.

Belanja ini digunakan untuk penyediaan barang dan jasa pada program/kegiatan aparatur pada tiap perangkat daerah.

3. Belanja Modal

Belanja Hibah pada tahun 2020 dianggarkan sejumlah Rp. 438.747.833.933,38 dan telah direalisasikan sejumlah Rp. 414.997.508.014,95 atau 94,95%.

Belanja ini digunakan untuk barang atau jasa yang menghasilkan asset Pemerintah Kota Balikpapan.

3. Target dan Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/(defisit) anggaran. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah didasari oleh pandangan bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, secara konsisten dapat dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab yang diemban, serta guna menjaga kredibilitas pemerintah daerah.

Pendayagunaan komponen pembiayaan pada struktur APBD tahun Anggaran 2018 dilandasi atas pemikiran bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Balikpapan senantiasa harus diupayakan pelaksanaannya guna menjaga citra dan wibawa Pemerintah Kota Balikpapan, khususnya kepada pemberi pinjaman dan umumnya kepada masyarakat. Penetapan kebijakan pembiayaan daerah dibarengi pula dengan optimalisasi kemampuan Pemerintah Kota Balikpapan dalam menyeimbangkan antara pos penerimaan dan pos pengeluaran daerah pada komponen

pembiayaan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kota Balikpapan yang telah ditetapkan.

Optimalisasi kemampuan Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka menyeimbangkan antara bidang Penerimaan dan bidang Pengeluaran Daerah pada komponen Pembiayaan, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan yang telah ditetapkan. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2020, dianggarkan sejumlah Rp. 309.099.136.473,91 dengan realisasi sejumlah Rp. 309.171.718.088,00. Perbandingan antara realisasi terhadap target menghasilkan capaian kinerja dari komposisi pembiayaan adalah 102,00% artinya kinerja Pembiayaan dinilai Sangat Baik.

Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2020 dianggarkan sejumlah Rp. 323.831.718.088,00 dan terealisasi sejumlah Rp. 323.831.718.088,00 artinya kinerja penerimaan pembiayaan tercapai 100%, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun Anggaran 2020 dengan target sejumlah Rp. 14.732.581.650,09 dan telah terealisasi sejumlah Rp. 14.660.000.000,00 artinya kinerja penerimaan pembiayaan tercapai 99,51%.

Tabel 1.13

**Komposisi Pembiayaan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2020
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2020 Setelah Perubahan (Rp.)		
		Target	Realisasi	%
1	Penerimaan Pembiayaan	323.831.718.088,00	323.831.718.088,00	100,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	14.732.581.650,09	14.660.000.000,00	99,51
Jumlah		338.564.299.738,09	338.491.718.088,00	99,98

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, data diolah 2020

C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Selama tahun 2019, Pemerintah Kota Balikpapan telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang berhasil diraih yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Secara keseluruhan, penghargaan yang berhasil diraih

berjumlah 39 penghargaan dari berbagai lembaga, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah (swasta). Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.15. Penghargaan dan Prestasi yang Diraih Pemerintah Kota Balikpapan
Tahun 2019

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT	INSTANSI YANG MEMBERIKAN	PENERIMA	SEREMONIAL	
					ACARA	PEJABAT YANG MENERIMA
1	Panji Keberhasilan Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Inspektorat	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
2	Panji Keberhasilan Bidang Keterbukaan Informasi Publik	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas Kominfo	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
3	Panji Keberhasilan Bidang Industri	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas koperasi, UMKM, dan perindustrian	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
4	Panji Keberhasilan Bidang Perdagangan	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas perdagangan	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
5	Panji Keberhasilan Bidang Koperasi	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas koperasi, UMKM, dan perindustrian	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
6	Panji Keberhasilan Bidang Pencegahan dan Pemberantasan, Panyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	BNN Kota	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
7	Panji Keberhasilan Bidang Perhubungan	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas perhubungan	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
8	Panji Keberhasilan Bidang Pendidikan	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas pendidikan dan kebudayaan	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
9	Panji Keberhasilan Bidang Apresiasi Bunda PAUD	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	TP-PKK	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
10	Panji Keberhasilan Bidang Kebudayaan Kota	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas pendidikan dan kebudayaan	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
11	Panji Keberhasilan Bidang Kesehatan	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas kesehatan kota	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
12	Panji Keberhasilan Bidang Perpustakaan dan Minat Baca	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas arisp dan perpustakaan	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA



NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT	INSTANSI YANG MEMBERIKAN	PENERIMA	SEREMONIAL	
					ACARA	PEJABAT YANG MENERIMA
13	Panji Keberhasilan Bidang PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Bagian pemerintahan	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
14	Panji Keberhasilan Bidang Kepemudaan	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
15	Panji Keberhasilan Bidang Tim Penggerak PKK Berprestasi	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	TP-PKK	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
16	Panji Keberhasilan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	BPBD	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
17	Panji Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas lingkungan hidup	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
18	Panji Keberhasilan Bidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kategori Kota	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
19	Panji Keberhasilan Bidang Pariwisata	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
20	Terbaik II Bidang Keberhasilan Pengelolaan e-Government	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Diskominfo	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
21	Terbaik II Bidang Dekranasda	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas koperasi, UMKM, dan perindustrian	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
22	Terbaik II Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas penanaman modal dan perizinan terpadu	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
23	Terbaik II Bidang Daya Saing Daerah	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas penanaman modal dan perizinan terpadu	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
24	Terbaik II Bidang Tata Kelola Kearsipan	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas arisp dan perpustakaan	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
25	Terbaik II Bidang Keolahragaan	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA



NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT	INSTANSI YANG MEMBERIKAN	PENERIMA	SEREMONIAL	
					ACARA	PEJABAT YANG MENERIMA
26	Terbaik II Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Bagian pemerintahan	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
27	Terbaik II Bidang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	DP3AKB	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
28	Terbaik II Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kategori Kota	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	DP3AKB	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
29	Terbaik II Bidang Kondusifitas Kota	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Kesbangpol	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
30	Terbaik II Bidang Pengembangan Iptek dan Inovasi	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Bappedalitbang	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
31	Terbaik III Bidang Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Bagian pemerintahan	HUT Ke-62 PROV KALTIM	WALIKOTA
32	Adipura (XXII)	Nasional	Kementerian LHK	DLH		WALIKOTA
33	Keterlibatan dan partisipasi aktif aparatur damkar	Nasional	Kemendagri	BPBD	HUT Damkar ke 100	WALIKOTA
34	Indonesian creative Leader	Nasional	MNC Group		Malam Apresiasi Government award	WALIKOTA
35	Pembina UKS	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Disdikbud	Peringatan hardiknas Prov Kaltim	Sahli Ekonomi
36	Pakarti Utama III	Nasional	TP-PKK Pusat	Kelurahan Lamaru	Peringatan Harganas XXVI	Ketua TP-PKK Balikpapan
37	Juara Umum HKG-PKK	Provinsi	TP-PKK Prov Kaltim	TP-PKK	Peringatan HKG-PKK kaltim	Ketua TP-PKK Balikpapan
38	Public Service of the Year	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	RSUD Beriman		Direktur RSUD
39	Penghargaan Proper Hijau	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	RSUD Beriman	Peringatan hari Lingkungan Hidup Sedunia	Direktur RSUD
40	Sekolah Adiwiyata	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	SDN 004, 005, 016, 017, 018, 026, 029 Balteng		Kepala Sekolah



NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT	INSTANSI YANG MEMBERIKAN	PENERIMA	SEREMONIAL	
					ACARA	PEJABAT YANG MENERIMA
				SDN 008, 009, 010, 012, 014, 023, 028, 029, 032 Balut		
41	Opini WTP	Nasional	BPK Perwakilan Kaltim	BPKD, Inspektorat	Penyerahan LHP TA 2018	Walikota
42	Aditya Karya Mahatva Yodha Award	Nasional	Kementerian Sosial	Dinas Sosial	Anugerah Penghargaan nasional	Wawali
43	Menuju Kota Layak Anak Kategori Nindya	Nasional	Kemen PPPA	DP3AKB	Peringatan hari Anak Nasional	Walikota
44	Penghargaan Kelembagaan UPTD PPA Terbaik I	Nasional	Kemen PPPA	DP3AKB	Peringatan hari Anak Nasional	Walikota
45	Puspaga mandiri terbaik II kategori Kota	Nasional	Kemen PPPA	DP3AKB	Peringatan hari Anak Nasional	Walikota
46	Sekolah Ramah Anak Terbaik II	Nasional	Kemen PPPA	SDN 003 Balkot	Peringatan hari Anak Nasional	Walikota
47	Sekolah Ramah Anak Terbaik III kategori SLB	Nasional	Kemen PPPA	SLBN Bpp	Peringatan hari Anak Nasional	Walikota
48	Puskesmas Ramah Anak	Nasional	Kemen PPPA	Puskesmas Baru Tengah	Peringatan hari Anak Nasional	Walikota
49	Pakarti Madya I Tingkat nasional Pelaksana Terbaik IVA Test Kategori Kota	Nasional	TP PKK Pusat	Kec Balikpapan Tengah	Peringatan HKG-PKK Nasional	Ketua TP-PKK Balikpapan
50	Juara I Lomba Cipta Menu	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	TP-PKK	Festival Pangan Lokal B2SA	Ka. DPPP
51	Upakarya Wanua Nugraha	Nasional	Kemendagri		Temu Karya Nasional Desa dan Kelurahan	Camat Bpp Timur
52	Juara 1 Lomba Kelurahan	Nasional	Kemendagri	Kelurahan Teritip		Lurah teritip
53	Apresiasi Kota Terpopuler di Medsos	Nasional	Ikatan Humas Indonesia	Bagian Humaspro	Anugerah Humas 2019	WALIKOTA
54	Wahana Tata nugraha	Nasional	Kemenhub	Dishub	Peringatan hari Perhubungan	WALIKOTA
55	BKN Award 2019	Nasional	BKN RI	BKPSDM	BKn Awards 2019	Sekda
56	Natamukti Award Bidang UMKM	Nasional	International Council for Small Business (ICSB) Indonesia / Kemenkop UKM	Dinas koperasi, UMKM, dan perindustrian	Galang UMKM	WALIKOTA
57	Penghargaan atas opini WTP	Nasional	Kemenkeu	BPKD, Inspektorat	Penyerahan Penghargaan dan alokasi bankeu TA 2020	Sekda



NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT	INSTANSI YANG MEMBERIKAN	PENERIMA	SEREMONIAL	
					ACARA	PEJABAT YANG MENERIMA
58	Anugrah Aksara Utama	Nasional	kemendikbud	Disdikbud	Peringatan Hari Aksara Internasional	WALIKOTA
59	Juara III MTQ ke-41 Kaltim	Provinsi	Pemerintah Prov Kaltim	Bag. Kesra	MTQ ke-41 kaltim	As II
60	Kota Layak Pemuda kategori Utama	Nasional	Kemenpora	DPOP	Peringatan hari Sumpah Pemuda 2019	WALIKOTA
61	PR Indonesia Most Populer Leader in Social Media	Nasional	PR Indonesia	Walikota	Jambore PR Indonesia	Kabag Humaspro
62	Peringkat III Penilaian Fasilitas Kesehatan Tk I Berprestasi Tk. Nasional Kriteria Puskesmas Perkotaan	Nasional	Kemenkes	Dinkes / Puskesmas Karang Rejo	Hari Kesehatan Nasional	Ka. DKK
63	Dokter Teladan Nasional	Nasional	Kemenkes	Puskesmas Kr jati	Penganugerahan Nakes Teladan 2019	an dr. Niken Dayu Anggarini
64	Juara III LSS UKS/M Tingkat TK/RA	Nasional	Kemenkes	TK Kemala Bhayangkari	Lomba sekolah sehat	WALIKOTA
65	Juara III Pembina UKS	Nasional	Kemenkes	PKM Klandasan Ilir	Lomba sekolah sehat	WALIKOTA
66	Kota Sehat / Swasti Saba	Nasional	Kemendagri	Dinkes		Wawali
67	Bunda Paud Tingkat Nasional	Nasional	kemendikbud	Bunda Paud Balikpapan	apresiasi bunda PAUD nasional 2019	Bunda Paud Balikpapan
68	Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori sangat Baik	Nasional	Kemenpan RB	DPMPT		Kadis DPMPT
69	Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima	Nasional	Kemenpan RB	RSUD Beriman		Direktur RSUD
70	Korpri Award	Nasional	Korpri DP Nasional	Korpri Balikpapan	HUT Korpri	Sekda
71	Predikat terbaik capaian aksi kordinasi dan supervisi pencegahan korupsi	Nasional	Kemendagri	Inspektorat	Peringatan hari Anti Korupsi	WALIKOTA
72	Kota Peduli HAM	Nasional	Kemenkumham	Bag Hukum	Peringatan Hari HAM sedunia	Wawali
73	Zona Integritas Wilayah Bebas	Nasional	Kemenpan RB	RSUD Beriman	Peringatan hari Anti Korupsi	Direktur RSUD

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT	INSTANSI YANG MEMBERIKAN	PENERIMA	SEREMONIAL	
					ACARA	PEJABAT YANG MENERIMA
	Korupsi					
74	Adiwiyata Mandiri	Nasional	Kemen LH	Disdikbud		Ka Sekolah
75	Adiwiyata Nasiona;	Nasional	Kemen LH	Disdikbud		Ka Sekolah
76	IRSA Kategori Manajemen Keselamatan Jalan dan Kategori jalan Yang berkeselamatan	Nasional	Bappenas	Dishub		Kadishub
77	Anugerah Sapta Pesona Kategori Destinasi Belanja Terpopuler	Nasional	Kemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DPOP	Anugerah Pesona Indonesia (API) 2019	Kadis DPOP

Sumber: Sekreatariat Daerah Kota Balikpapan, data diolah tahun 2020

Tabel 3.16

Penghargaan Warga Prestasi Hut Ke 124 Kota Balikpapan Tahun 2021

NO	NAMA PENERIMA	JABATAN	JENIS PENGHARGAAN	NARASI / INFORMASI
1	Ade Putri Sarwendah	Guru SLB Negeri Kota Balikpapan	Prestasi Bidang Pendidikan	Ade Putri Sarwendah adalah seorang guru SLB Negeri di Kota Balikpapan yang telah menerima penghargaan terbaik 2 kategori Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Dedikatif dan Inovatif tingkat Nasional tahun 2020. selain itu beliau juga meraih anugerah kaltim education award tahun 2020 kategori guru berdedikasi. Tidak hanya itu, Ade Putri Sarwendah juga menjadi SDM penggerak pemanfaatan rumah belajar yang menjadikannya Duta Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020
2	Intan Rezky Putri	Guru Tari	Prestasi Bidang Seni Tari dan Dance Sport	Intan Rezky Putri adalah Pemenang Putri tari Indonesia 2020
3	dr. Niken Dayu Anggraini	Pimpinan Puskesmas Karang Jati	Prestasi Bidang Kesehatan	dr. Niken Dayu Anggraini adalah Pimpinan Puskesmas Karang Jati dengan beberapa prestasi diantaranya Juara 1 - Dokter sebagai tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota Balikpapan, selain itu beliau juga merupakan pemenang peringkat 1 tenaga kesehatan teladan di Puskesmas kategori Dokter tingkat provinsi tahun 2019, dan pemenang ke-1 penjurangan peserta inovasi dan kreativitas pelayanan perangkat daerah (PEPES IKAN PEDTA) provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 kategori pemerintah kabupaten/kota.



NO	NAMA PENERIMA	JABATAN	JENIS PENGHARGAAN	NARASI / INFORMASI
4	Bakrowi, S.Pd.	Guru SMP Nasional KPS	Prestasi Bidang Pendidikan	Bakrowi, S.Pd. Telah dinobatkan sebagai Duta Rumah Belajar Tahun 2020 Pusdatin kemendikbud Pada Acara Anugerah Kihajar 2020.
5	Muhammad Assifa	Atlet Taekwondo Indonesia (TI)	Prestasi Cabang Olahraga Taekwondo	Muhammad Assifa adalah Atlet Peraih Juara 1 SMART/MVP Sport Foundation ATF Online 2020
6	Muhammad Rifqi Dzakwan	Atlet Renang	Prestasi Cabang Olah Raga Renang	Muhammad Rifqi Dzakwan seorang Atlet yang meraih Juara 1 100 Gaya Dada Kejuaraan Arafura Games 2019 di Australia. Sebelumnya Muhammad Rifqi Dzakwan juga meraih Juara 1 pada 50 M dan 200 M gaya dada kejuaraan arafura Games tahun 2019.
7	Zafira Ramadhani	Atlet Ikatan Olahraga Dansa Indonesia (IODI)	Prestasi Bidang Dance Sport	Zafira Ramadhani Atlet IODI yang telah meraih Juara 1 Synchronize Under 10 Indonesia Internasional 2019 dan juga menyabet Juara 1 Duo Synchronize Samba Indonesia Internasional. Ditahun yang sama Zafira juga meraih Peringkat Pertama pada Synchronize Under 12 dan Duo Synchronize Rumba Indonesia Internasional 2019.
8	Edy Purnomo	Guru Olahraga	Prestasi Bidang Olah Raga	Edy Purnomo merupakan pelatih Olimpiade Olahraga Siswa nasional SD/MI cabang olahraga senam tahun 2019 dan juga Pelatih senam artistik kejurprov junior, senior, artistik, ritmik, aerobic gymnastic tahun 2019
9	Amiroh	Pengusaha Kuliner	Prestasi Bidang UMKM	Amiroh merupakan pemilik usaha Abon Ikan Asin Layur. Usahanya masuk dalam 5 Besar Kurasi Produk UMKM Unggulan Kategori Food/Kuliner dari Bank Indonesia. Beliau juga pernah meraih Juara II Lomba Olahan Pangan Lokal Tingkat Nasional Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan
10	Arkana	Siswa SD Nasional KPS Balikpapan	Prestasi Bidang Pendidikan	Sebagai seorang siswa Sekolah Dasar, Arkana memiliki segudang prestasi baik dari tingkat Kota, Provinsi maupun Nasional. Pada tingkat Nasional Ia pernah merai Jura 1 Konten Kreatif "Internet Aman Bagi Anak" Tingkat Nasional 2020 dengan Judul Video "Teman Anak". Ia Juga pernah meraih Medali Emas pada ajang Olimpiade Bahasa Inggris OMNAS 9 Tingkat NAsional 2020 dan Olimpiade Pahlawan Sains "Bahasa Inggris" Tingkat Nasional OPSI POSI 2020.

Tabel 3.17

Penghargaan Penanganan Covid-19 Hut Ke 124 Kota Balikpapan Tahun 2021

NO	NAMA PENERIMA	JABATAN	JENIS PENGHARGAAN	NARASI / INFORMASI
1	Kombes Pol Turmudi, SIK	Kapolresta Balikpapan	Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19	Pada tahun 2013 Turmudi pernah menjabat sebagai Kapolres Bulungan, Kalimantan Utara. Kemudian pada tahun 2014 menjadi Kapolres Berau. Sebelum menjabat Kapolresta Balikpapan, Turmudi menduduki posisi Wadir Binmas Polda Kaltim. Beliau memiliki jiwa seni dan menulis lebih dari 20 karyanya sendiri.
2	Kolonel Arm. I Putu Agung Sujarnawa	Dandim 0905/Balikpapan	Penggerak Pendonor Plasma	Kolonel Arm. I Putu Agung Sujarnawa menjabat sebagai Dandim 0905/Balikpapan. Saat ini beliau juga melaksanakan tugas sebagai Wakil Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 di Kota Balikpapan. Tidak hanya pernah ditugaskan di beberapa daerah di Indonesia, beliau juga pernah bertugas di luar negeri seperti Prancis, Rumania, Singapura dan India.
3	dr. M. Fadjar Nur Ilhamsyah Gafar (Alm).	Staf Medis Fungsional Umum Di RS. Pertamina	Tenaga Kesehatan Pejuang Covid-19 Kota Balikpapan	dr. M. Fadjar Nur Ilhamsyah Gafar (Alm) semasa hidupnya menjabat sebagai staf medis fungsional umum di RS. Pertamina Balikpapan. Beliau juga aktif dalam penanggulangan covid-19 di kota Balikpapan.
4	Drs. Semaun Gaharu, Apt (Alm).	Apoteker Madya Di RSUD DR.Kanudjoso Djatiwibowo	Tenaga Kesehatan Pejuang Covid-19 Kota Balikpapan	Drs. Semaun Gaharu, Apt (Alm) semasa hidupnya menjabat sebagai apoteker madya di RSUD DR.Kanudjoso Djatiwibowo. Beliau aktif dalam penanggulangan covid-19 di kota Balikpapan.
5	Herry Budiman	Karyawan Swasta	Pendonor Plasma Konvalesen sebanyak 7 kali	Herry Budiman adalah Salah satu penyintas Covid-19 yang terpapar sejak agustus 2020 dan sembuh pada september 2020. Sejak bulan september 2020 hingga sekarang, beliau telah mendonorkan plasma Konvalesen darahnya sebanyak 7 kali.
6	dr. Sriyono (Alm).	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat di DKK Balikpapan	Tenaga Kesehatan Pejuang Covid-19 Kota Balikpapan	dr. Sriyono (Alm) semasa hidupnya menjabat sebagai Kepala Bidang Kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai kepala UPT Puskesmas Perawatan Karang Joang.
7	Andreas Pamuji	Pemilik Yayasan Kasimo	Penggerak Relawan Penanganan dan Pencegahan Covid-19 di Kota Balikpapan	Andreas Pamuji menjabat sebagai pelaksana dan penggerak relawan banda indonesia yang telah aktif dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di kota Balikpapan. Beliau merangkul para relawan yang terkena PHK sebagai dampak dari pandemi untuk membuat peti jenazah covid-19 juga sebagai tenaga pemulasaraan jenazah covid-19 di RS Siloam sejak awal pandemi hingga bulan september 2020.

NO	NAMA PENERIMA	JABATAN	JENIS PENGHARGAAN	NARASI / INFORMASI
8	H. Ahmad Basir	CEO Permata Abadi Group Balikpapan	Tokoh Masyarakat Yang Peduli Terhadap Penanganan dan Pencegahan Covid-19 di Kota Balikpapan	H. Ahmad Basir adalah salah satu Tokoh Masyarakat yang berasal dari unsur Pengusaha. Beliau merupakan CEO Permata Abadi Group Balikpapan. Selain memiliki jabatan strategis di berbagai organisasi dan kegiatan sosial, beliau juga sempat meraih beberapa penghargaan diantaranya sebagai Tokoh Peduli Lingkungan Kota Balikpapan, Warga Pelopor Kota Balikpapan, Penghargaan sebagai presenter terbaik dalam program Insinyur profesional dan tanda Penghargaan Lencana Panca Karya. Tidak hanya itu saja, dimasa pandemic ini beliau juga memberikan perhatian khusus bagi pelaksanaan sosialisasi pencegahan penyebaran Covid-19 di kota Balikpapan.
9	Kasmadi	Duta Masker Balikpapan	Penggerak Perubahan Perilaku Era Adaptasi Kebiasaan Baru	Kasmadi menjabat sebagai Ketua RT 09 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara. Kasmadi pernah diberikan penghargaan sebagai Duta Kampanye Penggunaan Masker dan Protokol Kesehatan Covid-19 di Lingkungan RT karena perannya dalam menyosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat baik di lingkungan RTnya dan juga secara luas.

Tabel 3.18

**Penerima Panji Keberhasilan Pembangunan Daerah Tahun 2020
HUT KE-64 Provinsi Kalimantan Timur TAHUN 2021**

No.	Bidang Penghargaan		Terbaik
1	Bidang Pembangunan Hukum Dan HAM	1	Kabupaten Panajam Paser Utara
		2	Kota Balikpapan
		3	Kota Samarinda
2	Bidang Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lppd) Kategori Kota	1	Kota Samarinda
		2	Kota Bontang
		3	Kota Balikpapan
3	Bidang Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lppd) Kategori Kabupaten	1	Kabupaten Berau
		2	Kabupaten Penajam Paser Utara
		3	Kabupaten Kutai Kartanegara
4	Bidang Pencegahan Korupsi	1	Kota Bontang
		2	Kota Balikpapan
		3	Kabupaten Kutai Kartanegara
5	Bidang Keberhasilan Keterbukaan Informasi Publik	1	Kota Bontang
		2	Kota Samarinda
		3	Kota Balikpapan
6	Bidang Pariwisata Kategori Kota	1	Kota Bontang
		2	Kota Balikpapan
		3	Kota Samarinda



No.	Bidang Penghargaan		Terbaik
7	Bidang Pariwisata Kategori Kabupaten	1	Kabupaten Berau
		2	Kabupaten Kutai Kartanegara
		3	Kabupaten Paser
8	Bidang Pembangunan Tanaman Pangan	1	Kabupaten Kutai Kartanegara
		2	Kabupaten Berau
		3	Paser

BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Balikpapan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2019 terdapat 10 (sepuluh) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) indikator kinerja utama.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 20 indikator sasaran, disimpulkan bahwa:

Tabel 5.1. Hasil pengukuran kinerja terhadap 20 indikator sasaran strategis Kota Balikpapan Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Tingkat Rata-rata Capaian (%)	Capaian IKU Terhadap Sasaran Strategis	Hasil
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	95,66	Belum Tercapai	Tercapai
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan	100,61	Tercapai	Tercapai
3	Menurunnya jumlah pengangguran	73,72	Belum Tercapai	Tidak Tercapai
4	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	95,85	Belum Tercapai	Tidak Tercapai

5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	104,75	Belum Tercapai	Tercapai
6	Meningkatnya kenyamanan, keamanan dan ketertiban lingkungan	109,65	Tercapai	Tercapai
7	Terwujudnya infrastruktur yang handal	103,84	Belum Tercapai	Tercapai
8	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	108,46	Tercapai	Tercapai
9	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	105,15	Tercapai	Tercapai
10	Tata kelola pemerintahan yang baik	100,74	Tercapai	Tercapai

Sumber: Bappeda Litbang, data diolah tahun 2020

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 10 sasaran strategis beserta indikatornya, pencapaian sasaran strategis atas capaian indikator kinerja utama Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2020 secara keseluruhan tercapai dengan realisasi sebesar 85% tercapai dan 15% belum tercapai dari 20 IKU yang di Perjanjikan oleh Wali Kota Balikpapan.

Sehubungan uraian diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2020 menunjukkan ketercapaian pada 13 indikator namun terdapat pula 3 IKU yang belum tercapai yaitu IKU HLS, TPT, TPAK, TKm, IPG, Gini Rasio, dan Nilai Evaluasi LAKIP. Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik khususnya yang berkaitan secara langsung dengan beberapa indikator diatas. Akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan dapat menjadi tolok ukur dan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kinerja Pemerintah Kota Balikpapan.

Balikpapan 29 Maret 2021

WALIKOTA BALIKPAPAN



H.M. RIZAL EFFENDI



LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. M. RIZAL EFFENDI**

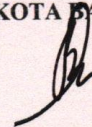
Jabatan : **WALI KOTA BALIKPAPAN**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Balikpapan, 04 Februari 2021

WALI KOTA BALIKPAPAN



H. M. RIZAL EFFENDI

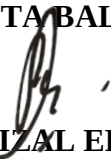


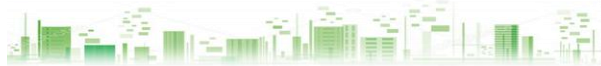
PERJANJIAN KINERJA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah (tahun)	10.53
		2. Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	15.73
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan	1. UsiaHarapanHidup (tahun)	74.04
3	Menurunnya jumlah pengangguran	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.55
		2. AngkaPartisipasi AngkatanKerja (%)	64.92
4	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	1. Indeks Pembangunan Manusia	79.53
		2. Tingkat Kemiskinan (%)	2.30
		3. Indeks Pembangunan Gender	92.00
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60.64
6	Meningkatnya kenyamanan, keamanan dan ketertiban lingkungan	1. <i>Livable City Index</i>	74.50
7	Terwujudnya infrastruktur yang handal	1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (skala)	79.00
8	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	1. Indeks Gini Ratio	0.30
		2. PDRB Perkapita (Rp. Juta)	126.64
9	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	1. PDRB Non Migas (Rp. Triliun)	38.62
10	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Opini Laporan Keuangan (Kategori)	WTP
		2. Indeks Persepsi Korupsi	6.90
		3. Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai SKM)	80.36
		4. Nilai Evaluasi LAKIP (Predikat)	75.00
		5. Penilaian Kepatuhan (nilai kepatuhan berdasarkan zona warna)	79.00
		6. Indeks Profesionalitas ASN	87.00

Balikpapan, 04 Februari 2021

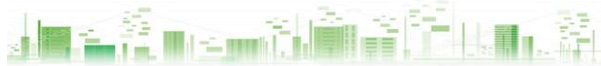
WALI KOTA BALIKPAPAN


H. M. RIZAL EFFENDI



**PROGRAM DAN ANGGARAN
PERJANJIAN KINERJA WALI KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2021**

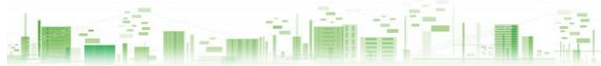
NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	215,826,700,707.00	1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum	1,023,500,000.00	1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
3	1.01.04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	3,551,750,000.00	1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
4	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	134,523,847,791.00	1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
5	1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	766,701,500.00	1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
6	1.02.04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	4,548,679,500.00	1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
7	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	29,169,289,032.00	1.02.0.00.0.00.02.0000 RSKB Sayang Ibu
8	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	29,900,082,910.00	1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum
9	1.03.06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	48,617,799,837.00	1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum
10	1.03.07 Program Pengembangan Permukiman	116,729,999,450.00	1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum
11	1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung	65,015,000,000.00	1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum
12	1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan	74,665,291,000.00	1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum
13	1.03.11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	250,000,000.00	1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum
14	1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1,853,467,000.00	1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Dan Permukiman
15	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	4,185,000,000.00	1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Dan Permukiman
16	1.04.03 Program Kawasan Permukiman	2,977,211,000.00	1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Dan Permukiman
17	1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	22,554,590,916.00	1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Dan Permukiman
18	1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3,365,246,728.00	1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja



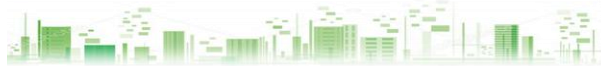
NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
19	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	2,431,999,300.00	
20	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	5,669,305,312.00	1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
21	1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial	1,434,000,100.00	1.06.0.00.0.00.1.00 Dinas Sosial
22	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	1,313,358,568.00	1.06.0.00.0.00.1.00 Dinas Sosial
23	1.06.05 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1,590,937,400.00	1.06.0.00.0.00.1.00 Dinas Sosial
24	1.06.06 Program Penanganan Bencana	556,471,100.00	1.06.0.00.0.00.1.00 Dinas Sosial
25	1.06.07 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	169,056,833.00	1.06.0.00.0.00.1.00 Dinas Sosial
26	1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung	207,975,000.00	2.10.1.03.0.00.1.00 Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang
27	1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan	5,000,000,000.00	2.10.1.03.0.00.1.00 Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang
28	1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,814,073,600.00	2.10.1.03.0.00.1.00 Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang
29	2.22.03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1,944,695,000.00	1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
30	2.22.05 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	1,402,850,000.00	1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
31	2.07.03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	978,441,500.00	2.07.0.00.0.00.1..0000 Dinas Ketenagakerjaan
32	2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja	255,062,577.00	2.07.0.00.0.00.1..0000 Dinas Ketenagakerjaan
33	2.07.05 Program Hubungan Industrial	227,266,700.00	2.07.0.00.0.00.1..0000 Dinas Ketenagakerjaan
34	2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	224,999,910.00	2.08.2.14.0.00.1.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
35	2.08.03 Program Perlindungan Perempuan	834,189,550.00	2.08.2.14.0.00.1.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
36	2.08.04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga	219,086,360.00	2.08.2.14.0.00.1.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
37	2.08.05 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	293,146,400.00	2.08.2.14.0.00.1.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
38	2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	229,297,700.00	2.08.2.14.0.00.1.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana



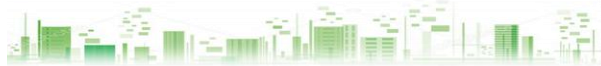
NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
39	2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak	918,724,113.00	2.08.2.14.0.00.1.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
40	2.14.02 Program Pengendalian Penduduk	178,928,149.95	2.08.2.14.0.00.1.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
41	2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	3,412,023,499.85	2.08.2.14.0.00.1.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
42	2.14.04 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	1,504,396,600.00	2.08.2.14.0.00.1.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
43	2.10.04 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	40,000,000.00	2.10.1.03.0.00.1.00 Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang
44	2.10.05 Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	27,657,541,334.00	2.10.1.03.0.00.1.00 Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang
45	2.10.09 Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	291,199,700.00	2.10.1.03.0.00.1.00 Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang
46	2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	297,999,736.00	2.11.0.00.0.00.1..0000 Dinas Lingkungan Hidup
47	2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	958,902,742.00	2.11.0.00.0.00.1..0000 Dinas Lingkungan Hidup
48	2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	5,019,998,801.00	2.11.0.00.0.00.1..0000 Dinas Lingkungan Hidup
49	2.11.05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	52,000,000.00	2.11.0.00.0.00.1..0000 Dinas Lingkungan Hidup
50	2.11.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	79,000,000.00	2.11.0.00.0.00.1..0000 Dinas Lingkungan Hidup
51	2.11.08 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	477,573,500.00	2.11.0.00.0.00.1..0000 Dinas Lingkungan Hidup
52	2.11.09 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	34,988,500.00	2.11.0.00.0.00.1..0000 Dinas Lingkungan Hidup
53	2.11.10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	99,643,000.00	2.11.0.00.0.00.1..0000 Dinas Lingkungan Hidup
54	2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan	50,793,754,400.00	2.11.0.00.0.00.1..0000 Dinas Lingkungan Hidup
55	2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk	2,486,442,576.00	2.12.0.00.0.00.1.00 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



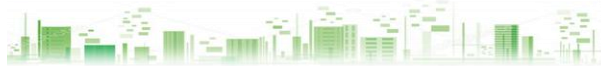
NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
56	2.12.03 Program Pencatatan Sipil	632,786,396.00	2.12.0.00.0.00.1.00 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
57	2.12.04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1,142,117,716.00	2.12.0.00.0.00.1.00 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
58	2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	40,382,375,272.00	2.15.0.00.0.00.1.00 Dinas Perhubungan
59	2.15.03 Program Pengelolaan Pelayaran	290,000,000.00	2.15.0.00.0.00.1.00 Dinas Perhubungan
60	2.16.02 Program Informasi Dan Komunikasi Publik	2,425,314,880.00	2.16.2.20.2.21.1.00 Dinas Komunikasi Dan Informatika
61	2.16.03 Program Aplikasi Informatika	4,202,297,300.00	2.16.2.20.2.21.1.00 Dinas Komunikasi Dan Informatika
62	2.20.02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	48,400,000.00	2.16.2.20.2.21.1.00 Dinas Komunikasi Dan Informatika
63	2.21.02 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	49,918,000.00	2.16.2.20.2.21.1.00 Dinas Komunikasi Dan Informatika
64	2.17.03 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	77,485,550.00	2.17.3.31.0.00.1..00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian
65	2.17.05 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	545,304,000.00	2.17.3.31.0.00.1..00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian
66	2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	317,099,800.00	2.17.3.31.0.00.1..00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian
67	2.17.08 Program Pengembangan Umkm	116,399,900.00	2.17.3.31.0.00.1..00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian
68	2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	249,994,400.00	2.18.0.00.0.00.1.00 Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu
69	2.18.03 Program Promosi Penanaman Modal	299,999,800.00	2.18.0.00.0.00.1.00 Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu
70	2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal	999,002,148.00	2.18.0.00.0.00.1.00 Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu
71	2.18.05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	564,816,536.00	2.18.0.00.0.00.1.00 Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu
72	2.18.06 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	980,933,752.00	2.18.0.00.0.00.1.00 Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu
73	2.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	4,845,000,000.00	2.19.3.26.0.00.1..0000 Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata
74	2.19.03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	10,529,293,064.00	2.19.3.26.0.00.1..0000 Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata



NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
75	2.19.04 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1,000,000,000.00	2.19.3.26.0.00.1..0000 Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata
76	2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan	1,295,404,150.00	2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan Dan Arsip
77	2.24.02 Program Pengelolaan Arsip	649,999,750.00	2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan Dan Arsip
78	2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	259,589,536.00	3.27.3.25.2.09.1.00 Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
79	2.09.05 Program Pengawasan Keamanan Pangan	100,000,000.00	3.27.3.25.2.09.1.00 Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
80	3.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	8,433,416,345.00	2.17.3.31.0.00.1..00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian
81	3.31.03 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	79,985,700.00	2.17.3.31.0.00.1..00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian
82	3.31.04 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	200,000,000.00	2.17.3.31.0.00.1..00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian
83	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1,699,999,540.00	2.19.3.26.0.00.1..0000 Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata
84	3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata	2,579,892,608.00	2.19.3.26.0.00.1..0000 Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata
85	3.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	480,000,000.00	2.19.3.26.0.00.1..0000 Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata
86	3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	958,439,372.00	3.27.3.25.2.09.1.00 Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
87	3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2,203,884,273.00	3.27.3.25.2.09.1.00 Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
88	3.27.04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	928,440,540.00	3.27.3.25.2.09.1.00 Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
89	3.27.05 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	98,855,000.00	3.27.3.25.2.09.1.00 Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
90	3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian	444,960,672.00	3.27.3.25.2.09.1.00 Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
91	3.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	7,687,739,482.00	3.30.0.00.0.00.1.00 Dinas Perdagangan
92	3.30.04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	99,945,000.00	3.30.0.00.0.00.1.00 Dinas Perdagangan
93	3.30.05 Program Pengembangan Ekspor	474,918,000.00	3.30.0.00.0.00.1.00 Dinas Perdagangan
94	3.30.06 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	548,880,207.00	3.30.0.00.0.00.1.00 Dinas Perdagangan



NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
95	3.30.07 Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	99,850,000.00	3.30.0.00.0.00.1.00 Dinas Perdagangan
96	4.01.02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	54,978,494,566.00	4.01.0.00.0.00.1..0000 Sekretariat Daerah
97	4.01.03 Program Perekonomian Dan Pembangunan	2,323,778,449.00	4.01.0.00.0.00.1..0000 Sekretariat Daerah
98	4.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	22,280,197,580.00	4.02.4.02.0.00.1..0000 Sekretariat Dprd
99	5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,937,613,450.00	5.01.5.05.0.00.1.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
100	5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	50,000,000.00	5.01.5.05.0.00.1.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
101	5.05.02 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	849,999,750.00	5.01.5.05.0.00.1.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
102	5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	28,914,702,043.00	5.02.0.00.0.00.1..0000 Badan Pengelola Keuangan Daerah
103	5.02.03 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	16,350,000,000.00	5.02.0.00.0.00.1..0000 Badan Pengelola Keuangan Daerah
104	5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6,385,393,020.00	5.02.0.00.0.00.2.00 Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
105	5.03.02 Program Kepegawaian Daerah	3,347,384,322.00	5.03.5.04.0.00.1..0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
106	5.04.02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	11,124,943,886.00	5.03.5.04.0.00.1..0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
107	6.01.02 Program Penyelenggaraan Pengawasan	226,435,000.00	6.01.0.00.0.00.1.00 Inspektorat
108	6.01.03 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	210,375,000.00	6.01.0.00.0.00.1.00 Inspektorat
109	7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2,872,552,000.00	7.01.0.00.0.00.1.00 Kecamatan Balikpapan Barat
110	7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3,374,583,400.00	7.01.0.00.0.00.1.00 Kecamatan Balikpapan Barat
111	7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	286,999,900.00	7.01.0.00.0.00.1.00 Kecamatan Balikpapan Barat
112	7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	3,303,516,593.00	7.01.0.00.0.00.2.00 Kecamatan Balikpapan Tengah



NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
113	7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2,687,724,107.00	7.01.0.00.0.00.2.00 Kecamatan Balikpapan Tengah
114	7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	47,905,000.00	7.01.0.00.0.00.2.00 Kecamatan Balikpapan Tengah
115	7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2,459,670,500.00	7.01.0.00.0.00.3.00 Kecamatan Balikpapan Kota
116	7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2,812,132,518.00	7.01.0.00.0.00.3.00 Kecamatan Balikpapan Kota
117	7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	187,131,207.00	7.01.0.00.0.00.3.00 Kecamatan Balikpapan Kota
118	7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	4,396,975,300.00	7.01.0.00.0.00.4.00 Kecamatan Balikpapan Utara
119	7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1,647,190,950.00	7.01.0.00.0.00.4.00 Kecamatan Balikpapan Utara
120	7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	217,675,000.00	7.01.0.00.0.00.4.00 Kecamatan Balikpapan Utara
121	7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	3,783,937,025.00	7.01.0.00.0.00.5.00 Kecamatan Balikpapan Selatan
122	7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3,284,231,660.00	7.01.0.00.0.00.5.00 Kecamatan Balikpapan Selatan
123	7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	326,282,000.00	7.01.0.00.0.00.5.00 Kecamatan Balikpapan Selatan
124	7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2,627,586,200.00	7.01.0.00.0.00.6..0000 Kecamatan Balikpapan Timur
125	7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2,035,151,756.00	7.01.0.00.0.00.6..0000 Kecamatan Balikpapan Timur
126	7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	212,180,000.00	7.01.0.00.0.00.6..0000 Kecamatan Balikpapan Timur
127	8.01.02 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	615,000,000.00	8.01.0.00.0.00.1.00 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
128	8.01.03 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1,454,997,960.00	8.01.0.00.0.00.1.00 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
129	8.01.04 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	524,995,000.00	8.01.0.00.0.00.1.00 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik



NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
130	8.01.05 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	500,000,000.00	8.01.0.00.0.00.1.00 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
	JUMLAH	1.168.283.960.763.80	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. M. RIZAL EFFENDI

Jabatan : WALI KOTA BALIKPAPAN

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Balikpapan, 28 Februari 2020

WALI KOTA BALIKPAPAN



H. M. RIZAL EFFENDI

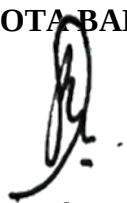


**PERJANJIAN KINERJA KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2020**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	1.	Rata-rata lama sekolah (tahun)	10,67
		2.	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,93
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan	1.	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,41
3	Menurunnya jumlah pengangguran	1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,85
		2.	AngkaPartisipasi AngkatanKerja (%)	64,66
4	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	1.	Indeks Pembangunan Manusia	80,11
		2.	Tingkat Kemiskinan (%)	2,31
		3.	Indeks Pembangunan Gender	92
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,42
6	Meningkatnya kenyamanan, keamanan dan ketertiban lingkungan	1.	<i>Livable City Index</i>	80,15
7	Terwujudnya infrastruktur yang handal	1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (skala)	78,00
8	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	1.	Indeks Gini Ratio	0,31
		2.	PDRB Perkapita (Rp. Juta)	157,39
9	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	1.	PDRB Non Migas (Rp. Triliun)	43,20
10	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1.	Opini Laporan Keuangan (Kategori)	WTP
		2.	Indeks Persepsi Korupsi	7,00
		3.	Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai SKM)	82.25
		4.	Nilai Evaluasi LAKIP (Predikat)	70,15 (BB)
		5.	Penilaian Kepatuhan (nilai kepatuhan berdasarkan zona warna)	83,19
		6.	Indeks Profesionalitas ASN	89,50

Balikpapan, 28 Februari 2020

WALI KOTA BALIKPAPAN


H. M. RIZAL EFFENDI



**PROGRAM DAN ANGGARAN
PERJANJIAN KINERJA WALI KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2020**

NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
I	PROGRAM PRIORITAS			
1	3.00.04.3.00.04.01.23.	Program Peningkatan Kualitas Manajemen Karir Aparatur Sipil Negara	19,935,718,250	Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	1.01.05.01.1.05.01.02.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	7,300,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	1.01.05.01.1.05.01.04	Program Sarana dan Prasarana Logistik	1,375,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	1.01.04.1.01.05.01.21.	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	900,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	3.00.03.1.01.02.02.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	79,860,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, RSKB Sayang Ibu
6	3.00.02.3.00.02.01.01	Program Penelitian dan Pengembangan	1,812,643,000	Bappeda Litbang
7	1.02.06.1.02.06.01.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3,695,013,500	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
8	1.01.02.1.01.02.00.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	5,940,969,000	Dinas Kesehatan
9	1.01.02.1.01.02.00.32.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	4,510,287,000	Dinas Kesehatan
10	1.01.02.1.01.02.00.33.	Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Kesehatan	17,270,629,450	Dinas Kesehatan
11	1.01.02.1.01.02.00.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	49,442,183,550	Dinas Kesehatan
12	1.02.10.10.2.10.10.18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	1,275,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
13	2.00.07.1.02.11.01.18.	Program Penataan Struktur Industri	10,233,500,000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
14	1.02.11.1.02.11.01.15.	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	169,448,350	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
15	1.02.11.1.02.11.01.19.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi	70,165,000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
16	1.02.11.1.02.11.01.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2,142,110,000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
17	2.00.07.1.02.11.01.15.	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	519,193,750	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
18	1.02.11.1.02.11.01.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	717,358,000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
19	1.02.05.1.02.05.01.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	70,673,093,300	Dinas Lingkungan Hidup
20	1.02.05.1.02.05.01.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	4,480,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
21	1.02.05.1.02.05.01.19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	825,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
22	1.02.05.1.02.05.01.17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	6,855,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
23	2.00.03.2.00.03.01.03.	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian	1,149,730,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
24	2.00.03.2.00.03.01.19	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	180,450,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
25	2.00.01.2.00.03.01.20.	Program Peningkatan Produksi Perikanan	950,200,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
26	2.00.03.2.00.03.01.18.	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	380,000,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
27	2.00.03.2.00.03.01.26.	Program Peningkatan Produksi Pertanian	1,217,855,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
28	1.01.03.1.01.03.01.15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	56,571,393,800	Dinas Pekerjaan Umum
29	1.01.03.1.01.03.01.33.	Program Pembangunan	14,660,830,000	Dinas Pekerjaan Umum



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
		Pedestrian Kota		
30	1.01.03.1.01.03.01.16.	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	65,164,000,000	Dinas Pekerjaan Umum
31	1.01.03.1.01.03.01.27.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	15,728,400,000	Dinas Pekerjaan Umum
32	1.01.03.1.01.03.01.28.	Program pengendalian banjir	36,217,727,500	Dinas Pekerjaan Umum
33	1.01.03.1.01.03.01.71.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah	28,875,000,000	Dinas Pekerjaan Umum
34	1.01.03.1.01.03.01.17.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	94,352,403,000	Dinas Pekerjaan Umum
35	1.02.02.01.1.2.2.1.15.	Program Keluarga Berencana	3,963,803,620	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
36	1.02.02.1.02.02.01.15.	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	3,495,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
37	1.02.02.1.02.02.01.22.	Program pengembangan bahan informasi tentang Perlindungan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	1,820,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
38	1.02.02.1.02.02.01.20.	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling (Kesehatan Reproduksi Remaja) KRR	600,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
39	1.02.02.1.02.02.01.16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	350,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
40	1.02.13.1.01.01.01.20.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	18,150,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
41	2.00.02.2.00.02.01.18.	Program Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata	1,770,000,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
42	2.00.02.2.00.02.01.16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4,400,000,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
43	2.00.02.2.00.02.01.17.	Program Pengembangan Kemitraan	631,025,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
44	2.00.02.2.00.02.01.15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3,055,779,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
45	1.02.13.2.00.02.01.16.	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	2,795,000,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
46	1.01.03.1.01.03.01.34.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	20,663,000,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
47	1.02.16.1.01.01.01.19.	Program Pelestarian Benda Cagar Budaya	1,925,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
48	1.01.01.1.01.01.01.15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	7,430,943,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
49	1.01.01.1.01.01.01.30.	Program Pendidikan Dasar	214,120,035,450	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
50	1.01.01.1.01.01.01.18.	Program Pendidikan Non Formal	17,702,791,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
51	1.01.01.1.01.01.01.20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1,801,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
52	2.00.06.2.00.06.01.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	2,907,241,250	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
53	2.00.06.2.00.06.01.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	600,000,000	Dinas Perdagangan
54	2.00.06.2.00.06.01.20.	Program Peningkatan Kebersihan, Keamanan Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Pasar	5,285,960,600	Dinas Perdagangan
55	2.00.06.2.00.06.01.24.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	3,347,866,700	Dinas Perdagangan
56	2.00.06.2.00.06.01.15.	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	1,407,100,000	Dinas Perdagangan
57	1.02.09.1.02.09.01.21.	Program Penerangan Jalan Umum (PJU)	-	Dinas Perdagangan
58	1.02.09.1.02.09.01.19.	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	2,600,000,000	Dinas Perhubungan
59	1.02.09.1.02.09.01.20.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	3,882,500,000	Dinas Perhubungan
60	1.02.18.1.02.17.01.16.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	370,000,000	Dinas Perhubungan
61	1.02.18.1.02.17.01.15.	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	150,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
62	1.01.01.1.02.17.01.01.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	4,597,097,530	Dinas Perpustakaan dan Arsip
63	1.01.03.1.02.04.01.68.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	-	Dinas Perpustakaan dan Arsip, Kecamatan
64	1.01.03.1.02.04.01.66.	Program Perencanaan Tata Ruang	1,500,000,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
65	1.01.04.1.01.04.01.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	9,753,332,600	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
66	1.02.04.1.02.04.01.29	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman	2,180,625,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
67	1.01.04.1.01.04.01.15.	Program Pengembangan Perumahan	250,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
68	1.01.06.1.01.06.01.27	Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan	73,440,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
69	1.01.06.1.01.06.01.16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2,378,873,600	Dinas Sosial
70	1.01.06.1.01.06.01.28.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1,135,410,000	Dinas Sosial
71	1.01.02.1.01.02.00.35.	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	150,000,000	Dinas Sosial
72	1.02.01.1.02.01.01.16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	190,838,000	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, dan Kecamatan
73	1.02.01.1.02.01.01.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,024,374,300	Dinas Tenaga Kerja
74	1.02.01.1.02.01.01.17.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	358,476,000	Dinas Tenaga Kerja
75	3.00.01.3.00.01.01.20.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2,192,472,000	Dinas Tenaga Kerja
76	5.00.01.1.01.05.02.17.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	2,200,000,000	Inspektorat
77	1.01.05.1.01.05.02.15.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	182,540,000	Satuan Polisi Pamong Praja



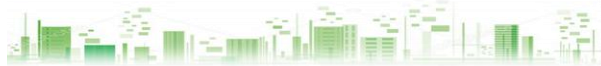
NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
78	3.00.04.4.00.01.01.19.	Program Penataan Kelembagaan	360,999,700	Satuan Polisi Pamong Praja
79	3.00.03.4.00.01.01.30.	Program Pengendalian Inflasi	140,188,000	Sekretariat Daerah
80	1.02.12.1.02.12.01.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	200,000,000	Sekretariat Daerah
81	3.00.03.3.00.03.01.29.	Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	15,026,837,787	Sekretariat Daerah
82	1.02.12.1.02.12.01.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	300,000,000	Sekretariat Daerah
83	1.02.10.1.02.10.10.23.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	4,450,000,000	Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
84	1.02.12.1.02.12.01.19.	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan	686,000,000	Sekretariat DPRD, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika
JUMLAH I			882,093,861,587	
II	PROGRAM PENUNJANG			
85	6.00.01.6.00.01.01.44.	Program Fasilitas Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Sekolah	661,529,750	Kecamatan Se Kota Balikpapan
86	5.00.01.1.01.05.01.27	Program Pengembangan Ketahanan Politik Ekonomi Sosial dan Budaya	-	Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
87	4.00.01.4.00.01.01.37.	Program Bantuan Hukum dan HAM	898,346,000	Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
88	4.00.01.4.00.01.01.36.	Program Evaluasi dan Pelaporan Pemerintahan	159,122,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah
89	4.00.01.4.00.01.01.69.	Program Fasilitas dan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Kota	250,981,300	Badan Pengelola Keuangan Daerah



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
90	4.00.01.4.00.01.01.43.	Program Hari Jadi Kota	4,500,000,000	Bappeda Litbang
91	2.00.03.2.00.03.01.17.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Petani, Peternak, Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah	381,750,000	Bappeda Litbang
92	3.00.04.3.00.04.01.17.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	55,100,000	Bappeda Litbang
93	1.01.03.1.01.03.01.31.	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	500,000,000	Dinas Kesehatan
94	6.00.01.6.00.01.01.18.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
95	1.01.01.1.01.01.01.31.	Program Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan	1,960,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
96	4.00.01.4.00.01.01.02.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2,874,250,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
97	1.02.18.1.02.17.01.17.	Program Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	271,875,000	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
98	1.01.03.1.01.03.01.38.	Program Pemeliharaan Saluran dan Drainase	20,994,497,500	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
99	2.00.06.2.00.06.01.21.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	1,800,000,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
100	1.02.09.1.02.09.01.32.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	800,000,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
101	4.00.01.4.00.01.01.27.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	199,650,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
102	1.02.04.1.02.04.01.16.	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	689,999,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
103	4.00.01.4.00.01.01.26.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1,082,049,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
104	2.00.03.2.00.03.01.21.	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan/Ternak	853,800,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
105	5.00.01.5.00.01.01.21.	Program pendidikan politik masyarakat	2,645,000,000	Dinas Pekerjaan Umum
106	1.02.04.1.02.04.01.21.	Program Pengadaan Lahan Pembangunan Jalan dan	5,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
		Jembatan		
107	1.02.04.1.02.04.01.22.	Program Pengadaan Lahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	27,800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum
108	1.02.04.1.02.04.01.20.	Program Pengadaan Lahan Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	18,042,500,000	Dinas Pekerjaan Umum
109	1.02.09.1.02.09.01.31.	Program Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan	759,990,000	Dinas Pekerjaan Umum
110	1.02.09.1.02.09.01.33.	Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	958,300,000	Dinas Pekerjaan Umum
111	1.02.12.1.02.12.02.20	Program Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum
112	1.02.10.1.02.10.10.10.	Program Pengawasan Pengendalian Telekomunikasi dan Teknologi Informasi	169,895,000	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
113	1.01.04.1.01.04.01.04.	Program pengelolaan areal pemakaman	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
114	4.00.01.4.00.01.01.34.	Program Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	2,705,049,200	Dinas Perdagangan
115	1.02.16.1.01.01.01.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	3,256,250,000	Dinas Perdagangan
116	3.00.03.3.00.03.01.32.	Program Pengelolaan Keuangan Perbendaharaan	1,455,000,000	Dinas Perhubungan
117	1.02.09.1.02.09.01.22.	Program Pengelolaan Parkir	5,150,000,000	Dinas Perhubungan
118	3.00.03.3.00.03.01.31.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	125,000,000	Dinas Perhubungan
119	1.02.05.1.01.04.01.05.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	18,530,648,450	Dinas Perhubungan
120	1.01.04.1.01.04.01.06.	Program Pengelolaan Rumah Susun	3,500,000,000	Dinas Perhubungan
121	2.00.05.4.00.01.01.20.	Program Pengembangan City Gas	-	Dinas Perhubungan
122	1.01.03.1.01.03.01.24.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	3,500,000,000	Dinas Perhubungan
123	1.02.01.1.02.01.01.19	Program Pengembangan Data dan Informasi	64,225,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
124	1.02.09.1.02.09.01.26.	Program Pengembangan Data, Informasi Perhubungan /Transportasi	2,500,000,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
		dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.		
125	3.00.02.1.02.01.01.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	805,000,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
126	2.00.03.2.00.03.01.23.	Program Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) Masyarakat Perikanan	297,825,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
127	4.00.01.4.00.01.01.15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	479,682,700	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
128	2.00.01.2.00.03.01.24.	Program Pengembangan Pencatatan Kegiatan Usaha Perikanan	75,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
129	2.00.01.2.00.03.01.21.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	350,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
130	2.00.06.2.00.06.01.24.	Program Pengembangan Potensi dan Pendapatan	-	Dinas Perumahan dan Permukiman
131	1.02.12.1.02.12.01.18.	Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	655,538,000	Dinas Perumahan dan Permukiman, Sekretariat Daerah
132	4.00.01.4.00.01.01.07.	Program Pengembangan Sistem Pelaporan	1,153,500,000	Dinas Sosial
133	1.02.11.1.02.11.01.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	189,058,000	Dinas Sosial dan Dina Tenaga Kerja
134	5.00.01.5.00.01.01.35.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1,950,000,000	Inspektorat
135	1.01.01.1.01.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	102,400,000	Kantor Kesbangpol
136	4.00.01.4.00.01.01.22.	Program Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan ASN	1,211,659,700	Kantor Kesbangpol
137	2.00.03.2.00.03.01.01.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	-	Kantor Kesbangpol
138	1.01.03.1.01.03.01.36.	Program Peningkatan Drainase Lingkungan	12,417,542,800	Kantor Kesbangpol
139	1.01.03.1.01.03.01.35.	Program Peningkatan Jalan Lingkungan	66,322,457,200	Kantor Kesbangpol, Sekretariat Daerah
140	4.00.01.4.00.01.01.18.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan	250,000,000	Kantor Kesbangpol, Sekretariat Daerah



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
141	4.00.02.4.00.02.01.15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	28,993,234,870	Kecamatan Se Kota Balikpapan
142	1.01.05.1.01.05.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	151,642,500	Kecamatan Se Kota Balikpapan
143	4.00.01.4.00.01.01.41.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	1,488,240,000	Kecamatan, Sekretariat Daerah
144	3.00.04.3.00.04.01.20.	Program Peningkatan Kinerja ASN	75,292,500	Kecamatan, Sekretariat Daerah
145	3.00.04.3.00.04.01.21.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	335,347,750	RSKB Sayang Ibu
146	1.01.02.1.01.02.00.34.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	27,713,908,300	Sekretariat Daerah
147	4.00.01.4.00.01.01.39.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1,002,950,000	Sekretariat Daerah
148	1.02.07.4.00.01.01.26.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	1,356,473,800	Sekretariat Daerah
149	4.00.01.4.00.01.01.16.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah	17,000,000,000	Sekretariat Daerah
150	2.00.03.2.00.03.01.23.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	1,235,570,000	Sekretariat Daerah
151	5.00.01.5.00.01.01.20.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	65,000,000	Sekretariat Daerah
152	1.02.07.4.00.01.01.24.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	6,216,769,000	Sekretariat Daerah
153	3.00.03.3.00.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10,000,000	Sekretariat Daerah
154	1.02.07.6.00.01.01.25.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	3,447,835,250	Sekretariat Daerah
155	3.00.01.3.00.01.01.21.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1,037,840,000	Sekretariat Daerah



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
156	1.01.01.1.01.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,094,178,000	Sekretariat Daerah
157	1.01.03.1.01.03.01.37.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	-	Sekretariat Daerah
158	1.02.10.1.02.10.10.19.	Program Penyebarluasan Informasi Daerah	19,107,300	Sekretariat Daerah
159	1.02.10.1.02.10.10.01.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	-	Sekretariat Daerah
160	2.00.03.4.00.01.01.25.	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya dan Sarana Prasarana	-	Sekretariat Daerah
161	3.00.02.3.00.02.01.26.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	206,750,000	Sekretariat Daerah
162	3.00.02.3.00.02.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	15,000,000	Sekretariat Daerah
163	1.01.06.1.01.06.01.23.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	663,927,000	Sekretariat Daerah
164	1.02.09.1.02.09.01.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	3,000,000,000	Sekretariat Daerah
165	1.01.03.1.01.03.01.22.	Program Sistem Data Informasi Pekerjaan Umum	-	Sekretariat Daerah
166	1.01.02.1.01.02.02.23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	-	Sekretariat Daerah
167	5.00.01.1.01.05.01.17.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	455,000,000	Sekretariat Daerah, Bappeda Litbang, Badan Pengelola Keuangan Daerah
168	1.01.01.1.01.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,732,200,640	Sekretariat DPRD
169	1.02.09.1.02.09.01.23.	Program Pelayanan Angkutan Perairan	706,000,000	Seluruh OPD Kota Balikpapan
170	1.02.10.1.02.10.10.24.	Program Pelayanan Pengaduan Masyarakat	727,500,000	Seluruh OPD Kota Balikpapan
171	4.00.01.4.00.01.01.40.	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	489,836,500	Seluruh OPD Kota Balikpapan
JUMLAH II			321,894,074,010	



NO	KODE PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
JUMLAH I + JUMLAH II			1,203,987,935,597	

Balikpapan, 28 Februari 2020

WALI KOTA BALIKPAPAN



H. M. RIZAL EFFENDI



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188.45-14/2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa dalam rangka penguatan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam indikator Kinerja Utama 2016-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 33);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 berisi sasaran strategis dan indikator utama untuk kurun waktu 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
- KETIGA : Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya mengacu pada indikator kinerja utama untuk kurun waktu 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
- KEEMPAT : Dokumen perencanaan Perangkat Daerah dituangkan dalam bentuk:
a. Renstra Perangkat Daerah 5 (lima) tahun ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
b. Indikator Kinerja Utama 5 (lima) tahun dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
c. Penetapan Kinerja setiap tahun dituangkan dalam dokumen yang ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan diketahui Wali Kota.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 27 Januari 2017

WALI KOTA BALIKPAPAN,

M. RIZAL EFFENDI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kcpada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Kota Balikpapan;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



LAMPIRAN
NOMOR 188.45-14/2017
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 -2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	1. Meningkatkan kualitas pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Asumsi bahwa rata-rata lama sekolah di Kota Balikpapan tidak mengalami penurunan	5 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.	6 $RLS = \frac{1}{P_{25+}} \sum_{i=1}^{P_{25+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke-}i)$ Keterangan : RLS = Rata-rata Lama Sekolah P_{25+} = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun keatas Lama Sekolah Penduduk ke- i = terdiri atas : • Jumlah penduduk tidak pernah sekolah = 0 • Masih sekolah di SD s.d. S1 = Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 • Masih sekolah di S2/S3 = Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir	7 BPS, Disdikbud	8 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan bentuk pendidikan (dalam tahun) diharapkan dicapai oleh anak di Kota Balikpapan	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	$HLS_g = FK \sum_{i=1}^n \frac{E_i}{P_i}$ Keterangan : HLS_g = Harapan lama sekolah pada umur a ditahun t FK = Faktor koreksi pesantren E_i = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah	BPS, Disdikbud, Disdukcapil	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan	3. Angka Harapan Hidup (AHH)	Mengetahui derajat kesehatan masyarakat Kota Balikpapan	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.	AHH dihitung dari hasil Proyeksi SP2010	BPS, Dinkes, Disdukcapil	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB Sayang Ibu
3.	Menurunnya jumlah pengangguran	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Mengetahui banyaknya jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan di Kota Balikpapan	Nilai Persentase (%) jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	BPS, Disdikbud, Disdukcapil	Dinas Ketenagakerjaan
		2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Mengetahui potensi angkatan kerja yang tersedia di Kota Balikpapan	Persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.	$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk 15 Tahun +}} \times 100\%$	BPS, Disdikbud, Disdukcapil	Dinas Ketenagakerjaan



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	1. Indikator Pembangunan Manusia (IPM)	- mengukur keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). - Menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.	IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan, sebagaimana.	$IPM = \sqrt[3]{I_{pendidikan} \times I_{kesehatan} \times I_{pendapatan}}$ Dimensi pembentuk IPM : $I_{pendidikan} = \frac{RLS+HLE}{2} = \text{Nilai Rata-rata atas}$ $I_{kesehatan} = \text{Angka Harapan Hidup (AHH)}$ $I_{pendapatan} = \text{PDRB Perkapita}$	BPS, Bappeda Litbang, Inspektorat, Bappeda Litbang, Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman, DPPAKB
		2. Tingkat Kemiskinan (TKm)	Mengetahui proporsi penduduk miskin di Kota Balikpapan	Tingkat kemiskinan adalah proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan	$TKm = \frac{\sum \text{Penduduk Miskin}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100\%$	BPS, Disdukcapil	Bappeda Litbang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan
		3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Mengetahui tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender.	$IPG = \frac{1}{3} [(X_{ese(1)} + X_{ese(2)} + inc.dsi)]$ Keterangan : $X_{ese(1)} = \text{Xede untuk harapan hidup}$ $X_{ese(2)} = \text{Xede untuk harapan pendidikan}$ $Inc-dsi = \text{indeks distribusi pendapatan}$	BPS, DPPAKB Disdukcapil	DPPAKB



No.	Sasaran Strategis	Indikator/Kinerja Utama(IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Mengetahui Kualitas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	IKLH merupakan alat untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu daerah, dimana Tujuan disusunnya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	$IKLH = (IPA \times 30\%) + (IPU \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$ Keterangan : IPA = Indeks Pencemaran Air Sungai IPU = Indeks Pencemaran Udara	DLH, Bappeda Litbang	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup
6.	Meningkatnya kenyamanan, keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Livable City Index (LCI)	Mengetahui tingkat kenyamanan suatu kota berdasarkan persepsi warganya.	Kota layak huni atau <i>Livable City</i> adalah dimana masyarakat dapat hidup dengan nyaman dan tenang dalam suatu kota. Menurut Hahweg (1997), kota yang layak huni adalah kota yang dapat menampung seluruh kegiatan masyarakat kota dan aman bagi seluruh masyarakat. Menurut Evan (2002), konsep <i>livable city</i> digunakan untuk mewujudkan bahwa gagasan pembangunan sebagai peningkatan dalam kualitas hidup fisik maupun habitat sosial untuk realisasinya.	Metode pengukuran kualitas penilaian <i>Livable City Index</i> (LCI) oleh Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), yang menilai tingkat kenyamanan hidup kota-kota di Indonesia.	Bappeda Litbang	DPP, DPU, BPBD, Dinas Sosial, Satpol PP, Kesbangpol, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Daerah, Bappeda Litbang



No.	Sasaran Strategis	Indikator-Kinerja Utama(IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Terwujudnya infrastruktur yang handal	1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar	Mengetahui tingkat kepuasan warga terhadap pelayanan infrastruktur dasar di Kota Balikpapan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah	Hasil pengukuran diasumsikan bahwa tingginya indeks kepuasan layanan infrastruktur mencerminkan tingginya kualitas output dan outcome dari pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur (skala 1-10)	Bappeda Litbang	DPU, Dishub Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
8.	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	1. Gini Ratio (GR)	Mengetahui pemerataan pendapatan berdasarkan kelas pendapatan Kota Balikpapan	Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ketidakteraturan ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada.	$GR = 1 - \frac{\sum f_i [Y_i + Y_{i+1}]}{\sum Y_i}$ Keterangan : $\sum f_i$ = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas Ke - i Y_i = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i. - Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu. - Bila GR = 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. - Bila GR = 1 artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja.	BPS, Bappeda Litbang	Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian, Dinas Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas Perekonomian



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita	Mengetahui nilai tambah produksi per kapita penduduk Kota Balikpapan	Merupakan alat (<i>tool</i>) ukur kinerja pertumbuhan ekonomi lebih kepada perubahan yang bersifat kuantitatif (<i>quantitative change</i>) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu dan biasanya satu tahun. Bila pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu Pendapatan Perkapita	$\text{PDRB Perkapita} = \frac{\text{PDRB}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100\%$	BPS, Bappeda Litbang	Bappeda Litbang
9.	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Non Migas	Mengetahui nilai tambah produksi kota Balikpapan tanpa memperhitungkan sektor migas	Jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah tanpa sektor migas	$\text{PDRB Non Migas} = \frac{\text{PDRB} - \text{Migas}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100\%$	BPS, Bappeda Litbang	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, DPMPT, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
10	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Opini laporan keuangan	Mengetahui kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini Badan Keuangan merupakan pernyataan pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.	Indikator terukur kualitatif atas opini BPK atas pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini terdiri atas Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), Tidak Wajar dan Tidak menyatakan pendapat	7	8
		2. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	Mengetahui persepsi (anggapan) publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis	<i>Corruption Perception Index (CPI)</i> atau Indeks Persepsi Korupsi merupakan indeks komposit yang mengukur persepsi pelaku usaha dan pakar terhadap korupsi di sektor publik, yaitu pegawai negeri, penyelenggara negara dan politisi.	Indikator Indeks Persepsi Korupsi menggunakan Skala numerik untuk mengukur tingkat korupsi dalam pemerintah daerah di sejumlah kota di Indonesia. Disusun berdasarkan jawaban dari pelaku bisnis. Rentang indeksnya adalah dari 0 sampai dengan 10, 0 berarti sangat korup, 10 sangat bersih	Inspektorat, Bappeda Litbang, Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Inspektorat, Bappeda Litbang, Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Survei Kepuasan Masyarakat at (SKM)	Mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Kota Balikpapan	Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.	Survei Kepuasan Masyarakat terukur atas Indeks Kepuasan Masyarakat. Survei dilaksanakan oleh Tim penyusunan indeks kepuasan masyarakat atau unit independen yang sudah berpengalaman, perlu dilakukan melalui "Perjanjian kerja sama" dengan unit independen seperti BPS, Perguruan Tinggi, LSM. Hasil atas Survei Kepuasan Masyarakat tidak harus disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut, tetapi dapat pula disajikan dalam bentuk kualitatif (baik atau buruk).	Perangkat Daerah se Kota Balikpapan	Bappeda Litbang
		4. Nilai Evaluasi AKIP	Mengetahui penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Balikpapan	Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan suatu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik	Penilaian hasil evaluasi AKIP berdasarkan predikat dengan Skala Skoring: AA = 90 - 100 A = 80 - 90 BB = 70 - 80 B = 60 - 70 CC = 50 - 60 C = 30 - 50 D = 0 - 30	BPS, Bappeda Litbang, Bagian Organisasi	Bappeda Litbang



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Penilaian Kepatuhan	Mengetahui hasil evaluasi kinerja unit pelayanan publik pemerintah Kota Balikpapan	Penilaian Kepatuhan adalah nilai hasil pengukuran kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan terhadap standar pelayanan publik.	Nilai Kepatuhan berdasarkan hasil evaluasi persepsi Pelayanan Publik. Kriteria Nilai Kepatuhan didasarkan atas 3 (tiga) Zonasi Pewarnaan yaitu - Zona Hijau (Kepatuhan Tinggi), - Zona Kuning (Kepatuhan Sedang), dan	Ombudsman Republik Indonesia (ORI)	Bappeda Litbang, Inspektorat, Sekretariat Daerah
		6. Indeks Profesionalitas ASN	Mengetahui tingkat profesionalitas ASN yang dihitung dengan mengkomposisikan : 1. kesesuaian antara PNS kompetensi dengan syarat jabatan (kompetensi gab) 2. Kinerja yang diukur dengan pengukuran SKP Kompensasi Gab yang diukur dengan selisih tunjangan yang diterima PNS secara	Sebuah indikator untuk mengukur tingkat profesionalitas individu atau kelompok dalam suatu organisasi	$IdxPro = koef(1-gaps) + koef(Kj) + koef(1-5Si_{ex})$ $\pm koef(1-\ln Displ)$ Keterangan : gaps = Persentase ASN yang tidak kompeten Kj = Angka SKP Si = Selisih rata-rata gaji dan tunjangan kinerja PNS untuk jabatan yang sama (%) Disc pl = Jumlah pelanggaran disiplin	BKPSDM, Perangkat Daerah se Kota Balikpapan	BKPSDM, Perangkat Daerah se Kota Balikpapan





**MEWUJUDKAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA
YANG NYAMAN DIHUNI, DAN BERKELANJUTAN
MENUJU MADINATUL IMAN**

